EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2024-2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda diwajibkan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 - 2026.

Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan RPD 2024 - 2026 ini bertujuan untuk menyampaikan hasil-hasil pelaksanaan RPD 2024 – 2026 dan sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan selanjutnya. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pencapaian indikator dalam RPD 2024 – 2026 termasuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam setiap bidang pembangunan pada RPD 2024 - 2026.

Akhirnya kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan hasil evaluasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Kuningan, April 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Ir. USEP SUMIRAT

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Evaluasi Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perihal Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah tertuang pada pasal 180 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dimana Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan: konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah; konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional; konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah; konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pada Pasal 182 ayat 2 dinyatakan bahwa bupati/wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup kabupaten/kota. Kemudian dipertegas pada pasal 183 terurai dimana pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, meliputi: Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Guna memenuhi apa yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 maka Badan

Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan melaksanakan kertas kerja Evaluasi Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026.

1.2 Dasar Hukum

Landasan Hukum Evaluasi Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o19 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.2.1/1570/SJ Tahun 2023 tentang Penyusunan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun

2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 91 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 118);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pola dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2004 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009-2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 Nomor 9 Seri E; Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat: 64/2014); dan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 7; Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat: 7/84/2019).

1.3 Hubungan Dokumen RPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 sebagai tahun transisi akibat adanya kebijakan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024, RPD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan yang lain baik secara vertikal maupun secara horizontal. Oleh karena itu penyusunan RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031 dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024 dan rancangan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. RPD Tahun 2024-2026 ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026 dan dijabarkan ke dalam RKPD sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keterkaitan RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1

Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

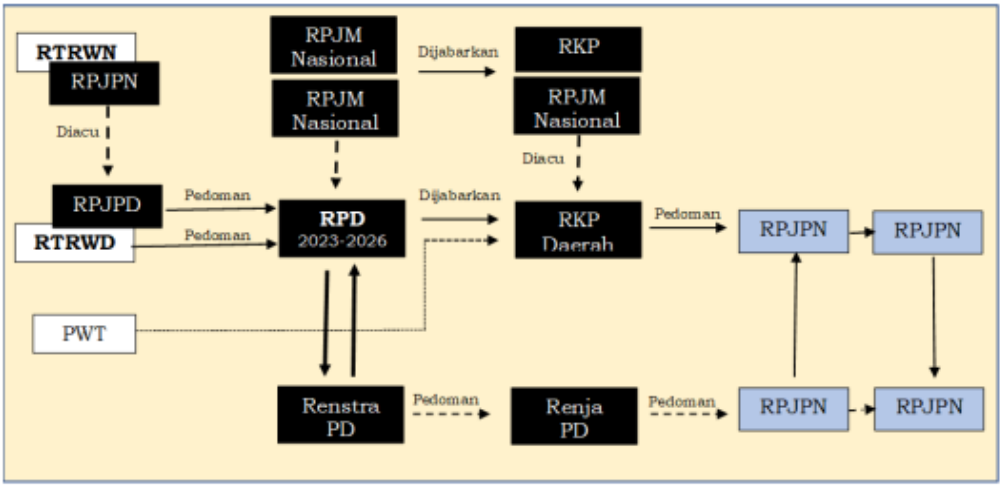

Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Intruksi Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2022

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan maksud sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi capaian RPD 2024-2026 sebagai bahan masukan guna sinkronisasi dan akselerasi Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. Sebagai bahan pertimbangan guna memantau perkembangan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Kuningan dengan mempertimbangkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Kuningan sejak RPD sebelumnya hingga proyeksi perencanaan jangka menengah daerah mendatang (RPJMD 2025-2030).
3. Dapat dijadikan salah satu bahan masukan perencanaan dan pedoman awal bagi seluruh *stakeholders* yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Kuningan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun pengawasan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat guna perencanaan jangka menengah daerah berikutnya (RPJMD 2025-2030).
4. Sebagai bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah dan antisipasi bagi kepentingan dan kebutuhan mutakhir daerah dalam menyusun dokumen perencanaan kedepan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, Evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 bertujuan :

1. Sebagai acuan dalam menentukan arah dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Kuningan selanjutnya (RPJMD 2025-2030).
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan Kabupaten Kuningan yang efektif, efisien, berkeadilan serta berkelanjutan.

3. Merupakan bahan acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.
4. Menyediakan tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Dokumen Evaluasi RPD.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan Indikator Kinerja Daerah.

Bab III. Evaluasi Capaian Kinerja RPD 2024-2026 dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Kuningan

Bab ini berisikan Evaluasi Kinerja RPD, Pelaksanaan APBD Kabupaten Kuningan dan Rincian Kinerja setiap Misi.

Sistem pengukuran kinerja yang disajikan dalam Laporan Evaluasi RPJMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kinerja Daerah

(IKD) sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Strategis (RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026). Kemudian dilanjutkan pada Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022-2024.

Bab IV Penutup

Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran sebagai tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Kuningan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kuningan terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan batas resmi yang ditetapkan melalui Permendagri Nomor 2 Tahun 2009, Permendagri Nomor 14 Tahun 2009, serta Kepmendagri Nomor 246 Tahun 2004, serta mengacu pada arahan Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) Badan Informasi Geospasial dan data dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, luas total wilayah Kabupaten Kuningan mencapai sekitar ±119.080,6 hektar. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Cibingbin, yang mencakup ±7.051,5 hektar, sedangkan Kecamatan Sindangagung memiliki luas terkecil, yakni sekitar ±1.281,3 hektar. Perhitungan luas wilayah ini menggunakan sistem proyeksi cylindrical equal area sesuai dengan arahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN).

Secara astronomis, wilayah ini berada pada koordinat 6°46'51,92" hingga 7°11'44,02" Lintang Selatan serta 108°23'2,07" hingga 108°47'40,12" Bujur Timur. Dari aspek geografis, Kabupaten Kuningan memiliki lokasi yang strategis karena berada di jalur regional yang menghubungkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Pangandaran. Selain itu, daerah ini juga menjadi jalur alternatif penghubung antara Bandung - Majalengka dengan Jawa Tengah dan berdekatan dengan Bandar Udara Internasional Kertajati. Kabupaten Kuningan termasuk dalam Kawasan Rebana, bersama dengan Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, serta Kota Cirebon, yang merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Secara administratif, Kabupaten Kuningan terbagi menjadi 32

kecamatan, 15 kelurahan, 361 desa, 33 lingkungan, 1.187 dusun, 1.745 rukun warga, dan 5.675 rukun tetangga, dengan batas-batas administratif sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Cirebon
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majalengka
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap (Provinsi Jawa Tengah)
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes (Provinsi Jawa Tengah)

Secara administratif Kabupaten Kuningan terdiri dari 32 kecamatan, 15 kelurahan, 361 desa 33 lingkungan, 1.187 dusun, 1.745 rukun warga, 5.675 rukun tetangga dan 400.175 kepala keluarga. Berdasarkan batas definitif melalui Permendagri Nomor 2 Tahun 2009, Permendagri Nomor 14 tahun 2009 dan Kepmendagri Nomor 246 Tahun 2004 serta Revisi Batas Daerah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon, luas wilayah Kabupaten Kuningan secara keseluruhan mencapai ± 119.344,82 hektar dengan kecamatan terluas yaitu Kecamatan Cibingbin seluas ± 7.091 hektar dan kecamatan yang memiliki luas paling sedikit yaitu Kecamatan Sindangagung seluas ± 1.312 hektar. Kabupaten Kuningan terbagi dalam kecamatan, desa dan kelurahan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

GAMBAR 2.1 PETA BATAS ADMINISTRASI KABUPATEN KUNINGAN

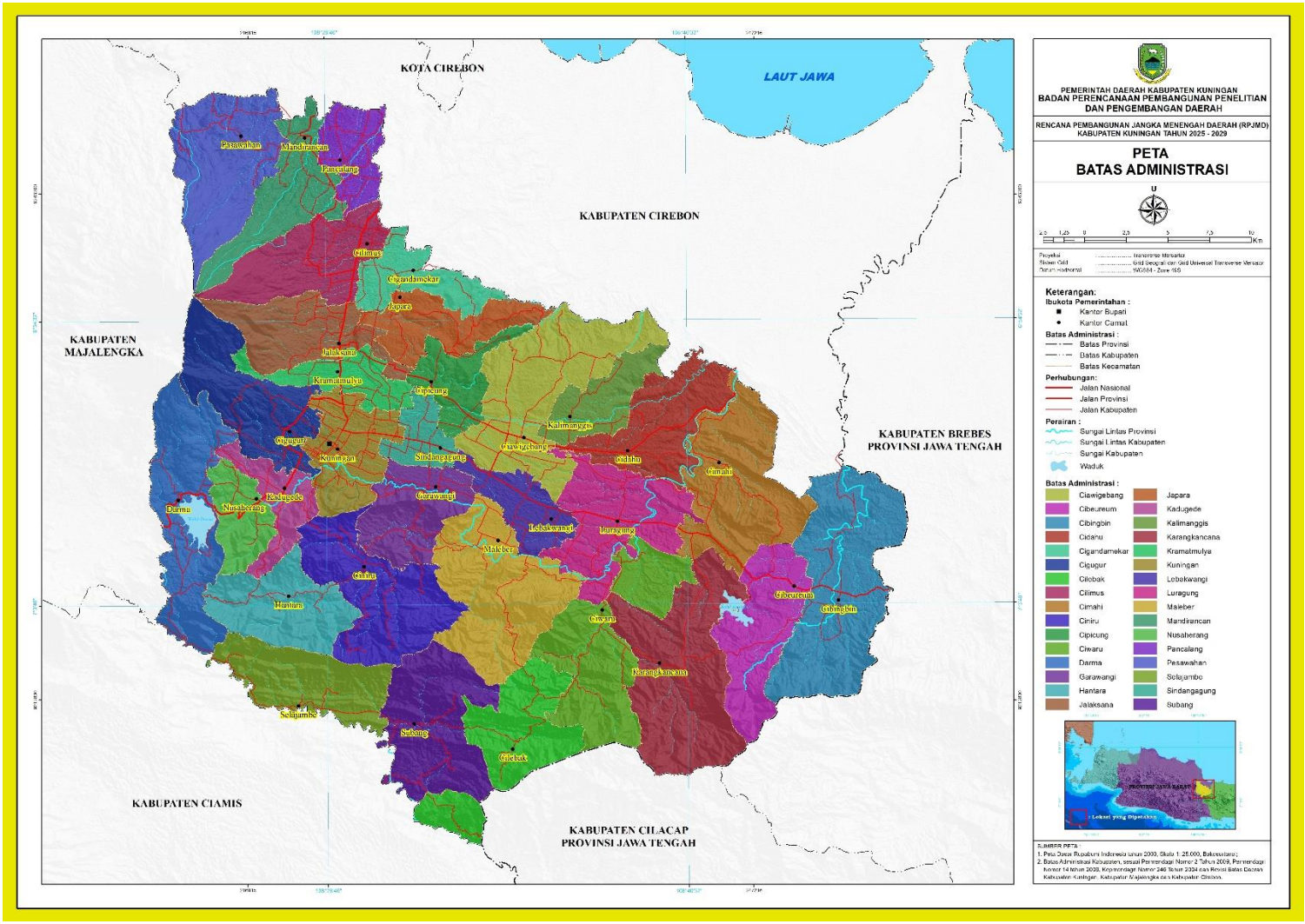

Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Luas wilayah setiap kecamatan disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Setiap Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase
1	Ciawigebang	6.084,	5,11
2	Cibeureum	3.850,	3,23
3	Cibingbin	7.051,	5,92
4	Cidahu	3.691,	3,10
5	Cigandamekar	2.164,	1,82
6	Cigugur	4.206,	3,53
7	Cilebak	4.273,	3,59
8	Cilimus	3.798,	3,19
9	Cimahi	5.437,	4,57
10	Ciniru	4.866,	4,09
11	Cipicung	1.921,	1,61
12	Ciwaru	5.204,	4,37
13	Darma	5.405,	4,54
14	Garawangi	3.012,	2,53
15	Hantara	3.468,	2,91
16	Jalaksana	3.296,	2,77
17	Japara	2.649,	2,22
18	Kadugede	1.763,	1,48
19	Kalimanggis	2.091,	1,76
20	Karangkancana	6.715,	5,64
21	Kramatmulya	1.798,	1,51
22	Kuningan	2.981,	2,50
23	Lebakwangi	1.945,	1,63
24	Luragung	4.290,	3,60
25	Maleber	5.735,	4,82
26	Mandirancan	3.205,	2,69
27	Nusaherang	1.803,	1,51
28	Pancalang	1.916,	1,61
29	Pesawahan	4.878,	4,10
30	Selajambe	3.586,	3,01
31	Sindangagung	1.281,	1,08
32	Subang	4.705,	3,95
Jumlah		**119.080,**	**100,00**

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Batas wilayah Kabupaten Kuningan dengan daerah sekitarnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebelah utara dengan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;
2. Sebelah timur dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;
3. Sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
4. Sebelah barat dengan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.

1. Topografi dan Morfologi

Topografi merupakan ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi serta objek lainnya, termasuk planet, satelit alami (seperti bulan), dan asteroid. Salah satu aspek utama dalam kajian topografi adalah elevasi atau ketinggian suatu daerah. Ketinggian wilayah dapat dikategorikan ke dalam beberapa rentang, yaitu 0 – 500 mdpl, 500 – 1.000 mdpl, 1.000 – 2.000 mdpl, 2.000 – 3.000 mdpl, dan lebih dari 3.000 mdpl. Luas wilayah berdasarkan tingkat ketinggian disajikan dalam Tabel 2.2, sedangkan persebarannya dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Luasan Wilayah berdasarkan Topografi

No	Ketinggian	Luas (ha)	Persentase
	< 500 meter	79.790,	67,01
	500-1.000 meter	32.011,	26,88
	1.000-2.000 meter	6.193,	5,20
	2.000-3.000 meter	1.077,	0,91
	> 3.000 meter	8,	0,01
Jumlah		**119.080,**	**100,00**

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Berdasarkan Tabel dan Gambar 2.2, dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Kuningan berada pada ketinggian 0 – 500 mdpl, mencakup 67,01% dari total area, yang tersebar di bagian tengah, timur, dan utara. Sementara itu, wilayah dengan ketinggian lebih dari 3.000 mdpl memiliki luas terkecil, yaitu sekitar 8,14 hektar, yang merupakan bagian dari puncak Gunung Ciremai.

Gambar 2.2 Peta Topografi

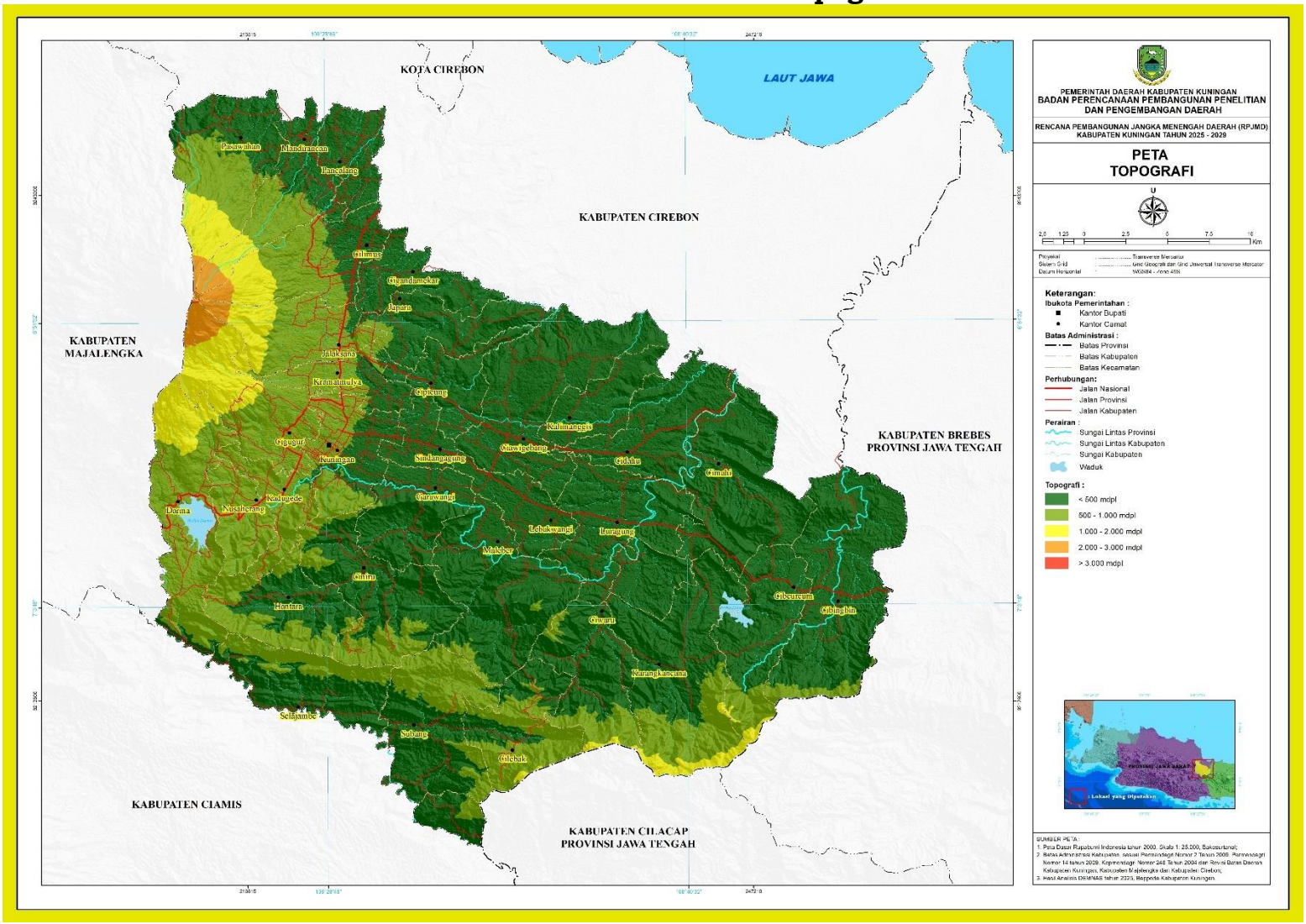

Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Kabupaten Kuningan memiliki beragam karakteristik morfologi. Di bagian barat, terdapat Gunung Ciremai dengan ketinggian mencapai 3.078 meter di atas permukaan laut sebagai ciri khasnya. Wilayah selatan didominasi oleh perbukitan, sedangkan wilayah timur memiliki kontur yang bervariasi dari bergelombang hingga berbukit. Bagian utara cenderung datar hingga bergelombang, sementara wilayah tengah memiliki morfologi yang relatif datar hingga landai. Luas wilayah berdasarkan karakteristik morfologi disajikan dalam Tabel 2.3, sedangkan persebarannya dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Luasan Wilayah berdasarkan Morfologi

No	Morfologi	Luas (ha)	Persentase
1.	Datar	11.474,	9,64
2.	Landai	56.938,	47,82
3.	Bergelombang	29.284,	24,59
4.	Berbukit	21.230,	17,83
5.	Bergunung	152,	0,13
Jumlah		**119.080,**	**100,00**

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Berdasarkan Tabel dan Gambar 2.3, wilayah Kabupaten Kuningan didominasi oleh morfologi landai dengan luas mencapai 56.938,71 hektar atau sekitar 47,82 persen dari total area. Sementara itu, wilayah dengan morfologi bergunung memiliki luas terkecil, yaitu hanya 152,42 hektar atau sekitar 0,13 persen.

Gambar 2.3 Peta Morfologi

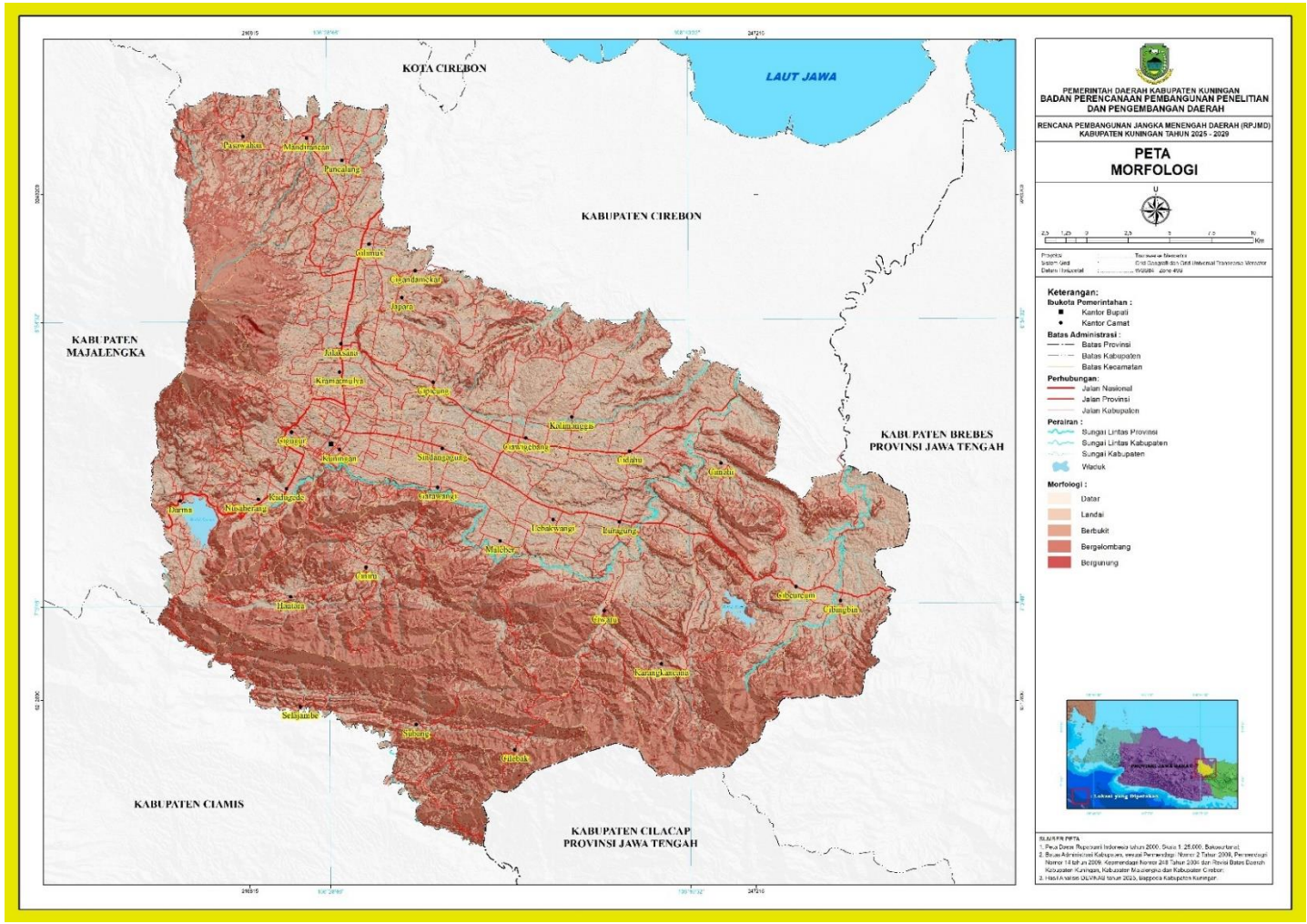

Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

2. Penutupan Lahan

Berdasarkan penutupan lahannya, luas total lahan bervegetasi di Kabupaten Kuningan mencapai 87.479,4 hektar, atau sekitar 73,48% dari total penggunaan lahan. Lahan ini mencakup hutan primer, hutan sekunder, hutan tanaman, belukar, perkebunan, serta lahan pertanian. Namun, jika lahan pertanian—baik pertanian lahan kering maupun pertanian lahan kering campur semak—dikeluarkan dari perhitungan, maka luas lahan bervegetasi murni tersisa 45.736,1 hektar, yang setara dengan 38,44% dari total lahan. Area ini terdiri dari hutan primer, hutan sekunder, hutan tanaman, belukar, dan perkebunan, yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, keanekaragaman hayati, serta fungsi hidrologis di wilayah Kabupaten Kuningan. Keberadaan lahan bervegetasi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat aktivitas pertanian , Kabupaten Kuningan masih memiliki kawasan hijau yang cukup luas untuk mendukung kelestarian lingkungan. Luasan wilayah berdasarkan ketinggian disajikan Tabel 2.4, sementara sebarannya dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4 Luasan Wilayah berdasarkan Penggunaan Lahan

No	Ketinggian	Luas (ha)
1	Badan Air	576,5
2	Belukar	1.020,8
3	Hutan Lahan Kering Primer	216,7
4	Hutan Lahan Kering Sekunder	12.327,5
5	Hutan Tanaman	29.429,6
6	Perkebunan	2.741,5
7	Permukiman	9.453,8
8	Pertanian Lahan Kering	13.987,3
9	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	27.756,0
10	Sawah	21.572,2

Sumber : Data Penutupan Lahan tahun 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel di atas menunjukkan bahwa lahan pertanian di Kabupaten Kuningan mencakup 41.743,3 hektar, atau sekitar 35,04% dari total penggunaan lahan. Lahan ini terdiri dari pertanian lahan kering seluas 13.987,3 hektar dan pertanian lahan kering campur semak yang mencapai 27.756,0 hektar.

Selain itu, terdapat sawah dengan luas 21.572,2 hektar, yang menunjukkan bahwa aktivitas pertanian di daerah ini cukup beragam, mencakup tanaman pangan, hortikultura, serta sistem pertanian lahan basah dan kering.

Gambar 2.4 Peta Penutupan Lahan

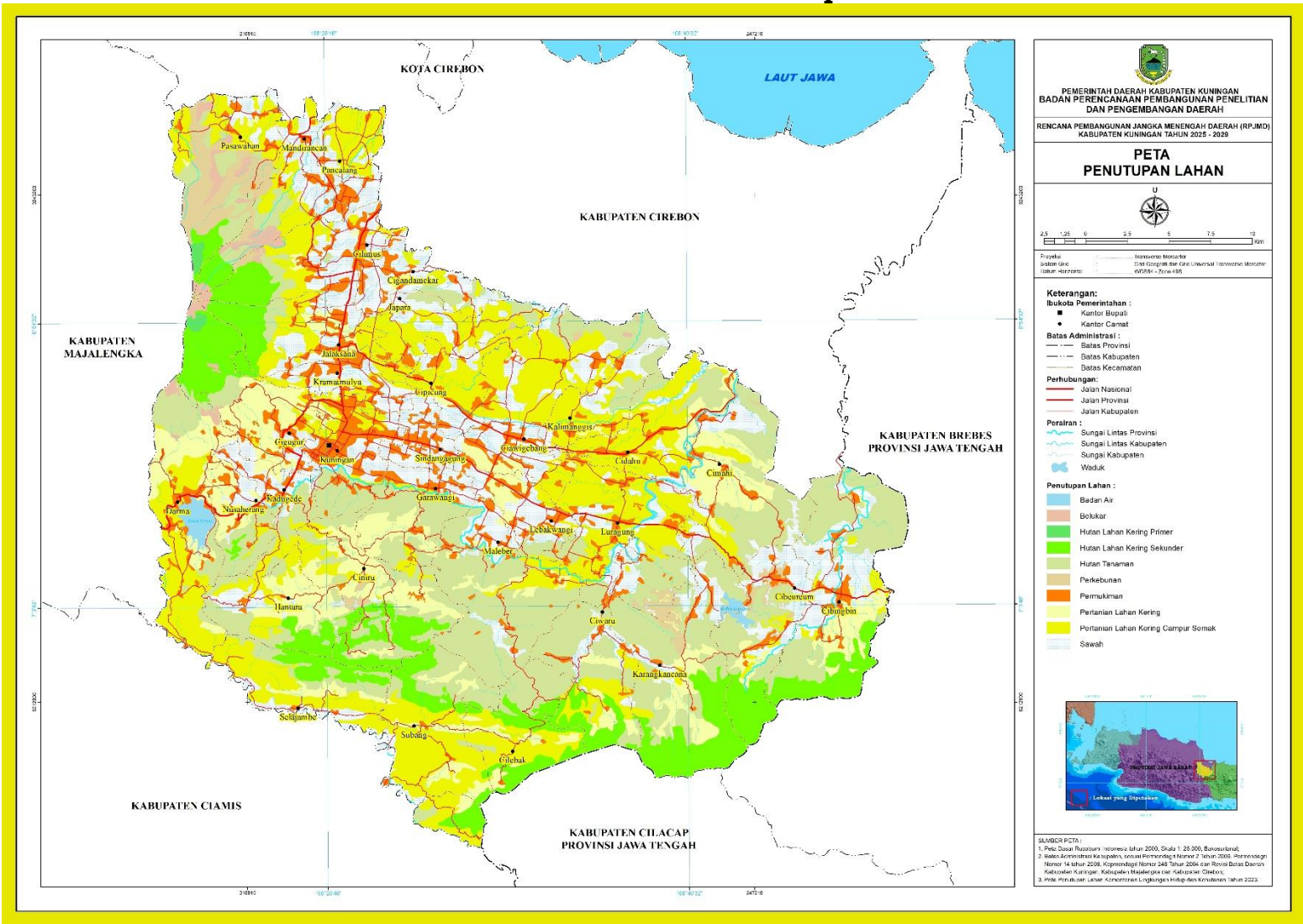

Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

3. Klimatologi

Kabupaten Kuningan memiliki iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2024, rata-rata suhu udara tahunan mencapai 28,1^{0}C atau naik 0,1^{0}C dari tahun 2023, suhu minimum rata-rata tahunan sebesar 24,7^{0}C atau naik 0,6^{0}C dari tahun 2023, sedangkan suhu maksimum rata-rata tahunan mencapai 33,2^{0}C atau turun 0,7^{0}C dari tahun 2023, dengan kelembaban rata-rata 77,75 persen atau turun 0,6 persen dari tahun 2023, dan kecepatan angin rata-rata 27,5 knot (Kuningan Dalam Angka tahun 2025).

Tabel 2.5 Luas Wilayah Berdasarkan Curah Hujan

No	Curah Hujan	Luas (ha)	Persentase
1	2000 - 2500 mm	18.254,	15,33
2	2500 - 3000 mm	70.310,	59,04
3	3000 - 3500 mm	27.779,	23,33
4	3500 - 4000 mm	2.736,	2,30
Jumlah		**119.080,**	**100,00**

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Berdasarkan Tabel dan Gambar 2.5, Wilayah Kabupaten Kuningan memiliki curah hujan antara 2.000 sampai dengan 4.000 mm/tahun di mana sebagian besar wilayahnya (58,91 persen) memiliki curah hujan antara 2.500-3.000 mm/tahun.

Gambar 2.5 Peta Curah Hujan

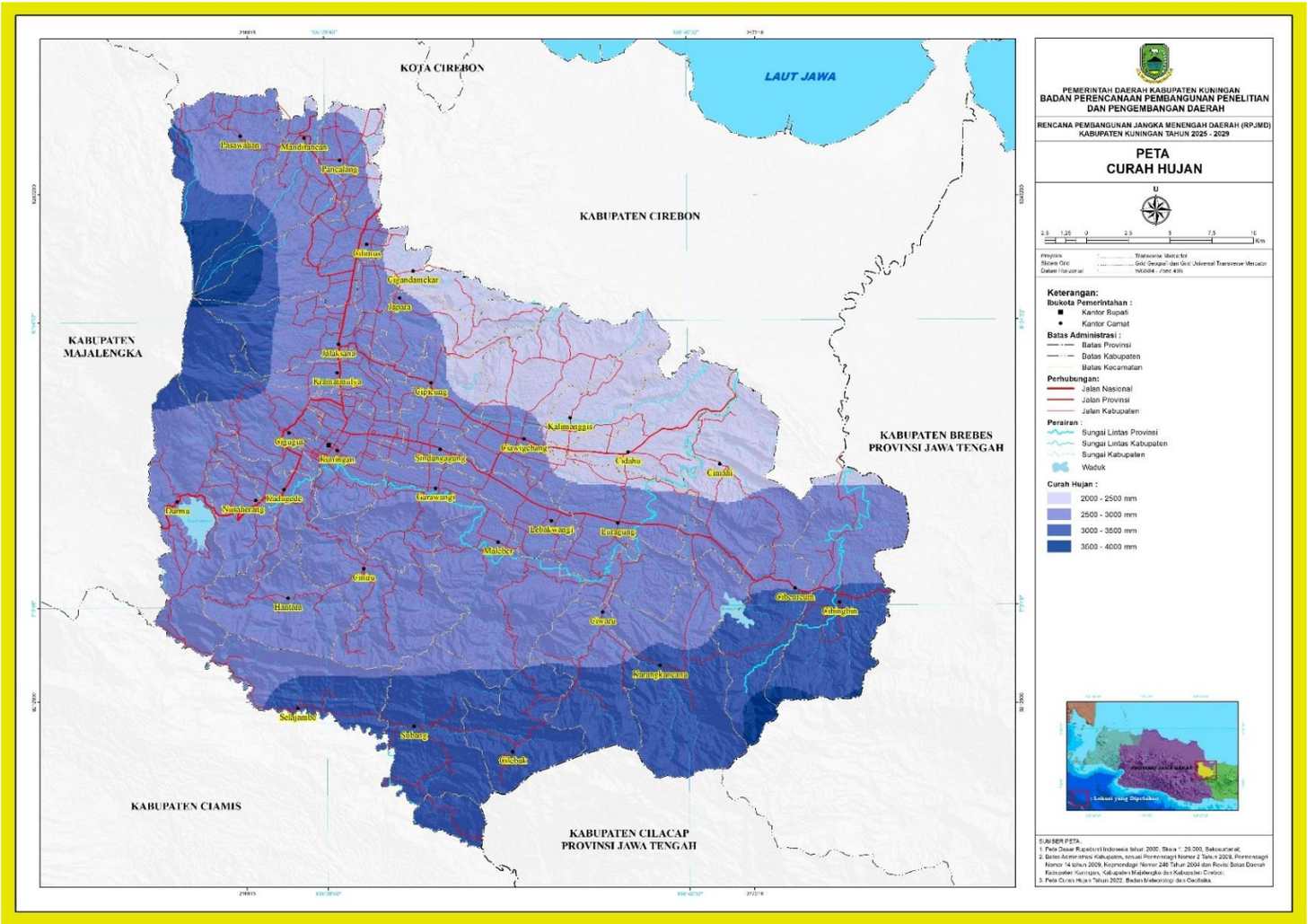

Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

4. Hidrologi

Dari segi hidrologi, Kabupaten Kuningan memiliki peran penting dalam pengelolaan tata air bagi wilayah di sekitarnya, seperti Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon di Jawa Barat, serta Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah. Hal ini disebabkan oleh posisinya sebagai hulu bagi dua Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yaitu DAS Cisanggarung dan DAS Citanduy. Selain itu, Kabupaten Kuningan juga memiliki dua waduk, yaitu Waduk Darma dan Waduk Kuningan, yang berkapasitas cukup besar untuk memasok air hingga ke Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Cilacap.

a. Cekungan Air Tanah (CAT)

Cekungan air tanah (CAT) adalah area yang memiliki sistem akuifer yang luas, memungkinkan air hujan meresap ke dalam tanah dan tersimpan dalam lapisan batuan di bawah permukaan. Keberadaan cadangan air tanah yang memadai memungkinkan masyarakat di wilayah ini untuk memperoleh air bersih dengan lebih mudah untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, dan lainnya, tanpa sepenuhnya bergantung pada sumber air permukaan seperti sungai atau waduk.

Salah satu peran penting keberadaan CAT yaitu mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Banyak lahan pertanian di daerah ini bergantung pada air tanah untuk keperluan irigasi, terutama di wilayah dengan pola curah hujan musiman. Dengan adanya CAT, petani dapat memanfaatkan sumur sebagai sumber air bagi lahan pertanian mereka sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Hal ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas pertanian, ketahanan pangan, serta mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan. Selain itu, di beberapa daerah, mata air yang bersumber dari CAT juga dimanfaatkan sebagai penyedia air minum alami bagi masyarakat, sering kali dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan air permukaan yang lebih rentan terhadap pencemaran.

Namun, berada dalam cekungan air tanah juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satu risiko utamanya adalah pemanfaatan air tanah secara berlebihan, yang dapat menyebabkan penurunan permukaan air tanah serta berdampak negatif pada lingkungan, seperti terjadinya amblesan tanah (subsidence). Jika tidak dikelola dengan baik, penggunaan air tanah yang tidak

terkendali dapat mengurangi ketersediaan air bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan air tanah yang bijaksana dan berkelanjutan agar manfaat dari CAT dapat dimaksimalkan tanpa mengganggu keseimbangan lingkungan.

Kabupaten Kuningan memiliki area cekungan air tanah (CAT) seluas sekitar 48.555,8 hektar (40,8 persen), yang mencakup CAT Kuningan, CAT Majalengka, dan CAT Cirebon-Sumber. Sementara itu, area non-CAT mencakup 70.524,8 hektar (59,2 persen). Luas wilayah CAT di Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Luas Wilayah Berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT)

No	CAT	Luas (ha)
1	CAT-Kuningan	35.752
2	CAT-Majalengka	115
3	CAT-Cirebon-Sumber	12.687
Jumlah		**48.555,**

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Secara umum, cekungan air tanah terletak di bagian barat Kabupaten Kuningan, sedangkan area non-CAT tersebar di wilayah selatan, timur, hingga sebagian utara dengan pola menyerupai huruf U. Area non-CAT memiliki keterbatasan dalam ketersediaan dan pengelolaan sumber daya air tanah karena tidak adanya akuifer yang luas dan produktif untuk menyimpan serta mengalirkan air dalam jumlah memadai. Akibatnya, masyarakat di wilayah tersebut harus mengandalkan sumber air permukaan atau membangun sistem penyimpanan air yang lebih kompleks.

Gambar 2.6 Cekungan Air Tanah

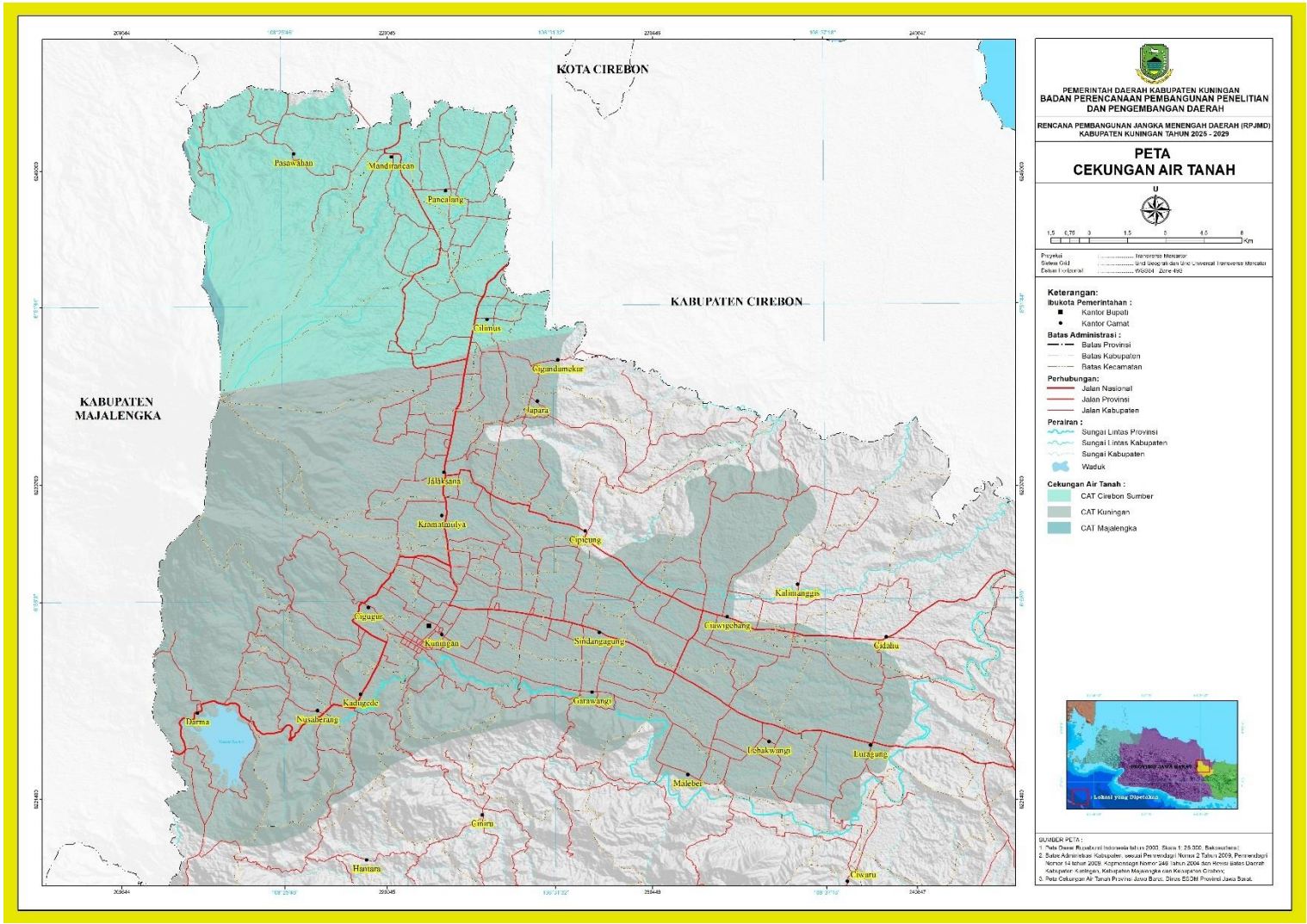

Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Salah satu dampak utama dari kondisi ini adalah kerentanan terhadap kekeringan. Karena wilayah tersebut tidak memiliki cadangan air tanah yang memadai, pasokan air bisa sangat bergantung pada curah hujan dan sumber air permukaan seperti sungai, danau, atau waduk. Ketika musim kemarau tiba, kawasan ini lebih rentan mengalami krisis air, yang dapat berdampak buruk pada sektor pertanian, industri, dan kebutuhan domestik masyarakat. Hal ini juga dapat meningkatkan ketergantungan pada air yang disuplai dari daerah lain, yang berpotensi menyebabkan konflik sumber daya air antarwilayah.

Selain itu, kawasan yang tidak berada dalam CAT juga lebih rentan terhadap penurunan kualitas tanah dan lingkungan. Tanpa adanya akuifer yang mampu menyimpan air dengan baik, tanah di daerah tersebut mungkin memiliki daya serap air yang rendah. Akibatnya, saat hujan turun, air lebih cepat mengalir di permukaan daripada meresap ke dalam tanah, sehingga meningkatkan risiko erosi dan banjir. Di sisi lain, kurangnya cadangan air tanah juga dapat menghambat pertumbuhan vegetasi alami, yang pada akhirnya mempengaruhi keseimbangan ekosistem.

Dari aspek ekonomi, keterbatasan air tanah dapat menyebabkan biaya tinggi dalam penyediaan air. Pengeboran sumur dalam mungkin tidak efektif karena tidak ada akuifer besar yang bisa dimanfaatkan, sehingga masyarakat harus mengandalkan pasokan air dari luar atau membangun infrastruktur tambahan seperti waduk atau sistem pemanenan air hujan. Hal ini tentu membutuhkan investasi besar, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, untuk memastikan ketersediaan air yang memadai bagi penduduk dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

Secara keseluruhan, tidak berada dalam cekungan air tanah dapat menyebabkan berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya air. Oleh karena itu, wilayah semacam ini perlu mengembangkan strategi yang lebih adaptif, seperti pemanfaatan teknologi penyimpanan air, efisiensi penggunaan air, serta pelestarian lingkungan untuk memastikan ketersediaan air yang berkelanjutan bagi masa depan.

b. Sebaran Mata Air

Berdasarkan Berita Acara Koordinasi dan Sinkronisasi Data Sistem Jaringan Sumberdaya Air dengan Dinas PUPR Bidang Sumberdaya Air Nomor

600/38/ILH tanggal 31 Januari 2018, di Kabupaten Kuningan terdapat 735 mata air yang sudah terdata. Kecamatan Ciawigebang memiliki jumlah mata air terbanyak dengan 81 sumber mata air, diikuti oleh Cidahu (52) dan Cigandamekar (46). Sebaliknya, Kecamatan Lebakwangi dan Maleber memiliki jumlah mata air paling sedikit, masing-masing hanya 2 sumber mata air. Jika dilihat dari lokasi koordinatnya, terdapat kemungkinan beberapa mata air yang saling terhubung atau berasal dari sumber akuifer yang sama seperti di Kecamatan Ciawigebang, Kecamatan Subang, Kecamatan Cibingbin, Kecamatan Kadugede, dan Kecamatan Darma. Sebaran jumlah mata air menurut kecamatan sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2.7 Sebaran Jumlah Mata Air Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Mata Air
	Ciawigebang	81
	Cidahu	52
	Cigandamekar	46
	Japara	32
	Hantara	31
	Pesawahan	31
	Cigugur	28
	Subang	27
	Nusaherang	27
1	Cipicung	26
1	Darma	26
1	Cimahi	25
1	Kadugede	24
1	Cibingbin	24
1	Kalimanggis	24
1	Sindangagung	23

No	Kecamatan	Jumlah Mata Air
1	Selajambe	23
1	Ciwaru	19
1	Kuningan	18
2	Cilimus	17
2	Pancalang	16
2	Jalaksana	15
2	Garawangi	15
2	Mandirancan	14
2	Kramatmulya	12
2	Cilebak	12
2	Cibeureum	12
2	Luragung	12
2	Ciniru	10
3	Karangkancana	9
3	Lebakwangi	2
3	Maleber	2

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Kuningan

Gambar 2.7 Sebaran Mata Air

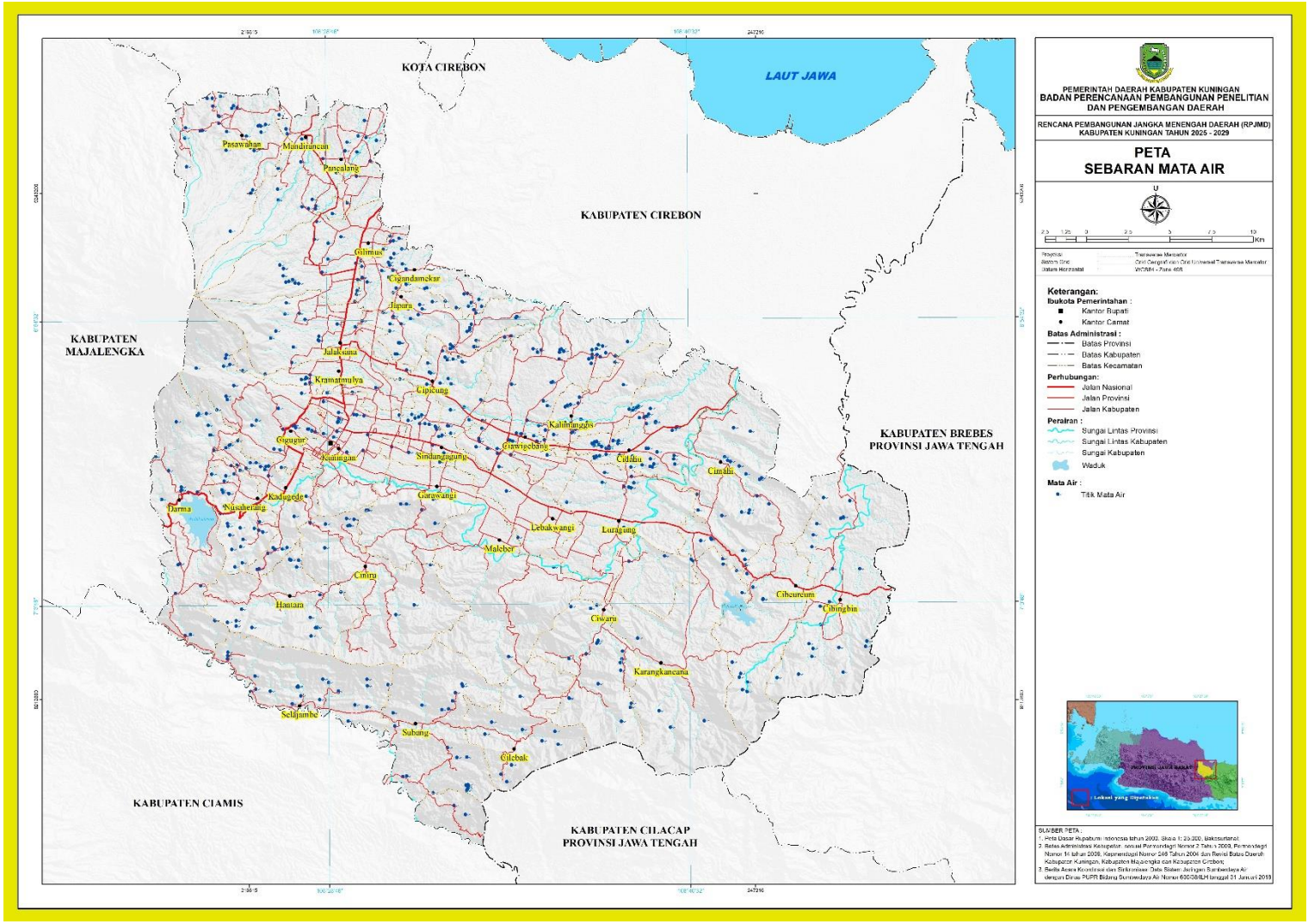

Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

c. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Wilayah Kabupaten Kuningan menjadi hulu bagi Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung di utara dan Wilayah Sungai Citanduy di selatan. Wilayah Sungai tersebut mencakup sekitar 10 (sepuluh) Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah berikut.

Tabel 2.8 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Kuningan

No	DAS	Luas (Ha)	Cakupan Kecamatan
	DAS Cisanggarung	76.558,3	Cibingbin, Cibeureum, Cidahu, Ciawigebang, Cipicung, Jalaksana, Japara, Kadugede, Kalimanggis, Kramatmulya Lebakwangi, Luragung, Mandirancan, Nusaherang, Pancalang, Pasawahan, Sindangagung, Subang
	DAS Cijolang	11.588,0	Cibingbin, Cibeureum, Karangkancana, Luragung, Maleber, Nusaherang, Subang
	DAS Cikalapu	8.373,9	Ciniru, Darma, Hantara, Kadugede, Lebakwangi, Selajambe
	DAS Ciberes	5.319,6	Cigandamekar, Cilebak, Cimahi, Kalimanggis, Maleber, Pancalang
	DAS Kalibangk	4.522,3	Ciawigebang, Cidahu, Cibingbin, Cibeureum, Jalaksana
	DAS Cipager	4.298,0	Cilimus, Mandirancan, Pancalang
	DAS Grenjeng	2.441,4	Cilebak, Cimahi, Hantara, Karangkancana
	DAS Karanganyar	1.825,2	Cibingbin, Cibeureum
	DAS Jatiroke	1.772,3	Ciawigebang, Cidahu, Cipicung
1	DAS Kenari	1.585,8	Cibeureum, Cidahu, Ciawigebang

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

DAS Cisanggarung merupakan DAS terbesar dengan luas 76.558,36 hektar, mencakup 18 kecamatan. DAS ini memiliki peran penting dalam sistem hidrologi wilayah, berkontribusi terhadap pasokan air dan pengelolaan sumber daya air di daerah yang luas. Di urutan kedua, DAS Cijolang memiliki luas 11.588,05 hektar, mencakup 7 kecamatan, yang menunjukkan bahwa meskipun lebih kecil, DAS ini tetap memiliki cakupan wilayah yang cukup luas.

DAS dengan cakupan sedang antara 4.000 hingga 8.000 hektar, seperti DAS Cikalapu (8.373,99 ha), DAS Ciberes (5.319,68 ha), dan DAS Kalibangka (4.522,39 ha), tersebar di berbagai kecamatan dengan pengaruh yang cukup besar terhadap aliran air di wilayahnya masing-masing. DAS yang lebih kecil seperti DAS Karanganyar (1.825,23 ha), DAS Jatiroke (1.772,30 ha), dan DAS Kenari (1.585,88 ha) memiliki cakupan yang lebih terbatas, namun tetap berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem air dan pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat.

Gambar 2.8 Daerah Aliran Sungai

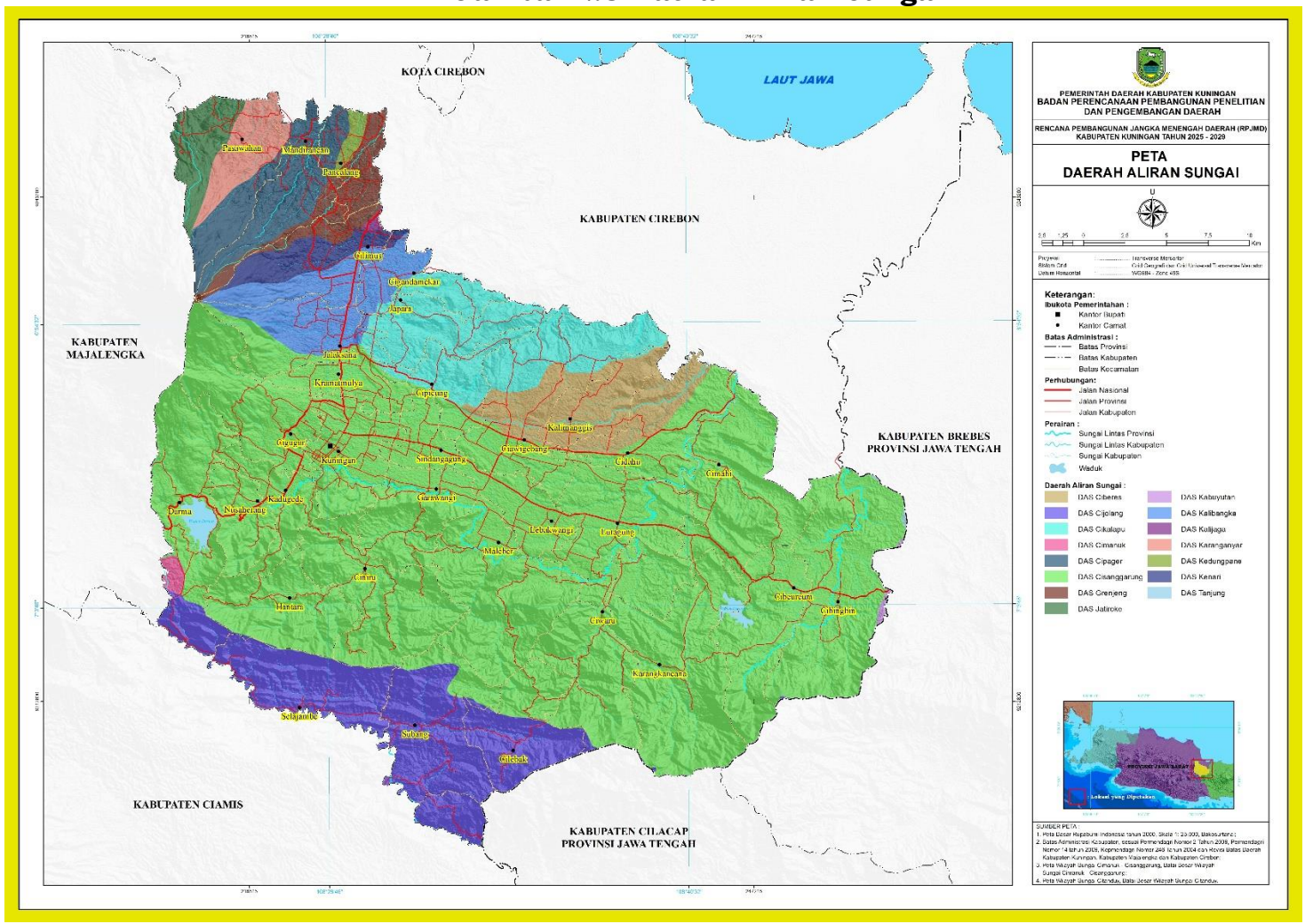

Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

5. Daya Dukung Air

Daya dukung air adalah kapasitas maksimum sumber daya air di suatu wilayah untuk mendukung kebutuhan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan tanpa menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas sumber daya tersebut. Daya dukung air mencerminkan keseimbangan antara ketersediaan air (air tanah dan air permukaan) dengan kebutuhan konsumsi, termasuk untuk rumah tangga, pertanian, industri, dan ekosistem.

Jika pemanfaatan air melampaui daya dukungnya, maka dapat terjadi berbagai masalah seperti kekeringan, penurunan muka air tanah, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan air yang bijak sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan sumber daya air.

Data Daya Dukung Air mengacu pada hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029. Adapun kecamatan dengan status daya dukung air telah melampaui tertinggi adalah Kecamatan Cilimus sebesar 1.862,30 Ha dan Kecamatan Cigandamekar sebesar 1.625,52 Ha, yang dipengaruhi oleh luas wilayah kecamatan yang besar dan merupakan wilayah perkotaan yang tutupan lahannya didominasi oleh lahan terbangun.

Di sisi lain, beberapa kecamatan seperti Cidahu, Cilebak, Cimahi, Ciniru, Darma, dan Hantara tidak mengalami kelebihan eksploitasi, dengan angka melampaui daya dukung sebesar 0%. Ini menunjukkan bahwa penggunaan air tanah di wilayah tersebut masih dalam batas yang aman. Kecamatan lainnya memiliki tingkat penggunaan air yang melampaui daya dukungnya dengan persentase yang bervariasi, seperti Japara (42,82%), Mandirancan (38,57%), dan Sindangagung (20,78%). Sementara itu, kecamatan dengan kelebihan pemakaian yang lebih moderat adalah Kuningan (6,99%), Lebakwangi (14,48%), dan Pasawahan (12,17%). Luasan Daya Dukung Air per Kecamatan sebagaimana diperlihatkan tabel berikut.

Tabel 2.9 Luas Daya Dukung Air per Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
	CIAWIGEBANG	**6.035,1**
	Belum Melampaui	4.917,6
	Melampaui	1.117,5
	CIBEUREUM	**3.868,3**
	Belum Melampaui	3.450,7
	Melampaui	417,6
	CIBINGBIN	**6.403,2**
	Belum Melampaui	5.715,4
	Melampaui	687,8
	CIDAHU	**3.701,6**
	Belum Melampaui	3.701,6
	CIGANDAMEKAR	**2.240,3**
	Belum Melampaui	614,8
	Melampaui	1.625,5
	CIGUGUR	**3.524,9**
	Belum Melampaui	3.450,3
	Melampaui	74,
	CILEBAK	**4.143,5**
	Belum Melampaui	4.143,5
	CILIMUS	**3.525,7**
	Belum Melampaui	1.663,4
	Melampaui	1.862,3
	CIMAHI	**5.834,1**
	Belum Melampaui	5.834,1
1	**CINIRU**	**4.971,1**
	Belum Melampaui	4.971,1
1	**CIPICUNG**	**1.900,1**
	Belum Melampaui	1.510,4
	Melampaui	389,7
1	**CIWARU**	**5.174,9**
	Belum Melampaui	5.112,1
	Melampaui	62,7
1	**DARMA**	**5.442,9**
	Belum Melampaui	5.442,9
14	**GARAWANGI**	**2.981,4**
	Belum Melampaui	2.836,2
	Melampaui	145,1
15	**HANTARA**	**3.533,3**
	Belum Melampaui	3.533,3
16	**JALAKSANA**	**3.916,0**
	Belum Melampaui	3.625,9
	Melampaui	290,
17	**JAPARA**	**2.704,7**
	Belum Melampaui	1.546,6

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1	**KADUGEDE**	**1.808,4**
	Belum Melampaui	1.700,5
	Melampaui	107,9
1	**KALIMANGGIS**	**2.015,9**
	Belum Melampaui	1.926,7
	Melampaui	89,2
2	**KARANGKANCANA**	**6.410,5**
	Belum Melampaui	6.351,4
	Melampaui	59,0
2	**KRAMATMULYA**	**1.685,4**
	Belum Melampaui	1.521,7
	Melampaui	163,7
2	**KUNINGAN**	**2.990,9**
	Belum Melampaui	2.781,7
	Melampaui	209,1
2	**LEBAKWANGI**	**1.967,8**
	Belum Melampaui	1.682,8
	Melampaui	284,9
2	**LURAGUNG**	**4.070,1**
	Belum Melampaui	4.021,6
	Melampaui	48,5
2	**MALEBER**	**5.730,5**
	Belum Melampaui	5.697,0
	Melampaui	33,5
2	**MANDIRANCAN**	**3.495,9**
	Belum Melampaui	2.147,5
	Melampaui	1.348,4
2	**NUSAHERANG**	**1.807,2**
	Belum Melampaui	1.735,2
	Melampaui	72,0
2	**PANCALANG**	**1.917,8**
	Belum Melampaui	900,7
	Melampaui	1.017,0
2	**PASAWAHAN**	**4.921,6**
	Belum Melampaui	4.322,6
	Melampaui	599,0
3	**SELAJAMBE**	**3.657,4**
	Belum Melampaui	3.251,8
	Melampaui	405,6
3	**SINDANGAGUNG**	**1.299,5**
	Belum Melampaui	1.029,5
	Melampaui	27
3	**SUBANG**	**4.744,0**
	Belum Melampaui	4.656,1

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
	Melampaui	1.158,1

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
	Melampaui	87,8

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029

Secara keseluruhan, data di atas mengindikasikan bahwa beberapa kecamatan menghadapi tekanan air tanah yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan air yang lebih efektif, seperti peningkatan efisiensi penggunaan air, pengembangan sistem penyimpanan air, dan kebijakan konservasi yang lebih ketat untuk memastikan ketersediaan air tanah yang berkelanjutan di masa mendatang.

Gambar 2.9 Peta Daya Dukung Air

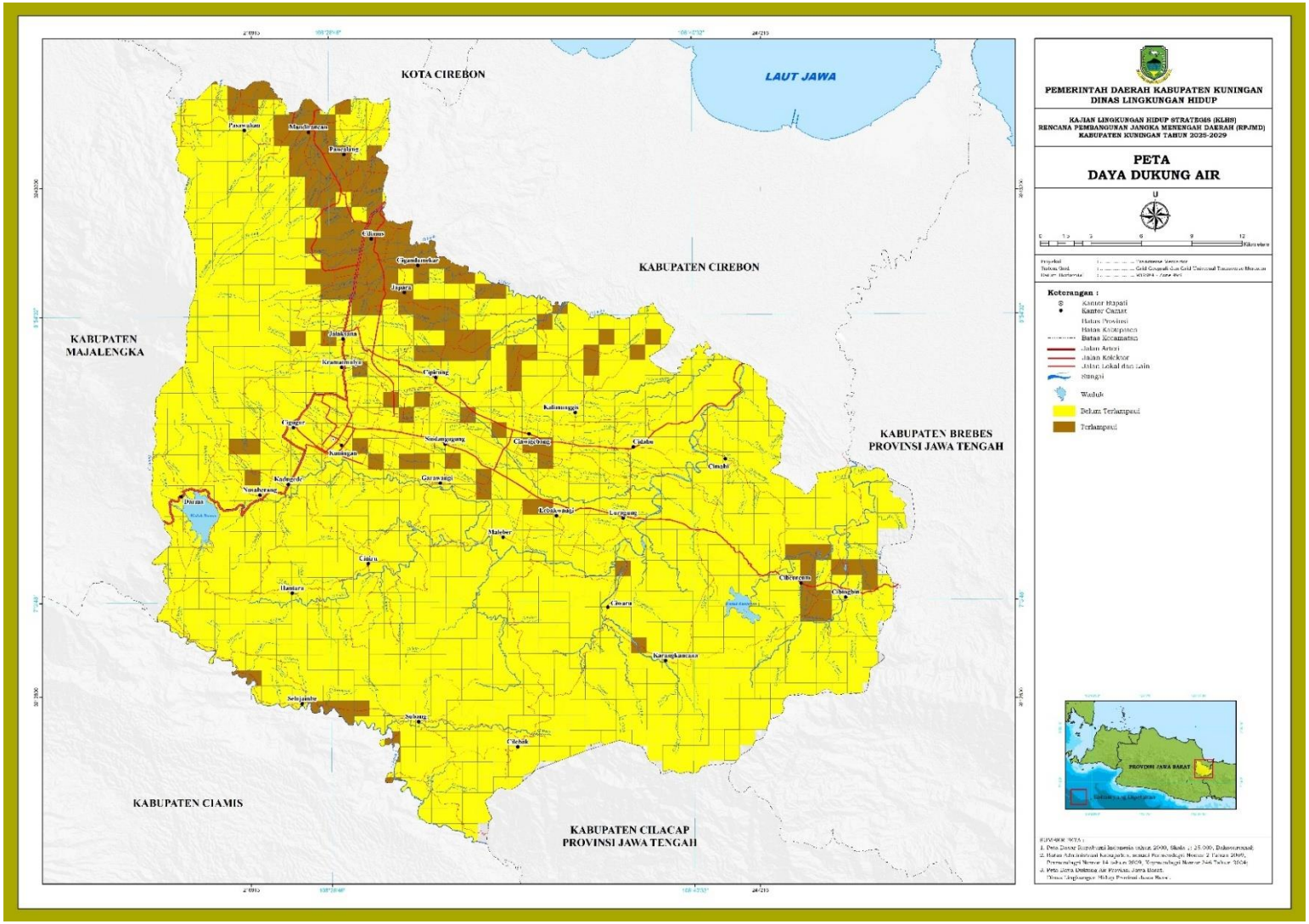

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029

6. Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan adalah kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan pangan yang cukup bagi penduduknya secara berkelanjutan. Daya dukung ini bergantung pada berbagai faktor, seperti luas lahan pertanian, produktivitas pertanian, ketersediaan air, teknologi pertanian, serta kebijakan pangan dan distribusi.

Jika daya dukung pangan suatu daerah melebihi kebutuhan penduduknya, maka wilayah tersebut mampu mandiri dalam penyediaan pangan. Sebaliknya, jika daya dukungnya lebih kecil dari kebutuhan, maka daerah tersebut harus mengimpor atau mendapatkan pasokan pangan dari wilayah lain. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik terhadap sumber daya alam, penggunaan teknologi pertanian, serta kebijakan distribusi pangan sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan suatu daerah.

Berdasarkan data KLHS RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029, terdapat 2 (dua) kecamatan yang tidak memiliki wilayah dengan status daya dukung telah melampaui, yaitu Kecamatan Selajambe dan Kecamatan Subang, yang berarti kedua kecamatan tersebut masih memiliki daya dukung pangan yang baik. Adapun kecamatan dengan status daya dukung pangan telah melampaui tertinggi adalah Kecamatan Cimahi sebesar 2.225,44 Ha dan Kecamatan Cibingbin sebesar 1.661,44 Ha, yang dipengaruhi oleh luas wilayah kecamatan yang besar. Namun apabila dianalisis berdasarkan persentasenya, maka Kecamatan Kuningan sebesar 62,42% dan Kecamatan Kramatmulya sebesar 56,92%, dimana kedua kecamatan tersebut merupakan wilayah perkotaan yang tutupan lahannya didominasi oleh lahan terbangun. Luas Daya Dukung Pangan per Kecamatan sebagaimana diperlihatkan tabel di bawah ini:

Tabel 2.10 Luas Daya Dukung Pangan per Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1	**CIAWIGEBANG**	**6.035,19**	17	**JAPARA**	**2.704,77**
	Belum Melampaui	5.047,91		Belum Melampaui	2.012,98
	Telah Melampaui	987,28		Telah Melampaui	691,79
2	**CIBEUREUM**	**3.916,73**	18	**KADUGEDE**	**1.808,45**
	Belum Melampaui	2.918,74		Belum Melampaui	1.343,16
	Telah Melampaui	998,00		Telah Melampaui	465,29
3	**CIBINGBIN**	**6.967,64**	19	**KALIMANGGIS**	**2.015,93**

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
	Belum Melampaui	5.305,74
	Telah Melampaui	1.661,90
4	**CIDAHU**	**3.701,61**
	Belum Melampaui	3.585,16
	Telah Melampaui	116,44
5	**CIGANDAMEKAR**	**2.240,35**
	Belum Melampaui	1.344,26
	Telah Melampaui	896,09
6	**CIGUGUR**	**3.524,98**
	Belum Melampaui	2.674,26
	Telah Melampaui	850,72
7	**CILEBAK**	**4.263,13**
	Belum Melampaui	3.856,94
	Telah Melampaui	406,19
8	**CILIMUS**	**3.525,75**
	Belum Melampaui	2.444,12
	Telah Melampaui	1.081,63
9	**CIMAHI**	**5.834,15**
	Belum Melampaui	3.608,72
	Telah Melampaui	2.225,44
10	**CINIRU**	**4.971,12**
	Belum Melampaui	4.560,54
	Telah Melampaui	410,58
11	**CIPICUNG**	**1.900,16**
	Belum Melampaui	1.226,62
	Telah Melampaui	673,54
12	**CIWARU**	**5.193,00**
	Belum Melampaui	4.179,55
	Telah Melampaui	1.013,45
13	**DARMA**	**5.442,98**
	Belum Melampaui	4.169,25
	Telah Melampaui	1.273,73
14	**GARAWANGI**	**2.981,44**
	Belum Melampaui	1.978,89
	Telah Melampaui	1.002,56
15	**HANTARA**	**3.533,30**
	Belum Melampaui	3.338,17
	Telah Melampaui	195,13
16	**JALAKSANA**	**3.916,06**
	Belum Melampaui	2.573,02
	Telah Melampaui	1.343,04
	Belum Melampaui	1.517,38
	Telah Melampaui	498,54
20	**KARANGKANCANA**	**6.524,07**
	Belum Melampaui	5.396,54
	Telah Melampaui	1.127,53
21	**KRAMATMULYA**	**1.685,43**
	Belum Melampaui	726,12
	Telah Melampaui	959,31
22	**KUNINGAN**	**2.990,94**
	Belum Melampaui	1.123,91
	Telah Melampaui	1.867,03
23	**LEBAKWANGI**	**1.967,80**
	Belum Melampaui	1.224,68
	Telah Melampaui	743,12
24	**LURAGUNG**	**4.070,16**
	Belum Melampaui	2.728,23
	Telah Melampaui	1.341,93
25	**MALEBER**	**5.730,58**
	Belum Melampaui	5.277,90
	Telah Melampaui	452,68
26	**MANDIRANCAN**	**3.495,96**
	Belum Melampaui	3.077,73
	Telah Melampaui	418,22
27	**NUSAHERANG**	**1.807,29**
	Belum Melampaui	1.018,22
	Telah Melampaui	789,07
28	**PANCALANG**	**1.917,83**
	Belum Melampaui	1.620,75
	Telah Melampaui	297,09
29	**PASAWAHAN**	**4.921,65**
	Belum Melampaui	4.401,45
	Telah Melampaui	520,20
30	**SELAJAMBE**	**3.657,44**
	Belum Melampaui	3.657,44
31	**SINDANGAGUNG**	**1.299,56**
	Belum Melampaui	746,04
	Telah Melampaui	553,52
32	**SUBANG**	**4.744,19**
	Belum Melampaui	4.744,19

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2025-2029

Secara keseluruhan, Kabupaten Kuningan perlu merancang strategi berbasis tata ruang dan pengelolaan lahan untuk mengatasi ketimpangan daya

dukung pangan ini. Kecamatan-kecamatan yang masih dalam kondisi baik perlu diarahkan untuk mempertahankan produktivitasnya, sementara kecamatan yang sudah mengalami tekanan perlu diintervensi dengan kebijakan yang tepat. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain optimalisasi lahan pertanian dengan teknologi ramah lingkungan, konservasi lahan, serta pengembangan sistem pertanian yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Gambar 2.10 Peta Daya Dukung Pangan

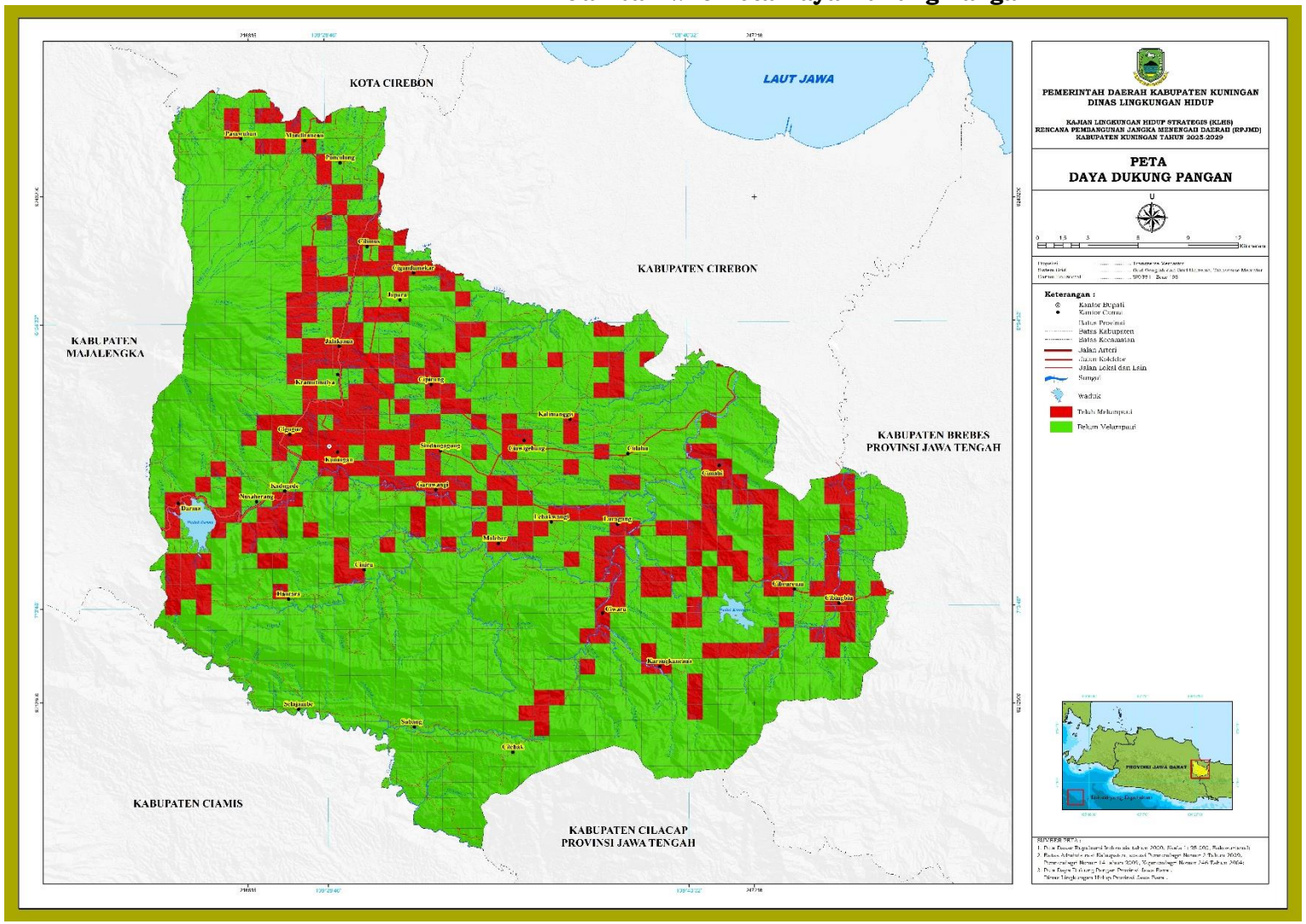

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, 2025

7. Potensi Wilayah

Kabupaten Kuningan merupakan wilayah yang memiliki potensi besar dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata dan sumberdaya air. Hal tersebut sangat ditunjang oleh faktor demografi, iklim serta tingkat kesuburan tanah dan ketersediaan air yang berlimpah. Berikut dijelaskan beberapa sektor yang menjadi potensi di Kabupaten Kuningan:

a. Kehutanan

Kehutanan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Kehutanan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang bersangkut-paut dengan pengelolaan ekosistem hutan dan pengurusannya, sehingga ekosistem tersebut mampu memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa.[1]

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk menjadi kawasan hutan tetap. Dengan merujuk kepada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 2003/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2016; SK.3684/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Ciremai dan Berita Acara Rapat dengan BTNGC tanggal 15 Desember 2017; SK Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : SK.35/IV-SET/2015 tentang Penataan Blok Taman Wisata Alam Linggarjati Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat; Berita Acara Rapat Teknis Revisi RTRW Kabupaten Kuningan Persamaan Persepsi Seluruh Sektor dengan Balai Pengelolaan Hutan Wilayah V Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Hutan Kota; Surat Keputusan Bupati Kuningan

[1] Arief, Arifin. 2011. *Hutan dan Kehutanan.* Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Nomor 660.1/KPTS.503.BPLHD/2012 tentang Penetapan Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Kabupaten Kuningan; dan Hasil Analisis SIG Tahun 2021, Bappeda Kabupaten Kuningan, diperoleh luasan hutan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.11 Luas Hutan Berdasarkan Fungsinya

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Produksi	25.066,8
2	Taman Nasional	8.837,0
3	Taman Wisata Alam	8,9
4	Hutan Hak/Hutan Rakyat	18.418,7
5	Hutan Kota	71,5
6	Taman Keanekaragaman Hayati	4,3

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025
Hasil Analisis dari Pemangku Kepentingan Terkait

Tabel di atas tidak terbatas pada kawasan hutan yang dimiliki negara, akan tetapi terdapat juga hutan yang menjadi kewenangan daerah seperti hutan kota dan Taman Kehati yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berbagai hasil hutan yang diproduksi hutan produksi dan hutan hak/hutan rakyat antara lain kayu jati, kayu bakar jati, kayu rimba, kayu bakar rimba, dan produk lainnya seperti getah pinus, minyak kayu putih, daun kayu putih (Kuningan dalam Angka Tahun 2025).

b. Perkebunan

Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan kering dengan menanam komoditas tertentu. Fungsi perkebunan menurut Undang-Undang Perkebunan mencakup tiga hal, pertama, fungsi secara ekonomi yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Kedua, fungsi ekologi yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung. Ketiga, fungsi sosial budidaya yaitu sebagai pemersatu kesatuan bangsa. Luas areal tanaman perkebunan menurut jenis tanaman dan produksi sebagaimana ditampilkan Tabel bawah ini.

Tabel 2.12 Luas Areal Tanaman Perkebunan menurut Jenis Tanaman dan Produksi Tahun 2020-2024

No	Tahun	Kelapa		Kopi	
		Luas (Ha)	Ton	Luas (Ha)	Ton
1	2020	5.487,05	5.769,63	1.729,86	1.005,52
2	2021	5.798,46	3.967,28	1.725,11	323,7
3	2022	4.570,29	3.035,77	1.566,49	327,55
4	2023	4.146,50	3.178,36	1.572,32	496,88
5	2024	3.994,94	4.017,94	1.537,36	726,03

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan, 2025

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, luas lahan dan produksi kelapa serta kopi mengalami fluktuasi. Pada komoditas kelapa, luas lahan awalnya meningkat dari 5.487,05 hektar pada 2020 menjadi 5.798,46 hektar pada 2021, tetapi kemudian mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai 3.994,94 hektar pada 2024. Produksi kelapa juga menunjukkan tren yang tidak stabil, dengan puncak produksi terjadi pada 2020 sebesar 5.769,63 ton, namun turun drastis menjadi 3.035,77 ton pada 2022 sebelum kembali meningkat menjadi 4.017,94 ton di 2024.

Sementara itu, luas lahan kopi relatif stabil dengan sedikit variasi, berada di kisaran 1.537,56 hingga 1.729,86 hektar. Namun, produksi kopi mengalami penurunan tajam dari 1.005,52 ton pada 2020 menjadi 323,7 ton pada 2021, sebelum perlahan meningkat kembali hingga mencapai 726,03 ton pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan adanya faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas, seperti perubahan kondisi cuaca, teknik budidaya, atau minat petani dalam menanam komoditas perkebunan.

c. Tanaman Pangan

Pertanian dalam pengertian yang luas yaitu kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakkan tumbuhan dan atau hewan tersebut[2]. Luasan lahan sawah dilindungi (LSD) memiliki luas sekitar 27.415 hektar. Lahan tersebut dimanfaatkan oleh petani terutama untuk menanam padi, jagung kedelai, kacang tanah dan sebagainya.

[2] Aartsen, J. V., 1953. *Ekonomi pertanian Indonesia.* Jakarta: Pembangunan.

Adapun kuantitas produksi tanaman pangan dan Tanaman Palawija yang sudah terdata sebagaimana di tabel bawah ini.

Tabel 2.13 Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Palawija Tahun 2020-2024

No	Tanaman Pangan	Produksi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi	356.216	370.280	366.160	297.548	352.511
2	Jagung	1.690	1.544	1.829	1.750	3.035
3	Kedelai	650	222	859	479	229
4	Kacang Tanah	625	260	186	123	114
5	Kacang Hijau	156	55	84	5	12
6	Ubi Kayu	497	129	23	367	472
7	Ubi Jalar	4.561	1.177	1.148	1.530	4.751

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan

Dalam periode 2020 hingga 2024, produksi tanaman pangan dan palawija di Kabupaten Kuningan menunjukkan adanya fluktuasi. Produksi padi mengalami kenaikan dari 356.216 ton pada 2020 hingga mencapai puncaknya di 2022 sebesar 366.160 ton, sebelum turun drastis menjadi 297.548 ton pada 2023, lalu kembali meningkat menjadi 352.511 ton pada 2024. Produksi jagung juga mengalami variasi, dengan peningkatan signifikan dari 1.690 ton pada 2020 menjadi 3.001 ton di 2022, meskipun sempat menurun di 2023, kemudian naik lagi pada 2024.

Komoditas kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau mengalami tren penurunan produksi secara umum, dengan kedelai mencapai produksi tertinggi di 2022 sebesar 859 ton, namun turun drastis pada 2024 menjadi hanya 229 ton. Hal serupa terjadi pada kacang tanah dan kacang hijau, di mana produksinya terus menurun, bahkan kacang hijau hanya mencapai produksi 12 ton pada 2024. Sementara itu, ubi kayu dan ubi jalar menunjukkan pola produksi yang berfluktuasi, dengan ubi kayu mengalami penurunan drastis di 2022 sebelum kembali naik pada 2024, dan ubi jalar sempat mengalami penurunan tajam di 2021-2023 sebelum meningkat pesat ke angka 4.751 ton pada 2024.

d. Peternakan

Peternakan merupakan kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut, sehingga tujuan dari peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor pemeliharaan hewan ternak yang telah dikombinasikan secara optimal. Terdapat berbagai jenis komoditas ternak di Kabupaten Kuningan sebagaimana diperlihatkan Tabel di bawah ini.

Tabel 2.14 Jumlah Komoditas Ternak Tahun 2020-2024

No	Komoditas Ternak	Jumlah (Ekor)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ternak Besar					
	a. Sapi Potong	29.533	29.972	30.631	28.240	30.712
	b. Sapi Perah	7.737	7.945	7.278	6.582	7.303
	c. Kerbau	4.543	4.609	4.674	4.904	4.929
	d. Kuda	356	365	365	379	382
2	Ternak Kecil					
	a. Domba	125.652	130.114	136.620	123.757	137.015
	b. Kambing	7.489	7.603	7.950	9.099	9.086
	c. Kelinci	7.959	7.931	8.050	7.847	7.987
	d. Babi	3.051	4.140	1.710	1.256	1.347
3	Ternak Unggas					
	a. Ayam Buras	528.120	601.702	634.796	562.514	597.938
	b. Ayam Ras Petelur	1.499.166	1.497.135	1.908.399	2.231.239	2.340.353
	c. Ayam Ras Pedaging	3.258.516	3.685.653	3.814.651	3.326.380	4.248.100
	d. Puyuh	148.264	131.543	133.542	136.697	141.072
	e. Itik	70.016	73.609	74 710	88.894	89.072
	f. Itik Manila/Entok	3.651	16.095	20.661	19.619	21.106

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan, 2025

Dalam periode 2020-2024, jumlah populasi ternak besar di Kabupaten Kuningan mengalami fluktuasi. Sapi potong mengalami peningkatan dari 29.533 ekor pada 2020 menjadi 30.631 ekor pada 2022, sebelum turun ke angka 28.240 ekor di 2023, lalu kembali meningkat ke 30.712 ekor pada 2024. Sapi perah mengalami penurunan signifikan dari 7.945 ekor pada 2021 menjadi 6.582 ekor di 2023, tetapi sedikit meningkat menjadi 7.303 ekor pada 2024. Sementara itu, populasi kerbau dan kuda menunjukkan tren yang lebih stabil, dengan jumlah kerbau meningkat perlahan dari 4.543 ekor pada 2020

menjadi 4.929 ekor pada 2024, dan kuda naik dari 356 ekor menjadi 382 ekor dalam periode yang sama.

Ternak kecil juga mengalami variasi dalam jumlah populasi. Domba menunjukkan pertumbuhan, dari 125.652 ekor pada 2020 menjadi 137.015 ekor di 2024, meskipun sempat mengalami penurunan pada 2023. Kambing mengalami tren peningkatan yang lebih stabil, sementara kelinci cenderung berfluktuasi tetapi tetap berada di kisaran 7.900 ekor. Sebaliknya, populasi babi mengalami penurunan drastis dari 4.140 ekor pada 2021 menjadi hanya 1.347 ekor pada 2024, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor permintaan pasar atau regulasi peternakan yang berubah.

Pada sektor unggas, ayam buras dan ayam ras pedaging mengalami lonjakan populasi, terutama ayam ras pedaging yang meningkat dari 3.258.516 ekor pada 2020 menjadi 4.248.100 ekor pada 2024. Ayam ras petelur juga mengalami kenaikan signifikan, mencapai 2.340.353 ekor di 2024. Populasi itik dan entok menunjukkan peningkatan yang cukup stabil, dengan entok mengalami pertumbuhan pesat dari 3.651 ekor pada 2020 menjadi 21.106 ekor di 2024. Sementara itu, puyuh mengalami sedikit penurunan pada 2021, tetapi kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

e. Perikanan

Definisi perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan. Kabupaten Kuningan memiliki produksi perikanan tangkap pada Tahun 2024 sebesar 440,83 ton dengan nilai Rp11.792,31 (dalam Juta) dengan jenis potensi perikanannya berupa ikan mas, patin, nilem, gurame, nila, sepat, dan lele.

Tabel 2.15 Produksi Perikanan Tangkap

No.	Tahun	Produksi (Ton)	Nilai (Juta Rp)
1	2020	223,03	3.568,51
2	2021	355,70	7.824,48
3	2022	368,35	223,03
4	2023	404,80	10.524,80
5	2024	440,83	11.792,31

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kuningan mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada 2020, produksi tercatat sebesar 223,03 ton dengan nilai ekonomi mencapai Rp. 3.568,51 juta. Produksi kemudian meningkat signifikan pada 2021 menjadi 355,70 ton dengan nilai yang lebih dari dua kali lipat, yaitu Rp. 7.824,48 juta. Pada 2022, meskipun produksi bertambah menjadi 368,35 ton, nilai ekonominya justru turun drastis ke Rp. 223,03 juta, yang kemungkinan disebabkan oleh penurunan harga ikan atau perubahan dalam metode penilaian. Tren positif kembali terlihat pada 2023 dan 2024, dengan produksi mencapai 404,80 ton dan 440,83 ton, serta nilai ekonomi yang meningkat pesat menjadi Rp. 10.524,80 juta dan Rp. 11.792,31 juta.

f. Pariwisata

Karena keberagaman morfologi dan topografinya, Kabupaten Kuningan memiliki potensi pariwisata yang sangat besar untuk dikelola dan dikembangkan baik pariwisata alam, pariwisata budaya maupun pariwisata buatan. Gunung Ciremai di bagian barat merupakan destinasi favorit bagi para pendaki dan pecinta keindahan alam. Di bidang sejarah dan budaya, Kuningan memiliki banyak destinasi yang menarik. Gedung Perundingan Linggarjati, misalnya, menjadi saksi bisu perundingan penting antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1946. Selain itu, Situs Purbakala Cipari memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat prasejarah di wilayah ini. Dengan segala potensinya, Kabupaten Kuningan memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Barat.

Tabel 2.16 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Kuningan, 2020–2024

Tahun	Mancanegara	Domestik	Jumlah
2020	49	2.480.669	2.480.718
2021	16	2.668.426	2.668.442
2022	35	3.448.882	3.448.917
2023	26	2.785.100	2.785.126
2024	224	3.824.296	3.824.520

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan

Jumlah wisatawan di Kabupaten Kuningan mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024, dengan tren peningkatan pada wisatawan domestic

maupun domestik. Pada 2020, jumlah wisatawan mencapai 2.480.718 orang, dengan 49 di antaranya merupakan wisatawan mancanegara. Meskipun jumlah wisatawan mancanegara turun menjadi 16 orang pada 2021, wisatawan domestik meningkat menjadi 2.668.426, sehingga total wisatawan juga bertambah. Puncak kunjungan terjadi pada 2022, dengan jumlah wisatawan mencapai 3.448.917 orang, yang didominasi oleh wisatawan domestik sebanyak 3.448.882 orang, sementara wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 35 orang. Pada 2023, total wisatawan sedikit menurun menjadi 2.785.126 orang, sejalan dengan penurunan wisatawan mancanegara menjadi 26 orang. Namun, pada 2024 terjadi lonjakan wisatawan mancanegara , mencapai 224 orang, dengan total wisatawan meningkat drastis menjadi 3.824.520 orang. Tren ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan terus berkembang, dengan daya tarik utama masih berasal dari wisatawan domestik, sementara wisatawan mancanegara mulai menunjukkan peningkatan yang menjanjikan.

Gambar 2.11 Peta Sebaran Objek Daya Tarik Wisata

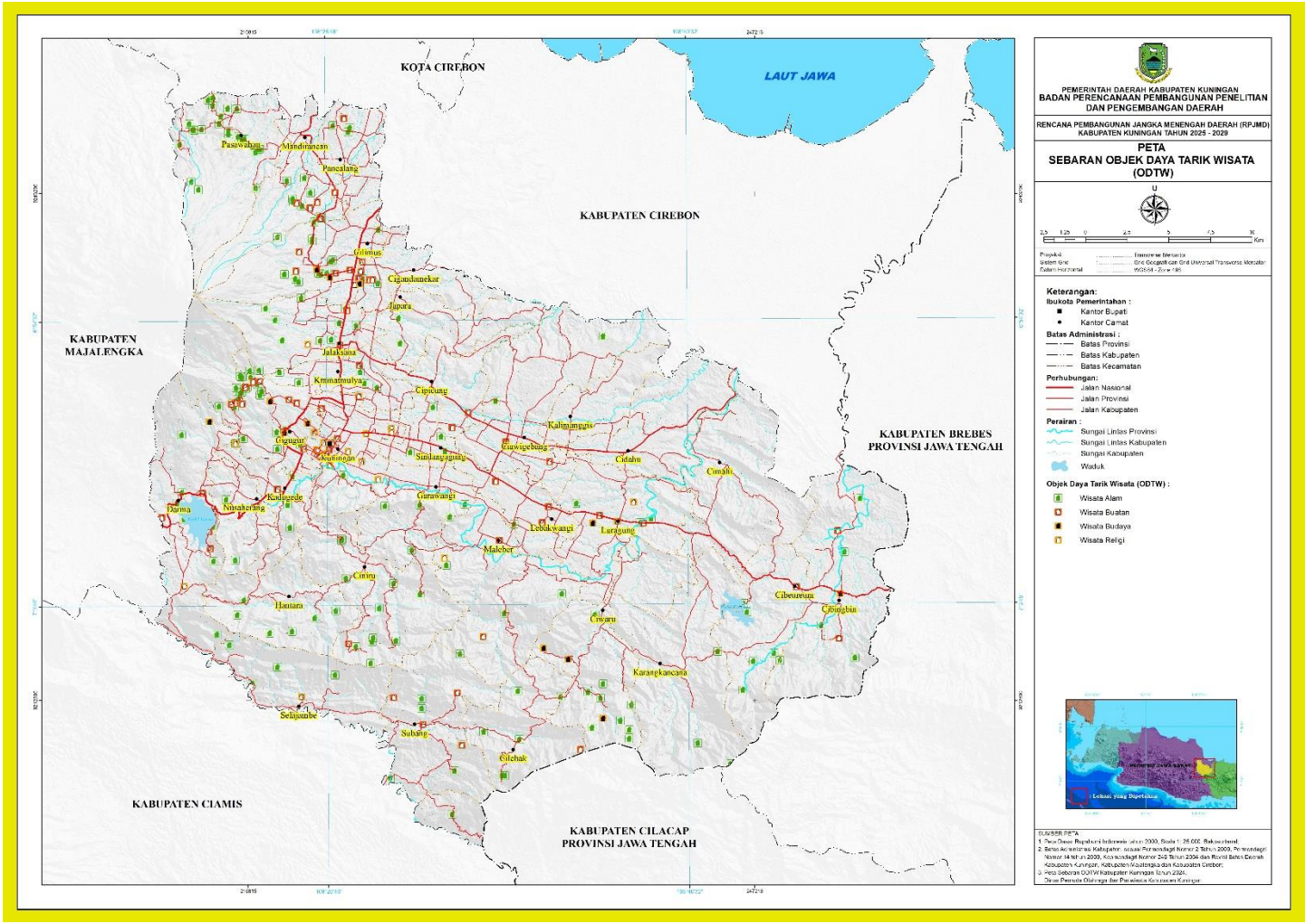

Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

Beberapa potensi pengembangan pariwasata alam, pariwisata budaya dan pariwisata buatan:

1. Potensi Pariwisata Alam
   a. Taman Wisata Alam (TWA) Linggarjati di Desa Linggajati Kecamatan Cilimus;
   b. Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC);
   c. Gunung Mayana di Desa Sindangjaya Kecamatan Kadugede;
   d. Bumi Perkemahan Palutungan di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur;
   e. Bumi Perkemahan Cibunar di Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus;
   f. Bumi Perkemahan Cibeureum di Desa Cibeureum Kecamatan Cilimus;
   g. Bumi Perkemahan Paniis di Desa Paniis Kecamatan Pasawahan;
   h. Bumi Perkemahan Padamatang di Desa Padamatang Kecamatan Pasawahan;
   i. Bumi Perkemahan Buyut Jaksa di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cibingbin;
   j. Arung Jeram Cisanggarung di Kecamatan Luragung;
   k. Waduk Darma di Desa Jagara Kecamatan Darma;
   l. Balong Keramat Darmaloka di Desa Darma Kecamatan Darma;
   m. Telaga Remis di Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan;
   n. Balong Ikan Cigugur di Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur;
   o. Cibulan di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana;
   p. Curug Lembah Cilengkrang di Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya;
   q. Curug Landung di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur;
   r. Curug Bangkong di Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang;

s. Curug Ciputri di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur;

t. Curug Sidomba di Desa Peusing Kecamatan Cilimus;

u. Wisata Pedesaan Sitonjul di Desa Sangkanhurip Kecamatan Cilimus;

v. Linggarjati Indah di Desa Linggamekar Kecamatan Cilimus;

w. Pemandian Air Panas Sangkanhurip Alami di Desa Sangkanhurip Kecamatan Cilimus;

x. KRK di Desa Padabeunghar Kecamatan Pasawahan;

y. Balong Dalem di Desa Babakanmulya Kecamatan Jalaksana;

z. Balong Kembang di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan;

aa. Situ Cicerem di Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan;

bb. Air Panas Ciniru di Desa Padamenak Kecamatan Jalaksana;

cc. Air Panas Ciangir di Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin;

dd. Air Panas Subang di Desa Subang Kecamatan Subang; dan

ee. Gua Indrakila di Desa Indrahayu Kecamatan Ciwaru.

2. Potensi pariwisata budaya
   a. Gedung Naskah Perundingan Linggarjati di Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus;

   b. Gedung Syahrir di Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus;

   c. Gedung Paseban Tri Panca Tunggal di Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur;

   d. Taman Purbakala Cipari di Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur.

3. Potensi pariwisata buatan antara lain *Open Space Gallery* di Desa Linggasana, Sangkan Resort Aqua Park di Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus dan sebagainya.

4. Potensi Pariwisata Religi antara lain Gua Maria di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur; Makam Syech Muhibat, Makam Syeh Magelung dan sebagainya

g. Pertambangan

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang[3]. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 1204 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan yaitu seluas kurang lebih 46.313 hektar yang terdiri dari Blok A Bukan Logam dan Batuan, Blok B Bukan Logam dan Batuan, Blok C Bukan Logam dan Batuan, Blok D Bukan Logam dan Batuan, Blok I Mineral Logam dan Blok II Mineral Logam.

h. Panas Bumi (Geotermal)

Kabupaten Kuningan memiliki potensi energi panas bumi yang cukup besar, tersebar di beberapa wilayah dengan kapasitas yang bervariasi. Prospek Sumberdaya Panas Bumi DI Kabupaten Kuningan terkonsentrasi di sekitar Gunung Ciremai, beberapa diantaranya sudah dilakukan kajian seperti di Desa Sangkanurip Kecamatan Cigandamekar, Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya, dan Desa Ciniru Kecamatan Japara.

Beberapa prospek utama adalah Sangkanhurip dengan luas reservoir sekitar 2 km², suhu antara 140–180°C, dan cadangan terduga sebesar 25 MW. Selain itu, terdapat prospek Ciniru yang memiliki luas reservoir sekitar 8,5 km² dengan cadangan terduga mencapai 75 MW, serta prospek Pajambon dengan luas 10 km² dan cadangan sebesar 135 MW.

8. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis dan demografis maupun karena ulah manusia. Menurut Data BPBD Kabupaten

Kuningan, sebagian besar wilayah Kabupaten Kuningan (76,18 persen) diprediksi memiliki kerawanan bencana alam tingkat menengah.

Tabel 2.17 Luasan Kawasan Rawan Bencana

No	Tingkat Kerawanan	Luas (Ha)	Persentase
1.	Rendah	8.741,4	7,35
2.	Menengah	90.620,1	76,18
3.	Tinggi	19.588,3	16,47

*Sumber **:** BPBD Kabupaten Kuningan, 2024*

Berdasarkan hasil inventarisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan dan UPT Pemadam Kebakaran (UPT Damkar), bencana alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Kuningan diantaranya yaitu gerakan tanah terutama longsor, letusan gunung api, gempa bumi, kekeringan, banjir bandang, banjir geomorfologis, dan cuaca ekstrim. Bencana yang paling sering terjadi yaitu tanah longsor, angin kencang, dan banjir. Data kejadian bencana secara rinci ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2.18 Data Kejadian Bencana Alam Tahun 2020-2024

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tanah Longsor	158	161	228	161	154
2	Gerakan Tanah	15	3	6	4	2
3	Tanah Amblas	2	-	-	-	1
4	Gempa Bumi	2	-	1	-	16
5	Banjir	15	9	28	8	S22
6	Abrasi	1		-	-	-
7	Angin Kencang / Puting Beliung	24	26	26	29	37
8	Sambaran Petir	1	2	2	4	1
9	Kebakaran Hutan/Lahan	6	-	3	48	25
10	Kekeringan	1	-	-	18	9
11	Kebakaran Rumah / Gedung	14	8	16	15	29
12	Bangunan Ambruk	21	13	20	10	25
13	Orang Hanyut	-	2	-	2	-
14	Orang Tenggelam	-	2	4	-	5
15	Orang Hilang	-	-	-	2	-
TOTAL		**260**	**226**	**334**	**301**	**326**

Sumber: BPBD Kabupaten Kuningan dan UPT Damkar Kabupaten Kuningan 2025

Dalam lima tahun terakhir, kejadian bencana di wilayah Kabupaten Kuningan menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, tercatat 260 kejadian bencana, yang kemudian menurun menjadi 226 kejadian pada 2021, namun kembali meningkat signifikan hingga mencapai 334 kejadian pada 2022. Meskipun jumlah kejadian sedikit menurun pada 2023 (301 kejadian), angka tersebut kembali naik pada 2024 menjadi 326 kejadian. Beberapa bencana dengan frekuensi tinggi adalah tanah longsor, angin kencang/puting beliung, serta kebakaran rumah atau gedung. Gempa bumi yang relatif jarang terjadi mengalami lonjakan signifikan pada 2024 dengan 16 kejadian. Selain itu, kebakaran hutan/lahan juga mengalami peningkatan tajam pada 2023 sebelum kembali menurun pada 2024.

Gambar 2.12 Peta Kawasan Rawan Bencana

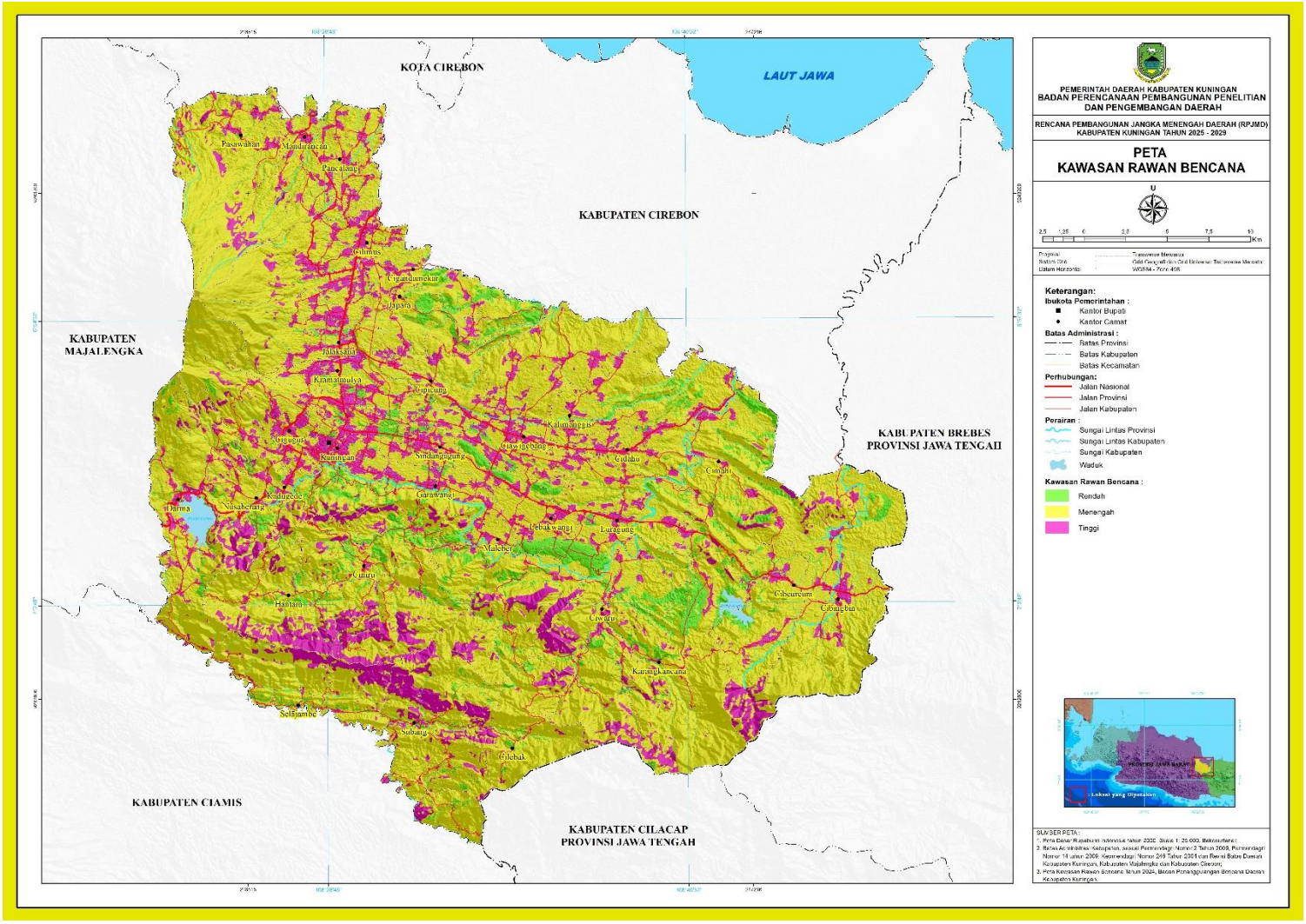

Sumber: BPBD Kabupaten Kuningan, 2025

a. Kerentanan Gerakan Tanah

Gerakan tanah merupakan fenomena dinamis alam untuk mencapai kondisi baru akibat adanya gangguan keseimbangan terhadap tanah yang terjadi, baik terjadi secara alamiah ataupun buatan. Gerakan tanah mencakup berbagai jenis pergerakan massa tanah dan batuan yang dapat terjadi akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Beberapa bentuk gerakan tanah yang umum terjadi antara lain tanah longsor, rayapan tanah, jatuhan, tanah amblas atau subsidence, pergerakan lateral, aliran bahan rombakan atau *debris flow*. Gerakan tanah yang umum terjadi di Kabupaten Kuningan yaitu longsor, rayapan, amblasan, dan aliran bahan rombakan. Gerakan tanah biasanya terjadi pada kawasan berbukit ketika musim hujan.

Berdasarkan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah, Badan Geologi Kementerian ESDM, kawasan rentan gerakan tanah di Kabupaten Kuningan terbagi menjadi kawasan rentan gerakan tanah sangat rendah, rendah, menengah, tinggi, alur aliran bahan rombakan, dan danau. Adapun luas kawasan rawan gerakan tanah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.19 Luasan Kerentanan Gerakan Tanah

No	Kerentanan Gerakan Tanah	Luas (Ha)	Persentase
1.	Sangat Rendah	6.852,76	5,75%
2.	Rendah	42.021,57	35,29%
3.	Menengah	53.162,04	44,64%
4.	Tinggi	15.877,43	13,33%
5.	Alur Aliran Bahan Rombakan	817,24	0,69%
6.	Danau	349,54	0,29%
Jumlah		**119.080,6**	**100,00**

Sumber **:** *Peta Zona Kerawanan Gerakan Tanah, Badan Geologi Kementerian ESDM*

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Kuningan berada pada kerentanan gerakan tanah rendah hingga menengah. Kawasan dengan kerentanan tinggi umumnya berada di wilayah selatan yang kondisi topografinya berbukit.

Gambar 2.13 Peta Kerentanan Gerakan Tanah

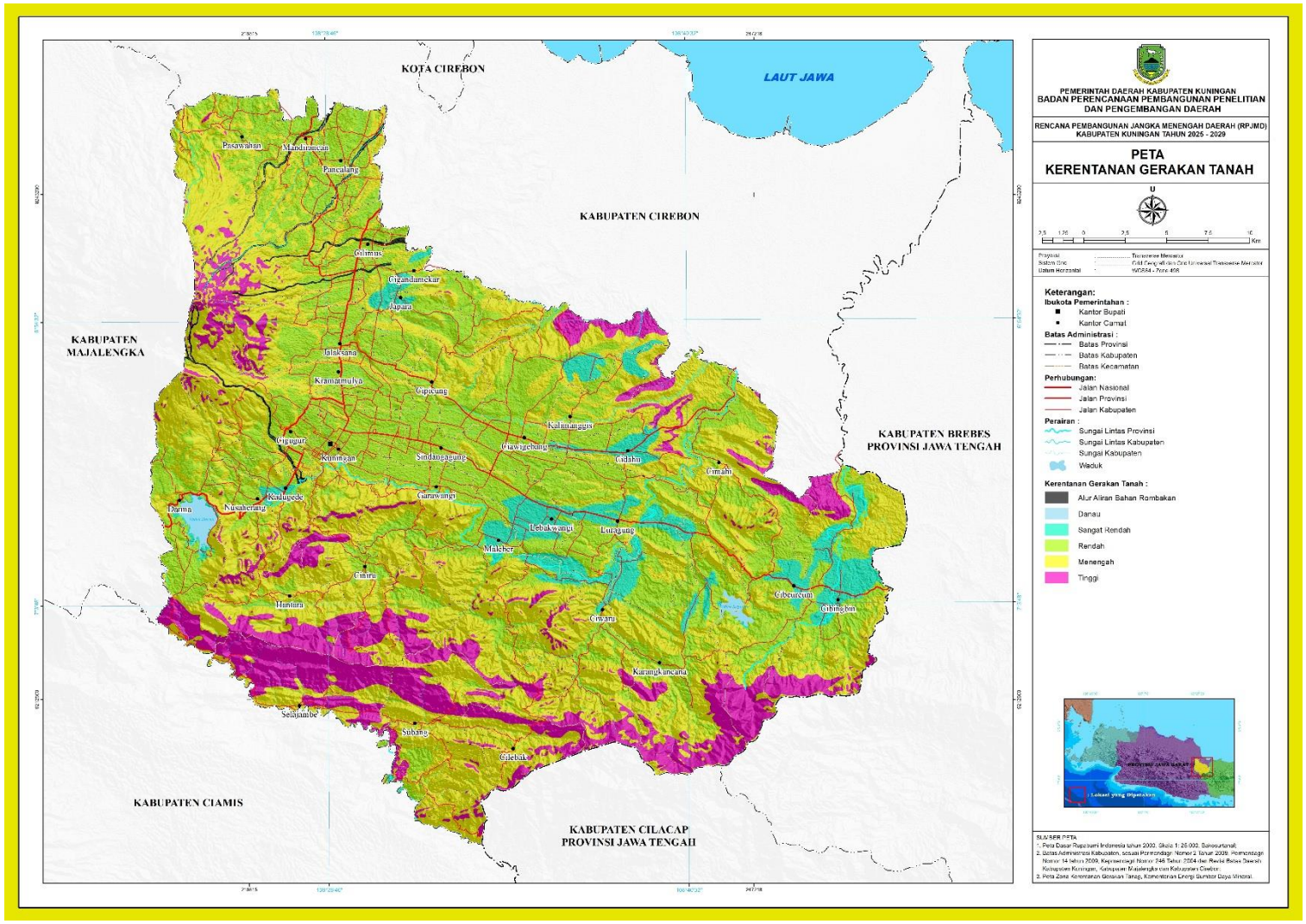

Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

a. Kawasan Rawan Letusan Gunungapi

Gunung Ciremai yang terletak di perbatasan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka merupakan gunung api strato (stratovulkan) yang masih aktif hingga saat ini. Meskipun aktivitas vulkaniknya relatif jarang dibandingkan gunung api lainnya di Indonesia, Gunung Ciremai memiliki riwayat letusan yang tercatat dalam sejarah vulkanologi.

Letusan terakhir Gunung Ciremai terjadi pada tahun 1951 dan tergolong sebagai letusan freatik. Letusan jenis ini terjadi akibat interaksi air dengan panas magma di bawah permukaan, menghasilkan semburan uap panas, abu vulkanik, dan material ringan lainnya. Letusan tersebut berskala kecil hingga sedang, tidak menimbulkan kerusakan signifikan, tetapi cukup untuk mengingatkan masyarakat akan potensi bahaya dari aktivitas vulkanik gunung ini. Selain itu, beberapa letusan kecil lainnya diduga terjadi pada abad ke-17, menghasilkan aliran lava dan material piroklastik yang membentuk sebagian lanskap gunung hingga saat ini.

Karakter letusan Gunung Ciremai umumnya bersifat eksplosif, meskipun dalam skala yang terbatas. Potensi bahaya dari letusan ini meliputi lontaran material vulkanik, sebaran abu yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat, hingga aliran piroklastik pada letusan besar. Selain itu, material vulkanik yang tertinggal di lereng gunung berisiko terbawa air hujan, memicu lahar yang berbahaya bagi permukiman di sekitar gunung.

Berdasarkan Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung api Ciremai, luasan yang berpotensi terlanda bencana dapat disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.20 Luas Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunungapi

No	Kerentanan Gerakan Tanah	Luas (Ha)	Persentase
1.	Berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, dan aliran lahar	4.455,67	23,95
2.	Berpotensi terlanda aliran lahar	2.514,23	13,51
3.	Selalu terancam aliran awan panas, gas beracun, dan aliran lava	231,80	1,25
4.	Selalu terancam lontaran batu pijar dan hujan abu lebat	417,43	2,24
5.	Berpotensi terlanda aliran awan panas, aliran lava, dan aliran lahar	2.375,23	12,77
6.	Berpotensi terlanda hujan abu dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu pijar	8.609,59	46,28

No	Kerentanan Gerakan Tanah	Luas (Ha)	Persentase
	Jumlah	18.603,95	100

Sumber: Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Ciremai, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi.

Gambar 2.14 Peta Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunungapi

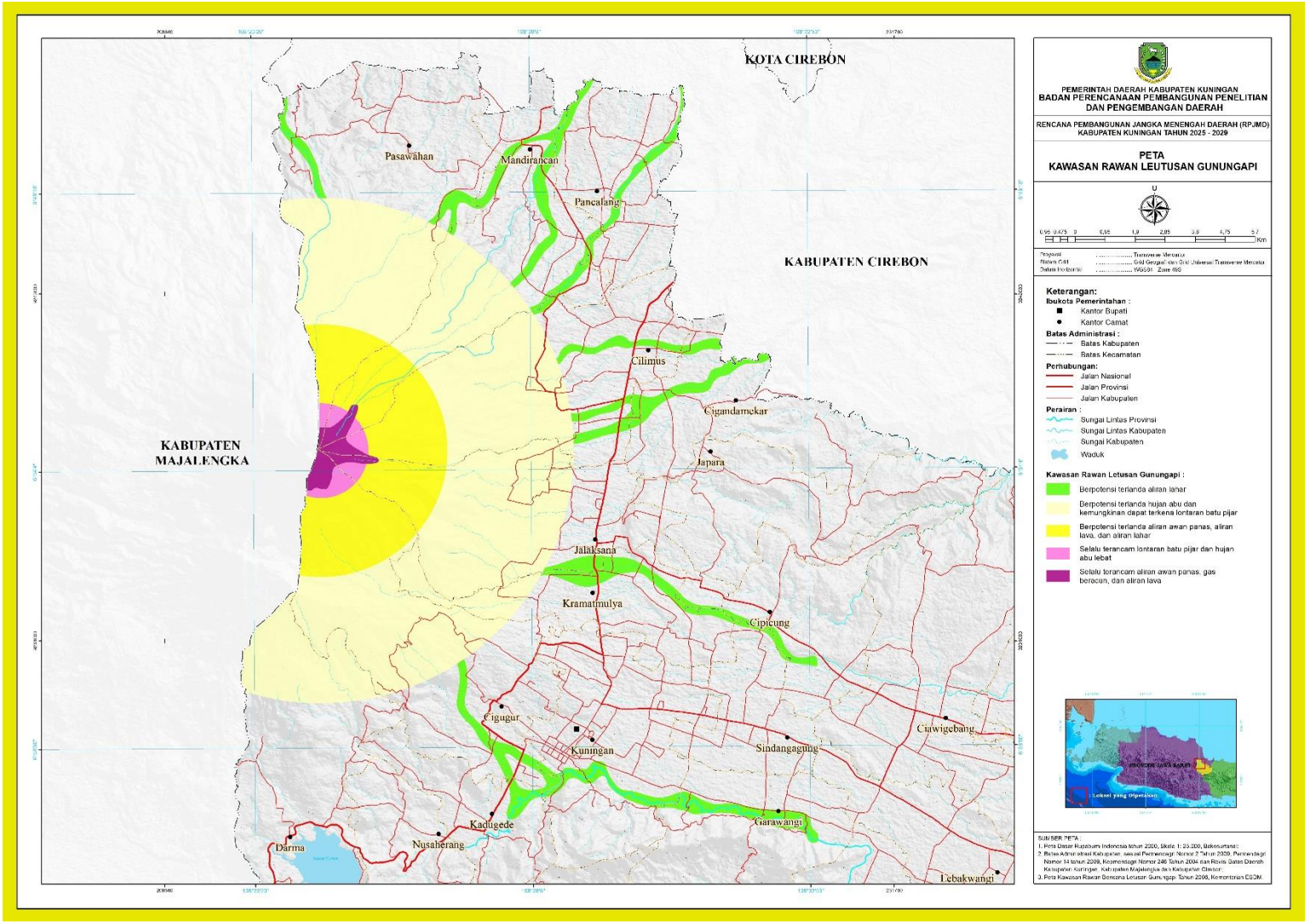

Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

b. Kawasan Rawan Banjir Bandang

Kabupaten Kuningan, dengan karakteristik geografis yang mencakup daerah pegunungan/perbukitan, lembah, dan aliran sungai, memiliki potensi terjadinya banjir bandang, terutama pada musim hujan dengan intensitas tinggi. Topografi Kuningan yang berbukit dan curam di beberapa wilayah, terutama di kawasan hulu sungai, dapat memicu aliran air yang deras saat hujan lebat, meningkatkan risiko banjir bandang di daerah hilir. Selain itu, berkumpulnya air di sungai besar seperti Sungai Cisanggarung dan Sungai Cijangkelok berpotensi menyebabkan terjadinya banjir geomorfologis di beberapa wilayah seperti Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Cibingbin, Kecamatan Cidahu, Kecamatan Cimahi, dan Kecamatan Luragung. Pada kondisi tersebut, meskipun tidak terjadi banjir bandang, beberapa permukiman dapat terendam oleh luapan air sungai, seperti yang pernah terjadi di Desa Datar Kecamatan Cidahu dan Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin.

Menurut BPBD Kabupaten Kuningan, kawasan rawan banjir di Kabuapten Kuningan memiliki luas ±14.140,59 hektar. Dari luas tersebut, sebagian besar berada pada tingkat kerawanan menengah (59,53 persen) dan hanya sebagian kecil berada pada tingkat kerawanan tinggi (2,72 persen).

Tabel 2.21 Luasan Kawasan Rawan Banjir Bandang

No	Tingkat Kerawanan	Luas (Ha)	Persentase
1.	Rendah	5.337,86	37,75%
2.	Menengah	8.417,72	59,53%
3.	Tinggi	385,02	2,72%

Sumber : BPBD Kabupaten Kuningan, 2024

Gambar 2.15 Peta Kawasan Rawan Banjir Bandang

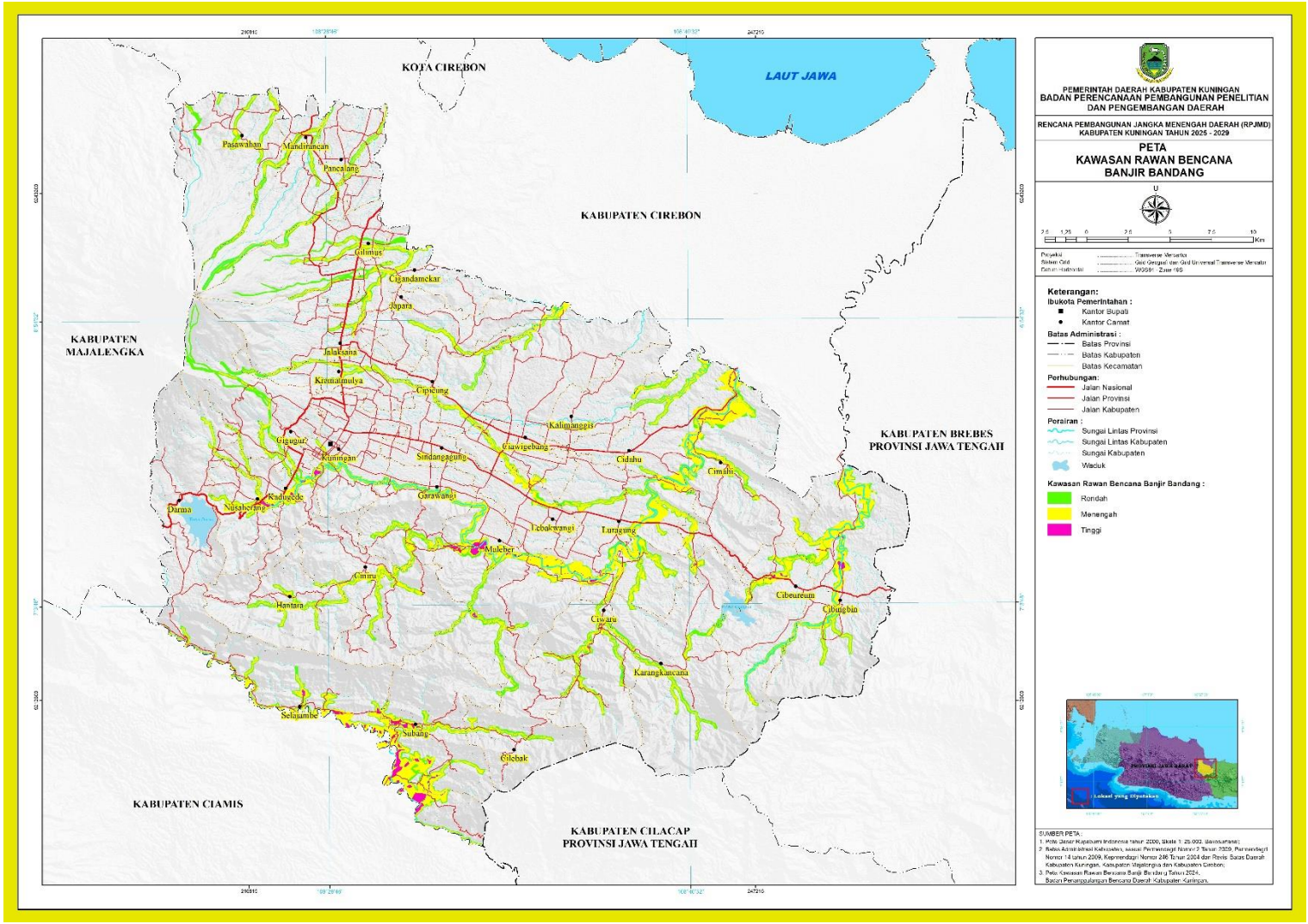

Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

c. Gempa Bumi

Aktivitas gempa tektonik di Kabupaten Kuningan sering dikaitkan dengan keberadaan Sesar Baribis. Sesar Baribis khususnya segmen Ciremai memiliki karakteristik sebagai sesar geser aktif dengan potensi pergerakan yang dapat menyebabkan gempa berkekuatan sedang hingga besar. Beberapa peristiwa gempa bumi telah terjadi di Kuningan, seperti gempa berkekuatan 4,1 magnitudo pada 25 Juli 2024 yang menyebabkan kerusakan bangunan. Selain itu, gempa berkekuatan 3,8 magnitudo pada 22 Desember 2022 juga tercatat dipicu oleh aktivitas Sesar Baribis. Selain sesar baribis, sesar yang teridentifikasi berada di Kabupaten Kuningan yaitu Sesar Cibingbin. Sesar ini memiliki panjang sekitar 4,52 kilometer dan membentang dari barat laut ke tenggara, melewati Desa Ciangir, Sindangjawa, dan Cipondok. Dengan kondisi geologis yang rentan terhadap gempa bumi, penting bagi masyarakat dan pemerintah setempat untuk meningkatkan mitigasi bencana guna mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan.

d. Cuaca Ekstrim

Fenomena cuaca ekstrem, khususnya angin kencang, kerap terjadi di daerah tropis, termasuk Kabupaten Kuningan, terutama saat peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Hal ini diakibatkan karena adanya pengaruh hembusan angin munson yang datang dari arah Australia. Secara umum angin kencang menerjang wilayah pegunungan atau dataran tinggi dan daerah-daerah dengan vegetasi kurang, serta dipengaruhi pula oleh letak matahari dan kondisi topografi. Angin ini disebabkan antara lain perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca seperti peningkatan tekanan udara maupun adanya pergerakan semu matahari secara tegak lurus dengan permukaan bumi (kulminasi). Adanya fenomena angin kencang ini berpotensi mengakibatkan berbagai kerugian yang cukup besar seperti kerugian fisik maupun ekonomi sehingga diperlukan upaya dalam penanggulangannya.

2.1.4 Demografi

Kondisi demografi pada tahun 2024 berdasarkan data Kuningan Dalam Angka 2025 (BPS), jumlah penduduk mencapai 1.213.927 jiwa (Laki-laki: 614.594 jiwa; perempuan: 593.095 jiwa) dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,04 persen. Kepadatan penduduk pada tahun 2024 tercatat 1.016,61 jiwa per km^2.

Komposisi penduduk menurut umur tergolong kedalam piramida *expansive* atau piramida penduduk muda, sesuai dengan gambar 2.16 dan tabel 2.22 di bawah ini.

Gambar 2.16 Piramida Penduduk Tahun 2024

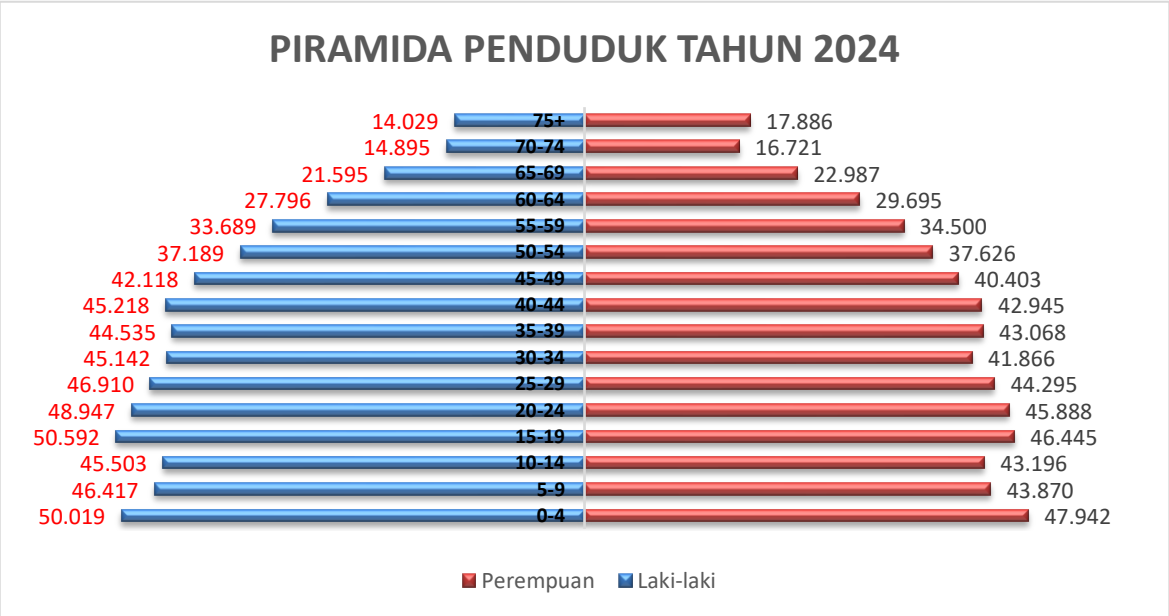

Tabel 2.22 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2024

INDIKATOR		TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Demografi						
1.	Jumlah Penduduk	1.167.686	1.180.391	1.196.017	1.201.764	1.213.927
	a. Laki-laki	592.009	598.254	602.415	608.669	614.594
	b. Perempuan	575.677	582.137	586.596	593.095	593.095
	c. Rasio	102,84	102,77	102,7	102,63	102,55
2.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km)	978	989	995,74	1.006,42	1.016,61
3.	Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)	1,17	1,09	1,04	1,05	1,04

INDIKATOR		TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
4.	Jumlah Rumah Tangga	n/a	n/a	305.336	309.121	n/a
5.	Jumlah Penduduk menurut Kelompok umur (jiwa)					
	a. 0-14	277.965	276.433	275.713	276.989	276.947
	b. 15-64	798.083	806.294	816.115	821.316	828.867
	c. 65+	91.638	97.664	74.347	103.459	108.113
6.	Angka Beban Tanggungan (ABT)	46,31	46,40	46,55	46,32	46,46

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

Dari data di atas, pada Tahun 2024 komposisi penduduk menurut kelompok umur terdiri atas kelompok penduduk umur muda (<15 tahun) berjumlah 276.947 jiwa; kelompok umur produktif (15 – 64 tahun) berjumlah 828.867 jiwa dan kelompok umur lanjut usia (>65 tahun) berjumlah 108.113 jiwa.

Pada tahun 2020, ABT tercatat sebesar **46,31**, kemudian meningkat sedikit menjadi **46,40** di tahun 2021, dan mencapai puncaknya di **46,55** pada tahun 2022. Namun, di tahun 2023, angka ini menurun menjadi **46,32**, sebelum kembali mengalami sedikit kenaikan menjadi **46,46** di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2020 jumlah usia produktif di Kabupaten Kuningan lebih banyak dari pada usia tidak produktif.

Gambar 2.17 Peta Sebaran Penduduk Kabupaten Kuningan

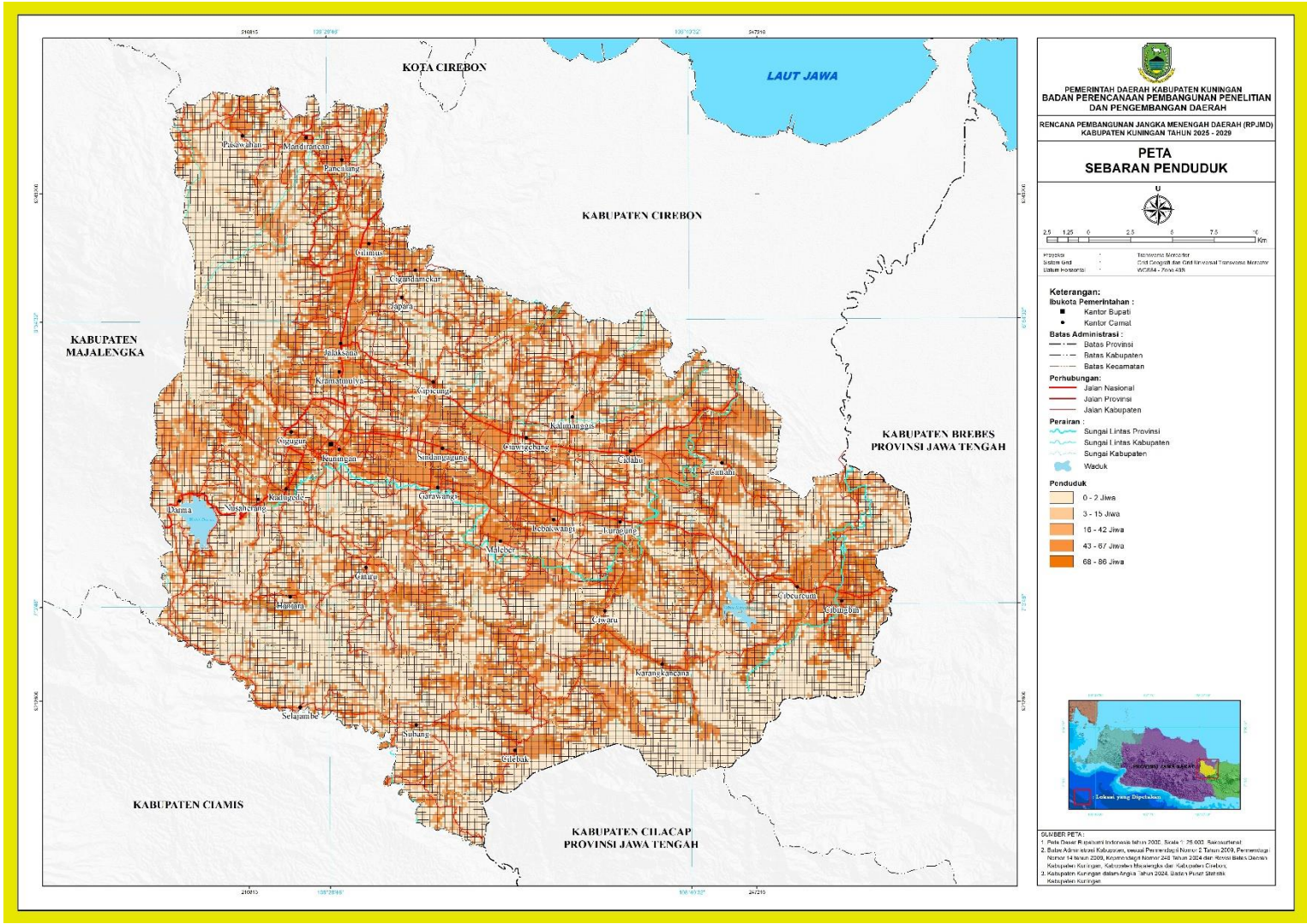

Sumber: Bappeda Kabupaten Kuningan, 2025

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kondisi Umum Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan perhitungan IPM, selama kurun waktu Tahun 2022-2024 komponen indeks pendidikan, indeks kesehatan dan pengeluaran mengalami peningkatan, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.23 Indikator Umum Kesejahteraan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
UHH	Tahun	73,59	73,78	74,03	74,91	75,22
Angka Kematian Ibu	kasus per 100 ribu orang	27	42	24	21	13
Angka Kematian Bayi	kasus per 1000	4,14	2,95	5,13	9,25	8,46
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,22	12,23	12,24	12,26	12,27
Rata -Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,38	7,57	7,88	7,89	7,90
Pengeluaran	000 Rp	9.459	9.409	9.620	10.011	10.418
Indeks Kesehatan	Poin	82,45	82,74	83,12	84,48	n/a
Indeks HLS	Poin	67,89	67,56	68,00	68,11	70,47
Indeks RLS	Poin	50,47	50,24	52,53	52,60	53,32
Indeks Pendidikan	Poin	59,18	59,97	60,27	60,36	61,89
Indeks Daya Beli	Poin	68,44	68,27	68,95	70,17	n/a
IPM	Poin	69,38	69,71	70,16	70,99	71,56

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, Perkembangan angka harapan hidup penduduk Kabupaten Kuningan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, seiring perbaikan pola hidup dan peningkatan sarana pendukung kesehatan bagi penduduk. Menurut angka UHH Tahun 2024, sejak umur nol tahun penduduk memiliki kesempatan hidup sampai dengan umur 75,22 tahun,

untuk capaian angka kematian ibu dan kematian bayi cenderung fluktuatif pada 3 (tiga) tahun terakhir.

Dimensi pengetahuan yang meliputi indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Kuningan meningkat hingga mencapai kelas 3 SMA atau Diploma 1 sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024. Peningkatan ini tidak terlepas dari kontribusi penduduk berumur 7 tahun ke atas yang masih bersekolah pada pendidikan formal maupun non formal. Semakin besar mereka yang sedang mengikuti pendidikan pada umur 7 tahun ke atas, maka akan semakin tinggi harapan lama sekolah yang akan dicapai.

Rata-rata lama sekolah penduduk berumur 15 tahun ke atas sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 sudah menginjak pada tingkatan kelas 1 SMP atau paling tinggi kelas 2 SMP. Kemampuan penduduk dalam capaian rata-rata lama sekolah masih berada pada tingkatan pendidikan SMP ke bawah menunjukkan kualitas penduduk dilihat dari aspek pendidikan masih relatif rendah, dengan capaian hanya sampai kelas 1 atau 2 SMP. Pengeluaran per kapita mencapai 9.620 juta rupiah pada Tahun 2022, 10.011 juta rupiah pada Tahun 2023 dan 10.418 juta rupiah pada Tahun 2024. Pengeluaran per kapita cenderung meningkat dari Tahun 2022 hingga Tahun 2024. Sisi pengeluaran memberikan dampak kepada kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama pada komoditas-komoditas yang sebagian besar dikonsumsi oleh penduduk.

Meskipun IPM Kabupaten Kuningan terus mengalami peningkatan, akan tetapi lajunya relatif lebih lambat dibandingkan dengan Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka. IPM Kabupaten Kuningan pernah mengungguli ketiganya di tahun 2020, namun Kabupaten Cirebon mengejar dan lebih unggul di Tahun 2023 dan diperkirakan Kabupaten Majalengka akan mendahului di tahun 2025, lalu Kabupaten Indramayu di tahun 2027. Hal ini kemungkinan disebabkan terutama oleh adanya peningkatan daya beli masyarakat. Salah satu faktor pengungkitnya yaitu meningkatnya investasi di bidang industri/manufaktur di ketiga kabupaten tersebut. Keberadaan industri manufaktur dapat meningkatkan daya beli masyarakat karena adanya upah yang stabil dan lebih tinggi dibandingkan

sektor informal.

Gambar 2.18 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2022-2024

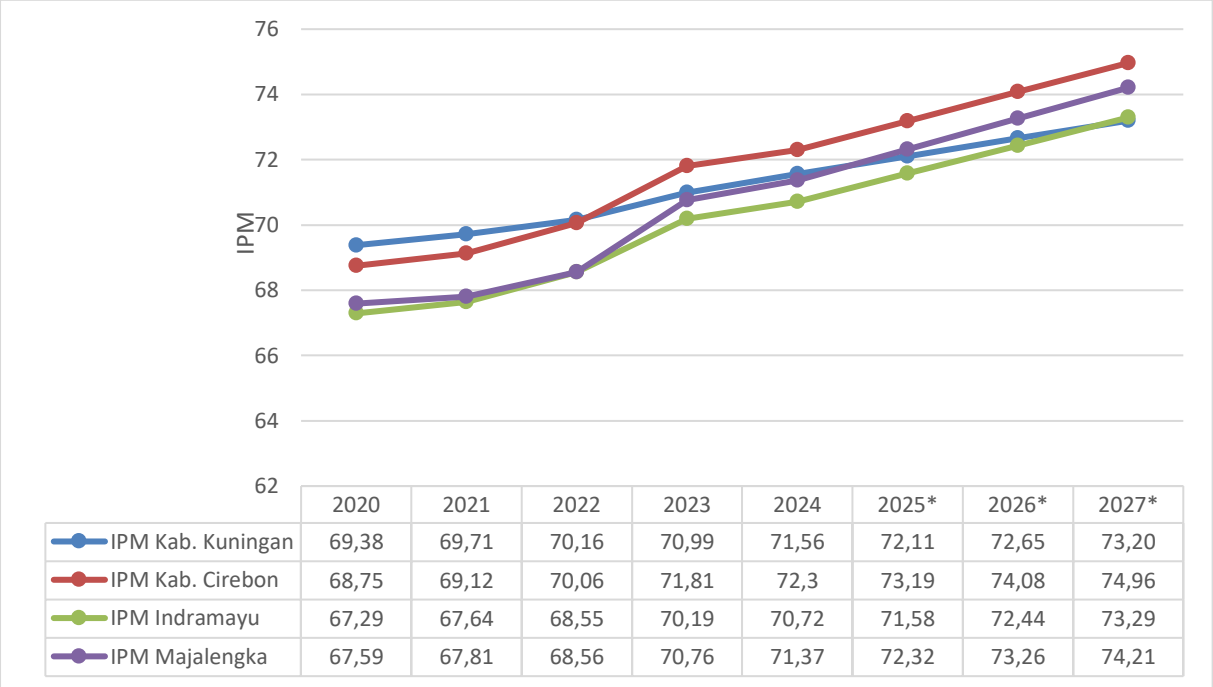

	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	2026*	2027*
IPM Kab. Kuningan	69,38	69,71	70,16	70,99	71,56	72,11	72,65	73,20
IPM Kab. Cirebon	68,75	69,12	70,06	71,81	72,3	73,19	74,08	74,96
IPM Indramayu	67,29	67,64	68,55	70,19	70,72	71,58	72,44	73,29
IPM Majalengka	67,59	67,81	68,56	70,76	71,37	72,32	73,26	74,21

Sumber : Bappeda, Kab. Kuningan,2025

** Data proyeksi*

B. Kondisi Pemerataan Ekonomi

1. Perkembangan PDRB Tahun 2020-2024

Pemerataan ekonomi tidak terlepas dari perkembangan pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB per kapita, dan indeks gini. Laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami kenaikan, lebih rinci sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.24 Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)						
a. Nilai PDRB						
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Miliar Rupiah	25.618,87	26.919,10	29.519,83	32.544,89*	35.535,77**
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Miliar Rupiah	16.882,76	17.483,02	18.450,34	19.418,73*	20.507,27**

Indikator	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
b. PDRB Per Kapita	Ribu Rupiah	21,996	22,891	24,827,21	27,080,93	29.273,40

Sumber: Kuningan Dalam Angka 2025
**Angka sementara*
***Angka sangat sementara*

Adapun untuk melihat nilai Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan perlapangan usaha dapat dilihat dalam tabel 2.15 dan tabel 2.16 sebagai berikut.

Tabel 2.25 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2020–2024

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.302,21	6.435,08	7.026,81	7.723,37	8.253,92
B	Pertambangan dan Penggalian	312,73	369,59	375,77	407,76	419,64
C	Industri Pengolahan	557,69	610,72	663,71	719,05	805,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	22,38	25,49	27,32	28,79	27,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26,32	28,56	30,01	31,11	36,69
F	Konstruksi	2.090,20	2.342,69	2.533,80	2.750,90	2.868,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.586,95	3.673,81	4.106,71	4.424,73	4.773,35
H	Transportasi dan Pergudangan	3.591,64	3.673,81	4.353,13	5.194,09	6.276,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	466,23	484,72	568,47	641,89	692,77
J	Informasi dan Komunikasi	1.094,15	1.154,70	1.211,23	1.306,64	1.483,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi /	1.414,09	1.557,61	1.667,16	1.789,77	1.913,27
L	Real Estat	655,42	732,08	798,74	865,88	913,01
M,N	Jasa Perusahaan	112,74	123,82	145,33	161,89	156,32

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	940,97	932,41	919,34	958,83	1.045,15
P	Jasa Pendidikan	3.182,13	3.374,44	3.638,16	3.924,13	4.127,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	401,02	440,21	473,30	514,21	521,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	842,00	847,60	980,84	1.101,86	1.223,00
	Produk Domestik Regional Bruto	**25.618,87**	**26.929,10**	**29.519,83**	**32.544,89**	**35.535,77**

Sumber : PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Kuningan Tahun 2020 sd 2024
**) Angka Sementara*
***) Angka Sangat Sementara*

Tabel 2.26 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2020–2024

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*)	2024**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.591,62	3.675,49	3.812,90	3.894,39	3.644,68
B	Pertambangan dan Penggalian	217,43	245,14	243,51	245,97	262,35
C	Industri Pengolahan	416,25	430,15	453,98	475,00	502,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,79	16,77	17,36	17,90	19,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	16,32	17,36	17,85	18,36	20,81
F	Konstruksi	1.433,51	1.534,20	1.579,41	1.659,77	1.709,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.655,96	2.751,05	2.862,89	2.982,16	2.991,73
H	Transportasi dan Pergudangan	2.287,91	2.293,42	2.580,10	2.837,97	3.403,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	307,84	310,70	349,94	374,25	395,07
J	Informasi dan Komunikasi	1.142,56	1.223,60	1.304,80	1.402,17	1.655,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi /	859,97	903,64	894,50	936,16	974,68
L	Real Estat	554,89	618,42	653,07	695,21	770,49
M,N	Jasa Perusahaan	75,83	82,81	92,48	98,86	91,96
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	540,31	531,67	525,34	538,67	566,57
P	Jasa Pendidikan	1.843,53	1.896,95	2.020,36	2.130,30	2.280,56

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*)	2024**)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	292,77	314,78	333,66	350,25	372,65
R,S,T,U	Jasa lainnya	631,27	636,86	708,17	761,35	844,38
	Produk Domestik Regional Bruto	**16.882,76**	**17.483,02**	**18.450,32**	**19.418.73**	**20.507,27**

Sumber Data : PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Kuningan Tahun 2020 sd 2024
**) Angka Sementara*
***) Angka Sangat Sementara*

Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang belum menunjukkan percepatan yang memadai membutuhkan kebijakan akselerasi pembangunan terutama peningkatan potensi sektor-sektor unggulan. Kabupaten Kuningan dengan basis ekonomi dari sektor pertanian, pariwisata dan jasa perdagangan serta usaha kecil dan menengah perlu memfokuskan prioritas pembangunan ke sektor-sektor tersebut, diantaranya adalah:

a. Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan masih merupakan penyumbang terbesar perekonomian Kabupaten Kuningan, namun setiap tahun distribusinya terus menurun. Data lima tahun terakhir menunjukkan produksi dan produktivitas pertanian berfluktuasi dan cenderung menurun, hal tersebut dimungkinkan disebabkan kondisi musim maupun terus berkurangnya luas lahan yang dimiliki petani, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

   1) Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian;
   2) Optimalisasi lahan tadah hujan;
   3) Optimalisasi pemanfaatan lahan;
   4) Pemotongan rantai perdagangan saprotan;
   5) Perlindungan terhadap kegagalan panen; dan
   6) Diversifikasi usaha pertanian.

b. Mengingat banyaknya pengurangan tenaga kerja perempuan, perlu ada upaya terobosan untuk pengembangan industri rumah tangga yang didukung dengan penyediaan sarana prasarana maupun pemasarannya serta peningkatan SDM.

c. Pengembangan destinasi dan usaha pariwisata daerah.

d. Peningkatan promosi pariwisata.

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Hal lain yang perlu disikapi dengan bijak adalah tekanan terhadap lingkungan akibat kegiatan perekonomian. Sejalan dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kuningan yang mengacu pada implementasi kebupaten konservasi maka sektor ekonomi produktif diarahkan pada kegiatan ekonomi ramah lingkungan.

Tabel 2.27 Target dan Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-2,42-1,51	1,75-2,65	1,90-3,00	2,00-3,45	0,19-7,20
Capaian	0,11	3,56	5,53	5,25	5,61

Sumber : BPS Kab. Kuningan, 2025

Capaian indikator laju pertumbuhan ekonomi daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan terhitung meningkat pada Tahun 2022 sebesar 5,53, namun di Tahun 2023 sedikit terkoreksi menjadi 5,25 dan di Tahun 2024 Sebesar 5,61 ,namun sampai Tahun 2024 capaian LPE Kabupaten Kuningan masih diatas Provinsi Jawa Barat 4,95 dan Nasional 5,03. Adapun perbandingan laju pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Kuningan dengan Kabupaten Tetangga yaitu Kabupaten Kuningan ada diatas Kabupaten Indramayu sebesar 2,18 dan dibawah LPE Kabupaten Cirebon sebesar 5,83 dan kabupaten Majalengka sebesar 6,38.

Tabel 2.28 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kuningan, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
LPE Kuningan	0,11	3,56	5,53	5,25	5,61
LPE Jabar	(-2,52)	3,74	5,45	5,00	4,95
LPE Nasional	(-2,07)	3,69	5,31	5,05	5,03

Sumber : BPS, Kab. Kuningan,2025

Gambar 2.19 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024

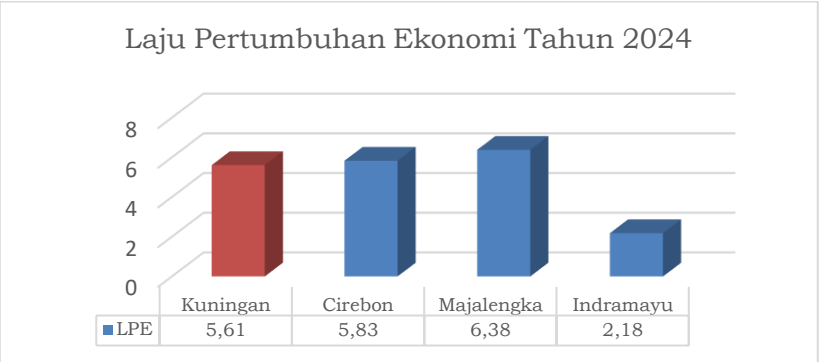

Sumber : Bappeda, Kab. Kuningan,2025

3. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dan terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Pada Tahun 2024, perhitungan inflasi Kabupaten Kuningan, berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Cirebon, menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang terkendali dibandingkan tahun sebelumnya, dimana selama kurun waktu 12 bulan inflasi secara umum telah mencapai 1,10 persen.

Tabel 2.29 Capaian Inflasi Kota Cirebon Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian	1,16	1,81	4,86	3,22	1,10

Sumber : BPS, 2025

Data Infasi Kabupaten Kuningan diperoleh dari BPS dengan menggunakan pendekatan data inflasi Kota Cirebon. Sejak Tahun 2020 sampai Tahun 2024 inflasi di Kabupaten Kuningan selalu dibawah 5 persen sebagaimana tabel diatas.

Tabel 2.30 Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Inflasi Kota Cirebo	1,16	1,81	4,86	3,22	1,10
Inflasi Jabar	2,18	1,69	6,04	2,48	1,64
Inflasi Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,54

Sumber : BPS, 2025

Inflasi Kota Cirebon lebih rendah dibandingkan dengan Inflasi Jawa Barat dan Nasional masing-masing pada Tahun 2024 berturut-turut sebesar 1,10 persen, 1,64 persen dan 1,54 persen. Pada Tahun 2024 inflasi mengalami penurunan yang cukup besar baik di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat maupun Nasional.

4. Indeks Gini Ratio

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai gini ratio, makin tinggi ketimpangan yang terjadi. Ini artinya bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk kaya semakin besar. Idealnya, kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Masyarakat golongan ekonomi bawah harus didorong untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka, sehingga ketimpangan dapat diperkecil. Dengan kata lain, koefisien gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Tabel 2.31. Target dan Capaian Indikator Indeks Gini Ratio Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	< 0,38	< 0,38	< 0,38	< 0,38	0,336
Capaian	0,361	0,349	0,345	0,351	0,372

Sumber : BPS Kab. Kuningan,2025

Berdasarkan data Susenas BPS, pencapaian gini rasio Tahun 2024 berada pada level menengah dengan besaran 0,372, lebih tinggi dari Tahun 2023 sebesar 0,351 poin, namun kondisi ini masih dikategorikan kelompok ketimpangan “ringan” karena berada di bawah 0,4. Capaian tersebut juga lebih baik dari Jawa Barat sebesar 0,421 dan Nasional sebesar 0,381

Tabel 2.32 Perbandingan Indeks Gini Ratio Kuningan, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Gini Ratio Kuningan	0,361	0,349	0,345	0,351	0,372
Indeks Gini Ratio Jabar	0,398	0,406	0,417	0,425	0,421
Indeks Gini Ratio Nasional	0,385	0,381	0,381	0,388	0,381

Sumber : BPS, Kab. Kuningan, 2025

Gambar 2.20 Perbandingan Indeks Gini Ratio Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024

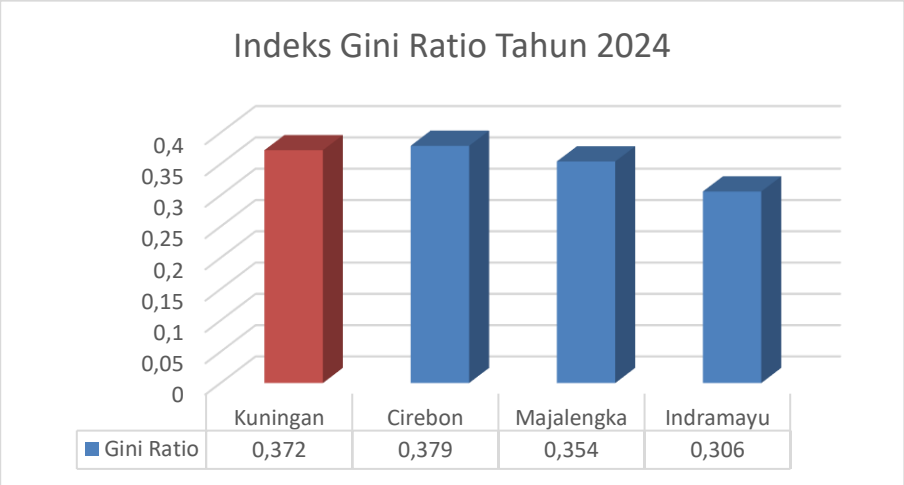

Sumber : Bappeda, Kab. Kuningan,2025

Kabupaten Kuningan berada pada level menengah dengan besaran 0,372 yang masih cukup jauh dibawah angka Jawa Barat yang mencapai 0,421 Kondisi tersebut menggambarkan pendapatan masyarakat Kuningan masih relatif lebih merata dibandingkan Jawa Barat secara umum. Jika dihubungkan dengan pengeluaran per kapita yang masih relatif rendah, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan masyarakat Kuningan cenderung merata di level menengah bawah. Kondisi tersebut juga didukung oleh data hasil PPLS, dimana tercatat masih cukup tinggi penduduk yang tidak tergolong miskin namun masih berada sedikit diatas garis kemiskinan (penduduk mendekati miskin dan rentan miskin).

Dengan demikian intervensi pemerintah di bidang ekonomi perlu mempertimbangkan pengembangan sektor yang mampu menstimulus sektor-sektor yang digeluti oleh penduduk menengah bawah sehingga tercipta

pertumbuhan yang optimal dan sekaligus memperbaiki distribusi pendapatan penduduk (*redistribution with growth*). Seperti pengembangan industri yang berbasis bahan-bahan pertanian lokal (*agroindustri*) yang selain efektif dalam menciptakan nilai tambah juga dapat menstimulus perkembangan (efek pengganda) sektor pertanian di Kabupaten Kuningan. Selain itu, pengembangan industri pariwisata juga sangat efektif menstimulus pengembangan UKM di Kabupaten Kuningan, karena karakter pengeluaran wisatawan yang cenderung produk-produk spesifik daerah selain untuk hotel dan restoran. Hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki daya beli masyarakat di wilayah Kuningan selatan yang masih banyak terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena minimnya investasi diwilayah tersebut. Pemerintah perlu memancing investor untuk menanamkan modal, dengan cara memperbaiki infrastruktur dan regulasi yang nyaman bagi investor.

Indeks Gini Ratio di Kabupaten Kuningan selalu lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pada Tahun 2024 indeks gini ratio Kabupaten Kuningan sebesar 0,372, sedangkan di Provinsi Jawa Barat dan Nasional masing-masing sebersar 0,421 dan 0,381 Selain itu, perbandingan indeks gini ratio Kabupaten kuningan sebesar 0,372 dengan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu masing-masing sebesar 0,379, 0,354, dan 0,306.

5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu isu penting nasional. Kemajuan sosial dan ekonomi saat ini masih menyisakan masalah kemiskinan, baik di tingkat nasional maupun regionalsalah satunya terjadi di Kabupaten Kuningan. Adapun data dari kemiskinan Kabupaten Kuningan dapat dilihat ditabel berikut.

Tabel 2.33 Kemiskinan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)	352,358	358,069	371.665	402.767	420.867
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	139,20	143,315	140,25	133,88	131,83
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	12,82	13,10	12,76	12,12	11,88*

Sumber : BPS Kab. Kuningan, 2025

Meskipun garis kemiskinan di Kabupaten Kuningan selalu mengalami peningkatan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, namun persentase penduduk miskin mengalami penurunan. Dapat dilihat pada Tahun 2022 sebesar 12,76 persen, lalu mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2024 sebesar 11,88 persen.

Dari hasil pendataan dengan metode Garis Kemiskinan hasil SUSENAS, diprediksi pada Tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kuningan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 16.040 jiwa, atau dari semula 123.160 jiwa menjadi 139.200 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut menyebabkan naiknya persentase penduduk di Kabupaten Kuningan yang berada dibawah garis kemiskinan Tahun 2020 dan menjadi 13,10 persen pada Tahun 2021.

Memasuki Tahun 2024, walau masih sangat terasa dampak kenaikan harga barang di Kabupaten Kuningan namun pergerakan perekonomian membuat jumlah penduduk miskin mengalami sedikit penurunan. Menurut cacatan BPS, pada Tahun 2024 terjadi penurunan penduduk miskin sebesar 2 ribu jiwa lebih, sehingga terjadi penurunan yang cukup persentase penduduk Kabupaten Kuningan yang berada di bawah GK, yakni menjadi sebesar 11,88 persen. pada Tahun 2020, penduduk miskin di Kabupaten Kuningan mengalami kenaikan sebesar 1,41 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan persentase penduduk miskin ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Kuningan namun juga terjadi hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Kenaikan ini dipicu oleh kondisi Pandemi Covid-19 baik secara lokal, nasional maupun internasional. Berdasarkan perbandingan penduduk miskin dengan Provinsi Jawa Barat, dapat dikatakan bahwa penduduk miskin Kabupaten Kuningan sudah lebih melambat

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pada Tahun 2024 persentase kemiskinan Kabupaten Kuningan sebesar 11,88 persen, sedangkan di provinsi Jawa Barat dan Nasional masing-masing sebesar 7,46 persen dan 9,03 persen.

Tabel 2.34 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kemiskinan Kuningan	12,82	13,10	12,76	12,12	11,88*
Persentase Kemiskinan Jabar	7,88	8,40	8,06	7,62	7,46*
Persentase Kemiskinan Nasional	9,78	10,14	9,54	9,36	9,03*

Sumber : BPS, 2025

Pasca pandemi Covid-19, pemerintah pusat maupun daerah berusaha keras untuk membangkitkan aspek ekonomi dan menjaga agar inflasi dapat tetap terkendali. Upaya tersebut cukup berhasil menurunkan angka kemsikinan. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu, karakteristik pergerakan angka kemiskinannya relatif sama sejak tahun 2020. Ketika yang satu naik, yang lain juga naik dan ketika yang satu turun, yang lain juga turun dengan besaran yang bervariasi. Hal ini kemungkinan karena kabupaten-kabupaten tersebut memiliki karakteristik yang relatif sama terutama dalam hal masih dominannya sektor pertanian sehingga masih banyak warganya yang bekerja di sektor pertanian.

Masyarakat petani cenderung miskin karena berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun struktural. Salah satu penyebab utamanya adalah kepemilikan lahan yang terbatas. Banyak petani hanya memiliki lahan kecil (kurang dari 0,5 hektare), bahkan sebagian besar hanya bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang rendah. Selain itu, harga komoditas pertanian yang tidak stabil membuat pendapatan petani sering tidak menentu, terutama karena mereka tidak memiliki daya tawar yang kuat terhadap tengkulak atau pasar. Di sisi lain, biaya produksi yang tinggi akibat mahalnya pupuk, benih, dan pestisida semakin memperparah kondisi mereka, sementara keuntungan yang diperoleh sering kali sangat kecil.

Ketergantungan petani terhadap tengkulak juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi ekonomi mereka. Sulitnya akses terhadap modal menyebabkan petani terpaksa meminjam uang dengan bunga tinggi, yang akhirnya membuat mereka terjebak dalam lingkaran utang. Selain itu,

keterbatasan teknologi dan minimnya inovasi dalam pertanian membuat produktivitas mereka tetap rendah, karena banyak yang masih menggunakan metode tradisional. Tantangan lain yang dihadapi adalah perubahan iklim dan risiko bencana alam seperti banjir atau kekeringan yang dapat merusak hasil panen. Hal ini semakin diperburuk dengan akses pasar yang tidak menguntungkan, di mana petani harus melewati rantai distribusi yang panjang, sehingga keuntungan lebih banyak dinikmati oleh perantara dibandingkan mereka sendiri.

Gambar 2.21 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Tetangga Tahun 2020-2024

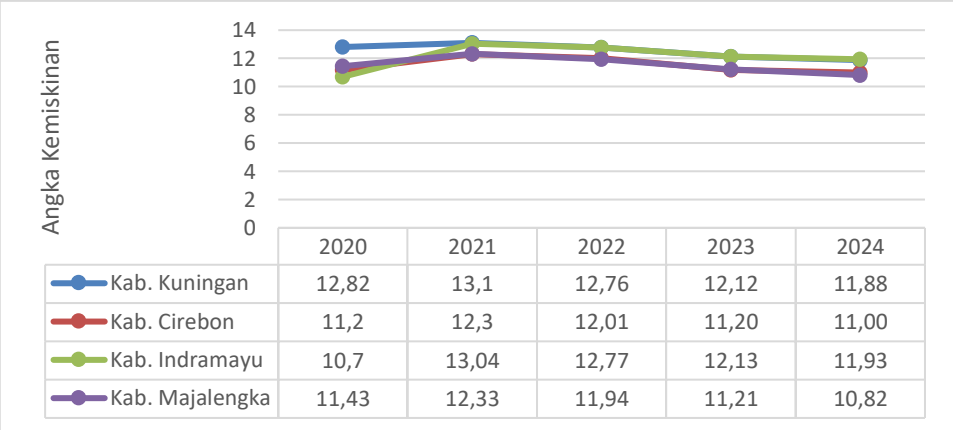

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kuningan	12,82	13,1	12,76	12,12	11,88
Kab. Cirebon	11,2	12,3	12,01	11,20	11,00
Kab. Indramayu	10,7	13,04	12,77	12,13	11,93
Kab. Majalengka	11,43	12,33	11,94	11,21	10,82

Sumber : BPS Kab. Kuningan, 2025

6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan antara banyaknya orang yang mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, baik yang sudah pernah bekerja maupun belum pernah bekerja terhadap angkatan kerja. Adapun data tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Kuningan	11,22	11,68	9,81	9,49	7,78*

Sumber : BPS Kab. Kuningan, 2025

Nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kuningan Tahun 2023 sebesar 9,49 persen, sedangkan pada Tahun 2024 TPT Kabupaten Kuningan mengalami penurunan sebesar 1,71 persen dari 9,49 persen menjadi

7,78* persen. Nilai ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2024 terdapat 7,78* persen dari penduduk usia angkatan kerja yang menganggur/tidak bekerja.

Meskipun angka pengangguran terus menurun, tantangan masih ada, terutama dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Kabupaten Kuningan memiliki Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang masih di bawah rata-rata Jawa Barat, menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat usia produktif yang belum terserap ke dalam dunia kerja. Oleh karena itu, upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja, investasi dalam pendidikan vokasi, serta pengembangan sektor industri yang lebih luas masih diperlukan untuk memastikan penurunan angka pengangguran yang berkelanjutan.

Tingkat pengangguran terbuka adalah angka yang dihitung dengan dasar penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun ke atas, bukan angka TPT yang biasa digunakan, dimana penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Pada Tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kuningan sebesar 9,81 persen. Sedangkan untuk Tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kuningan mengalami penurunan menjadi 7,78 persen, namun hal ini masih berada diatas Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Sedangkan Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Kabupaten Tetangga yaitu Kabupaten Kuningan sebesar 7,78 persen, Kabupaten Cirebon sebesar 6,74 persen, Kabupaten Majalengka sebesar 4,01 persen dan Kabupaten Indramayu sebesar 6,25 persen.

Tabel 2.36 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kuningan, Provinsi dan Nasional

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kuningan	11,22	11,68	9,81	9,49	7,78*
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jabar	10,46	9,82	8,31	7,44	6,75*
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91*

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan, 2025

Jika dibandingkan dengan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu, hanya Kabupaten Kuningan yang mengalami

kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perantau yang bekerja di luar Kabupaten Kuningan, yang mana mayoritas menjadi pengusaha Warung Makan Indomie (Warmindo) terpaksa kembali ke daerah dan menjadi pengangguran karena terjadinya pandemi Covid-19. Setelah itu, Tingkat Pengangguran Terbuka di masing-masing daerah terus mengalami penurunan hingga tahun 2024.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kuningan yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten tetangga kemungkinan disebabkan oleh semakin berkembangnya investasi manufaktur di ketiga kabupaten tersebut. Semakin banyak investasi berarti semakin banyak lapangan kerja yang tersedia, dan semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat diserap.

Gambar 2.22 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Tetangga Tahun 2020-2024

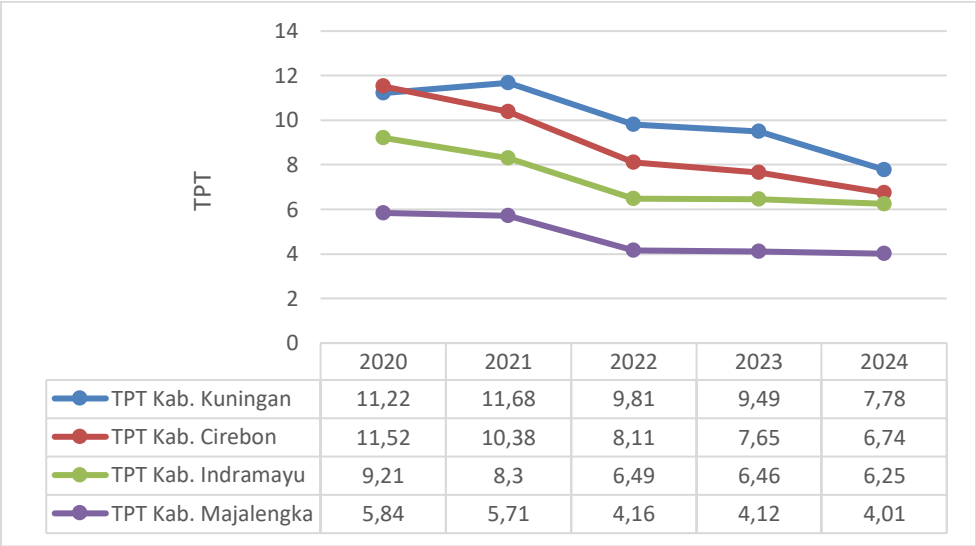

	2020	2021	2022	2023	2024
TPT Kab. Kuningan	11,22	11,68	9,81	9,49	7,78
TPT Kab. Cirebon	11,52	10,38	8,11	7,65	6,74
TPT Kab. Indramayu	9,21	8,3	6,49	6,46	6,25
TPT Kab. Majalengka	5,84	5,71	4,16	4,12	4,01

Sumber : Bappeda Kab. Kuningan, 2025

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

A. Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Pada tahun 2025 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyusun buku Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2024. Data yang digunakan dalam perhitungan IDSD ini distandardisasi dengan rumus minmax sehingga didapat skor 0-5. Skor pilar daya saing merupakan agregasi skor indikator pembentuknya yang dihitung dengan menggunakan rata-rata aritmatik. Setiap pilar daya saing memiliki tingkat kepentingan yang sama sehingga diberikan bobot yang sama dalam perhitungan skor indeks. Skor akhir IDSD dihitung melalui agregasi skor pilar daya saing dengan menggunakan metode perhitungan yang sama. Skor IDSD Kabupaten Kuningan menurut pilar-pilarnya sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.37 Skor Pilar-Pilar Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Pilar	Komponen	Indikator	Skor Indeks
Pilar 1 : Institusi	**Keamanan**	**Kejahatan Terorganisir**	4,91
		Tingkat Pembunuhan (Rate)	4,92
	Checks and balances	**Transparansi Anggaran**	5,00
		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	5,00
		Kinerja Instansi Pemerintah	5,00
		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	5,00
	Transparansi	**Upaya Pencegahan Korupsi**	4,67
		Hak Atas Kepemilikan	4,41
		Kualitas Administrasi Pertanahan	4,29
	Orientasi Masa Depan Pemerintah	**Tingkat pengelolaan lingkungan**	5,00
Indeks Pilar Institusi			**4,82**

Pilar 2: Infrastruktur	**Infrastruktur Transportasi (Darat)**	**Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Aksesibilitas Jalan**	5,00
		Kualitas Infrastruktur Jalan	5,00
	Infrastruktur Transportasi (Jalur Kereta Api)	**Layanan Infrastruktur Kereta Api**	0,00
	Infrastruktur Transportasi (Udara)	**Layanan Infrastruktur Bandara**	0,25
	Infrastruktur Transportasi (Pelabuhan)	**Layanan Infrastruktur Pelabuhan**	2,40
	Infrastruktur Utilitas (Kelistrikan)	**Rasio Elektrifikasi**	5,00
	Infrastruktur Utilitas (Air)	**Akses Air Minum Layak**	4,83
		Tingkat Kehilangan Air	2,26
Indeks Pilar Infrastruktur			**3,09**
Pilar 3: Adopsi TIK	**Adopsi TIK**	**Pengguna Telepon Seluler**	4,60
		Jangkauan Jaringan 4G	5,00
		Pengguna Internet	3,72
Indeks Pilar Adopsi TIK			**4,44**
Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro	**Stabilitas Ekonomi Makro**	**Pertumbuhan Deflator PDRB**	3,17
		Kapasitas Fiskal Daerah	2,31
		Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi (2021-2023)	4,56
		Indeks Ketahanan Pangan	4,55
		Nilai Investasi	2,38
Indeks Pilar Stabilitas Ekonomi Makro			**3,39**
Pilar 5: Kesehatan		**Angka Harapan Hidup**	4,11
Indeks Pilar Kesehatan			**4,11**
Pilar 6: Keterampilan	**Tenaga Kerja Saat Ini**	**Rata-rata Tahun Sekolah**	4,30
		Keterampilan Lulusan	0,00

		Kemudahan Menemukan Pekerja Terampil	4,26
	Tenaga Kerja Masa Depan	**Angka Harapan Sekolah**	4,41
		Berpikir Kritis dalam Mengajar	3,18
		Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar	4,41
Indeks Pilar Keterampilan			**3,43**
Pilar 7: Pasar Produk	**Persaingan Domestik**	**Persaingan Sektor Jasa**	5,00
Indeks Pilar Pasar Produk			5,00
Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja	**Fleksibilitas**	**Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Aktif**	1,57
		Upah Pekerja	4,01
	Meritokrasi dan Insentif	**Kesetaraan Upah Perempuan dan Laki-laki**	4,33
Indeks Pilar Pasar Tenaga Kerja			**3,31**
Pilar 9: Sistem Keuangan	**Kedalaman**	**Kredit Swasta Terhadap PDRB Harga Berlaku**	5,00
		Nilai Akad Kredit Usaha Rakyat (Rupiah)	1,31
		Persentase premi asuransi jiwa dan non-jiwa terhadap PDRB ADHB	0,46
Indeks Pilar Sistem Keuangan			**2,25**
Pilar 10: Ukuran Pasar	**Ukuran Pasar**	**PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)**	4,40
Indeks Pilar Ukuran Pasar			**4,40**
Pilar 11: Dinamika Bisnis	**Persyaratan Administrasi**	**Pertumbuhan Nomo Induk Berusaha (NIB)**	4,56
		Kinerja Pelayanan Publik	4,89
Indeks Pilar Dinamika Bisnis			**4,72**
Pilar 12: Kapabilitas Inovasi	**Keanekaragaman dan Kolaborasi**	**Keanekaragaman Tenaga Kerja**	2,74
		Pengembangan Klaster	3,39
	Riset	**Publikasi Ilmiah**	3,28
		Aplikasi Kekayaan Intelektual (KI)	4,20

		Belanja Riset	1,78
		Indeks Keunggulan Lembaga Riset	0,86
	Komersialisasi	**Aplikasi Merek Dagang**	4,19
Indeks Pilar Kapabilitas Inovasi			**2,92**
Total Indeks Kab. Kuningan IDSD 2024			**3,82**

Sumber : IDSD 2024, BRIN

Berdasarkan hasil Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024, diperoleh skor total sebesar **3,82** dari skor maksimal **5,00**, yang mencerminkan tingkat daya saing daerah yang cukup baik namun masih memiliki ruang untuk perbaikan di beberapa sektor. Pilar dengan skor tertinggi adalah **Pilar 7: Pasar Produk** dengan nilai sempurna **5,00**, menunjukkan tingkat persaingan sektor jasa yang sangat kuat. Disusul oleh **Pilar 1: Institusi** dengan skor **4,82**, yang mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi tinggi, dan keamanan yang cukup terjaga. Pilar lain yang menonjol adalah **Pilar 11: Dinamika Bisnis** (4,72), **Pilar 10: Ukuran Pasar** (4,40), dan **Pilar 3: Adopsi TIK** (4,44), mengindikasikan pertumbuhan administrasi bisnis dan adopsi teknologi yang positif.

Namun demikian, terdapat beberapa pilar dengan skor rendah yang perlu mendapatkan perhatian khusus, seperti **Pilar 9: Sistem Keuangan** (2,25) yang dipengaruhi oleh rendahnya nilai akad Kredit Usaha Rakyat dan premi asuransi, serta **Pilar 2: Infrastruktur** (3,09) yang terkendala oleh layanan infrastruktur transportasi jalur kereta api dan bandara dengan skor sangat rendah. **Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro** juga menunjukkan skor moderat **3,39**, yang menandakan perlunya penguatan kapasitas fiskal daerah dan nilai investasi. **Pilar 6: Keterampilan** (3,43) memperlihatkan masih lemahnya keterampilan lulusan dan aspek berpikir kritis dalam pendidikan. **Pilar 12: Kapabilitas Inovasi** menjadi salah satu tantangan terbesar dengan skor **2,92**, terutama pada indikator belanja riset dan kualitas lembaga penelitian.

Tabel 2.38 Skor Pilar-Pilar Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024

No.	Kab./Kota	Skor IDSD
1	Kab. Kuningan	3,82
2	Kab. Cirebon	3,8
4	Kab. Majalengk	3,68
3	Kab. Indramayu	3,34
5	Kab. Sumedang	3,92
6	Kab. Subang	3,68
7	Kota Cirebon	3,95
Prov. Jawa Barat		**3,88**
Nasional		**3,43**

Sumber : IDSD 2024, BRIN

Secara umum, Kabupaten Kuningan menunjukkan performa yang baik pada aspek kelembagaan, persaingan pasar, dan transformasi digital. Namun, untuk meningkatkan daya saing secara menyeluruh, diperlukan strategi yang lebih terfokus pada peningkatan infrastruktur, sistem keuangan, inovasi, serta kualitas tenaga kerja dan pendidikan. Upaya kolaboratif lintas sektor dan keberlanjutan program menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing yang lebih tinggi di masa depan.

B. Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Perbulan

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atauangka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk.

Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran

maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

Data pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di Kabupaten Kuningan menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, total pengeluaran mencapai Rp1.157.538, kemudian meningkat signifikan menjadi Rp1.211.685 di tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup tajam menjadi Rp1.100.725. Meski demikian, angka ini kembali meningkat menjadi Rp1.155.616 pada 2023 dan Rp1.161.901 di tahun 2024.

Pengeluaran untuk makanan secara umum tetap menjadi komponen terbesar, dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp668.912. Sedangkan pengeluaran bukan makanan cenderung stabil, walaupun sempat turun pada 2022 menjadi Rp479.513, sebelum kembali mendekati angka sebelumnya di tahun-tahun berikutnya. Data ini mencerminkan pola konsumsi masyarakat yang relatif seimbang antara kebutuhan makanan dan bukan makanan, dengan kecenderungan beradaptasi terhadap kondisi ekonomi tahunan.

Tabel 2.39 Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan di Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Makanan	Rp.	614.074	668.912	621.212	612.843	627.711
	Bukan Makanan	Rp.	543.464	542.773	479.513	542.773	534.190
Jumlah		Rp.	1.157.538	1.211.685	1.100.725	1.155.616	1.161.901

Sumber: BPS Kab. Kuningan

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan

pemukiman, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, perpustakaan, kearsipan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

2.3.1.Layanan Urusan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar.

1. Pendidikan

Pendidikan adalah pelayanan dasar yang harus disediakan oleh Negara agar dimungkinkan untuk diakses oleh warga, terutama pada jenjang pendidikan dasar, dimana jenjang ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten untuk menjamin akses dan kualitas pelayanan pendidikan dasar. Kondisi pendidikan di Kabupaten Kuningan terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, terutama dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan hingga akses masyarakat terhadap pendidikan. Berikut adalah sajian data-data terkait dengan sektor pendidikan di Kabupaten Kuningan.

Tabel 2.40 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI/Sederajat	95,21	95,26	99,99	99,78	98,52
2	SMP/MTs/ Sederajat	79,90	79,82	79,63	83,64	81,30
3	SMA/SMK/MA/Sederajat	64,73	67,61	66,86	64,01	65,55

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

Data Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Kuningan selama periode 2020–2024 menunjukkan tren positif terutama pada jenjang pendidikan dasar. APM jenjang SD/MI/Sederajat konsisten tinggi, meningkat

dari 95,21% pada 2020 menjadi hampir sempurna pada 2022 (99,99%), dan tetap di atas 98% hingga 2024, mencerminkan keberhasilan dalam menjangkau anak usia sekolah dasar. Di jenjang SMP/MTs/Sederajat, APM relatif stabil di kisaran 79–83%, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada 2023 (83,64%), meskipun sedikit menurun di tahun berikutnya. Sementara itu, APM jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat cenderung lebih rendah dan fluktuatif, berada di kisaran 64–67%, menunjukkan bahwa partisipasi siswa pada jenjang pendidikan menengah atas masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.41 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI/Sederajat	98,60	100,72	101,70	104,68	102,72
2	SMP/MTs/ Sederajat	97,63	96,55	80,53	85,94	90,03
3	SMA/SMK/MA/Sederajat	78,03	79,03	77,93	77,88	85,86

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025

Data Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Kuningan tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan penduduk dalam pendidikan cukup tinggi, terutama pada jenjang pendidikan dasar. APK jenjang SD/MI/Sederajat konsisten melebihi 100% sejak 2021, mencapai puncaknya pada 2023 sebesar 104,68%, yang mengindikasikan bahwa tidak hanya anak usia sekolah dasar yang terdaftar, tetapi juga mereka yang di luar usia resmi, seperti yang terlambat masuk sekolah. Di jenjang SMP/MTs/Sederajat, terjadi penurunan signifikan pada 2022 menjadi 80,53%, namun angka ini kembali meningkat hingga mencapai 90,03% di 2024, menunjukkan adanya perbaikan partisipasi. Sementara itu, jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat memiliki APK terendah, meskipun terdapat tren peningkatan dari 78,03% pada 2020 menjadi 85,86% pada 2024. Secara umum, APK menunjukkan bahwa akses pendidikan di Kabupaten Kuningan cukup baik, terutama di jenjang dasar, namun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi pada jenjang menengah dan atas.

Tabel 2.42 Ketersediaan Gedung Sekolah Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**SD**					
A	Jumlah gedung sekolah	657	658	656	657	658
2	**SMP**					
A	Jumlah gedung sekolah	108	109	111	120	120

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, 2025

Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), jumlah gedung tercatat sebanyak 657 unit pada tahun 2020, mengalami sedikit peningkatan menjadi 658 pada tahun 2021, lalu menurun menjadi 656 pada tahun 2022. Namun demikian, jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 657 pada tahun 2023 dan stabil di angka 658 pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan tren peningkatan yang lebih konsisten. Tercatat sebanyak 108 gedung pada tahun 2020, kemudian bertambah menjadi 109 pada tahun 2021. Peningkatan ini berlanjut dengan 111 gedung pada tahun 2022 dan melonjak signifikan menjadi 120 gedung pada tahun 2023, serta tetap pada jumlah yang sama di tahun 2024.

Tabel 2.43 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**SD**					
A	Jumlah Guru	6.753	6.570	6.668	6.939	6.101
B	Jumlah Murid	101.438	99.346	98.302	96.947	97.345
C	Rasio	1:0,08	01:00,1	01:00,1	01:00,1	
2	**SMP**					
A	Jumlah Guru	2.537	2.494	2.502	2.674	2.490
B	Jumlah Murid	40.396	41.145	40.397	40.668	41.879
C	Rasio	1:0,052	01:00,1	01:00,1	01:00,1	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, 2025

Perkembangan jumlah guru dan murid di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kuningan menunjukkan dinamika yang menarik selama periode 2020 hingga 2024. Pada jenjang SD, jumlah guru sempat menurun dari 6.753 pada tahun 2020 menjadi 6.570 pada 2021, lalu mengalami kenaikan menjadi 6.939 pada tahun 2023, namun

kembali turun menjadi 6.101 pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah murid SD menunjukkan tren penurunan dari 101.438 murid di tahun 2020 menjadi 96.947 pada 2023, meskipun sedikit meningkat menjadi 97.345 pada 2024. Rasio guru terhadap murid di jenjang SD tercatat sekitar 1:13 hingga 1:16 selama periode ini.

Untuk jenjang SMP, jumlah guru relatif stabil, yaitu dari 2.537 guru pada tahun 2020 menjadi 2.490 pada 2024, dengan fluktuasi kecil di antara tahun-tahun tersebut. Jumlah murid SMP pun tidak jauh berbeda, dengan kisaran antara 40.000 hingga 42.000 murid. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 40.396 murid dan meningkat menjadi 41.879 murid pada 2024. Rasio guru terhadap murid di jenjang SMP juga menunjukkan keseimbangan yang cukup baik, berada di kisaran 1:16 hingga 1:17. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi, Kabupaten Kuningan tetap menjaga ketersediaan tenaga pendidik untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah secara proporsional.

Tabel 2.44 Persentase Angka Putus Sekolah Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sekolah Dasar (SD)	0,1	0,1	0,1	0,1	n/a
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0,16	0,15	0,15	0,14	n/a
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)					

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Kuningan , 2025
*Ket: **) Data tidak ada*

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Persentase angka putus sekolah di Kabupaten Kuningan untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan tren yang relatif stabil bahkan cenderung menurun selama periode 2020 hingga 2023. Pada jenjang SD, angka putus sekolah tercatat sebesar 0,1% setiap tahun dari 2020 hingga 2023, mencerminkan tingkat keberlangsungan pendidikan dasar yang cukup baik. Sedangkan di jenjang SMP, terjadi penurunan bertahap dari 0,16% pada tahun 2020 menjadi 0,14% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan keberlanjutan pendidikan menengah pertama di daerah tersebut. Sementara itu, untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), data angka putus sekolah

belum tersedia hingga tahun 2024, sehingga belum dapat dianalisis lebih lanjut. Secara umum, data ini mencerminkan upaya yang konsisten dari Kabupaten Kuningan dalam menekan angka putus sekolah, khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.

Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah. Di kabupaten Kuningan sejak tahun 2020 angka kelulusan sudah mencapai 100 persen.

Tabel 2.45 Angka Kelulusan Tahun 2020-2024 dalam persen

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sekolah Dasar (SD/MI)	100	100	100	100	100
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan 2025

*Ket : *) SMA Ditarik ke esehat Provinsi*

2. Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi

Pada tahun 2020, AKB tercatat sebesar 4,14 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian menurun menjadi 2,95 pada tahun 2021, yang menunjukkan perbaikan kondisi kesehatan bayi pada masa itu. Namun, angka ini kembali meningkat cukup tajam menjadi 5,13 pada tahun 2022, dan melonjak drastis hingga mencapai 9,25 pada tahun 2023. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 8,46, angka tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.46 Angka Kematian Bayi
Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Bayi per Tahun	4,14	2,95	5,13	9,25	8,46

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, 2025

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kesehatan adalah pelayanan dasar yang harus dipastikan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, termasuk seorang ibu hamil harus dipastikan kesehatannya.Banyak kematian perempuan terjadi pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya.

Informasi mengenai tingginya *Mumps Measles Rubella* (MMR) akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kuningan menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 27 kasus kematian ibu, yang kemudian meningkat tajam menjadi 42 kasus pada tahun 2021. Namun, sejak saat itu terjadi penurunan yang konsisten setiap tahunnya, yakni menjadi 24 kasus pada 2022, lalu 21 kasus di tahun 2023, dan terus menurun hingga mencapai 13 kasus pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam layanan kesehatan ibu, termasuk dalam hal akses persalinan yang aman, pemantauan kehamilan, serta peningkatan peran tenaga kesehatan dalam penanganan risiko kehamilan dan persalinan. Meskipun capaian ini positif, upaya peningkatan mutu layanan kesehatan ibu tetap perlu dilanjutkan agar angka kematian ibu dapat ditekan lebih rendah lagi ke depannya.

Tabel 2.47 Angka Kematian Ibu
Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus Kematian Ibu (kasus per 100 ribu)	27	42	24	21	13

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, 2025

c. Persentase Balita Stunting

Persentase balita stunting di Kabupaten Kuningan mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, prevalensi balita stunting tercatat sebesar 7,38%, lalu menurun menjadi 6,21% pada tahun 2021. Namun, angka ini kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 6,6% di tahun 2022, dan melonjak lebih tinggi menjadi 7,81% pada tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa setelah sempat mengalami perbaikan, masalah stunting kembali meningkat dan memerlukan perhatian lebih serius, terutama dalam hal pemenuhan gizi ibu dan anak, pelayanan kesehatan dasar, serta edukasi keluarga..

Tabel 2.48 Persentase Balita Stunting di Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Balita Stunting	7,38	6,21	6,6	7,81	n/a

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, 2025

d. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam hal penyediaan air minum, akses air minum layak mengalami peningkatan dari 88,12% pada tahun 2020 menjadi 91,1% pada 2022, meskipun sedikit menurun ke 90,98% di tahun 2023. Sementara itu, akses air minum melalui sistem perpipaan masih relatif stagnan, dengan kisaran antara 34% hingga 36% selama empat tahun terakhir. Di sisi lain, persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menunjukkan tren membaik secara umum, meski sempat turun ke 89,89% di tahun 2021, kemudian meningkat kembali hingga mencapai 93,99% pada tahun 2023.

Tabel 2.49 Kondisi Sarana Prasarana Lingkup Pekerjaan Umum di Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kemantapan Jalan dan Jembatan	Persen	76,5	79.063	80,699	82,357	82,352

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	Persen	60,93	60,93	62,23	63,81	66,97
3	Akses Air Minum Layak	Persen	88,12	88,23	91,1	90,98	91,75
4	Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	Persen	93,25	89,89	93,65	93,99	96,68
5	Akses Air Minum Perpipaan (%)	Persen	34,65	36,69	35,87	35,8	n/a

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan, 2025

Rencana Tata Ruang Kabupaten Kuningan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031. Sejak tahun 2016 sampai sekarang, RTRW Kabupaten Kuningan sedang dalam proses revisi lima tahunan pertama sejak ditetapkan.

Selama periode tahun 2020 hingga 2023, Kabupaten Kuningan menunjukkan kemajuan dalam pembangunan infrastruktur dasar di sektor pekerjaan umum. Persentase kemantapan jalan dan jembatan meningkat dari 76,5% pada tahun 2020 menjadi 82,36% pada tahun 2023, menunjukkan peningkatan kualitas konektivitas antar wilayah di daerah tersebut. Kondisi jaringan irigasi juga mengalami perbaikan, dari 60,93% jaringan dalam kondisi baik pada tahun 2020 dan 2021, menjadi 63,81% pada tahun 2023, yang mencerminkan upaya peningkatan sistem pengairan bagi sektor pertanian.

Salah satu kebijakan tata ruang yang bersifat strategis dalam revisi RTRW, antara lain telah merencanakan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan ekonomi berupa KSK Pariwisata Waduk Darma dan sekitarnya

serta KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kebun Raya Kuningan dan sekitarnya di Kecamatan Pasawahan.

e. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kuningan terus berkembang sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk hingga ke perdesaan. Namun, perkembangannya belum sepenuhnya sesuai dengan data backlog dan standar permukiman yang layak huni, terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah.

Kondisi hunian di Kabupaten Kuningan menunjukkan perbaikan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2023. Persentase rumah layak huni meningkat dari 95,57% pada tahun 2020 menjadi 97% pada tahun 2021, dan terus naik menjadi 97,54% pada tahun 2023. Capaian ini mencerminkan upaya nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perumahan masyarakat, baik melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan perumahan baru yang sesuai standar, maupun peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana dasar.

Tabel 2.50 Rumah Layak Huni Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2023 dalam Persen

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase rumah layak huni	Persen	95,57	97	97,21	97,54	96,42

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2025

f. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Kuningan terus menunjukkan upaya peningkatan dalam hal ketertiban umum dan penanggulangan bencana selama periode 2020 hingga 2023. Tingkat penyelesaian pelanggaran terhadap prinsip Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan (K3) menunjukkan tren positif, dari 83% pada tahun 2020 menjadi 86% di tahun 2023. Di sisi lain, kesiapsiagaan dan upaya pencegahan dalam rangka pengurangan risiko bencana juga mengalami peningkatan signifikan, dengan persentase naik dari 85% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2023, menunjukkan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana.

Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana juga menunjukkan perbaikan, meskipun sempat menurun dari 85% pada tahun 2020 menjadi 80% di tahun 2021, namun kembali meningkat hingga 97% pada tahun 2023. Sementara itu, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) justru mengalami penurunan dari 0,86 di tahun 2020 menjadi 0,64 pada tahun 2023, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga ketahanan wilayah secara menyeluruh. Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk juga menunjukkan fluktuasi cukup tajam, dari hanya 2 desa pada 2020–2021, melonjak menjadi 30 desa pada 2022, namun kembali menurun drastis menjadi 5 desa pada tahun 2023.

Tabel 2.51 Kondisi Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persen	83	84	84	86	86
2	Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana	%	85	92,31	92	100	100
3	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana	%	85	80	81	97	100
4	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai	0,86	0,88	0,68	0,64	0,68
5	Jumlah Desa Tangguh yang terbentuk	Desa	2	2	30	5	18

Sumber : Sat Pol PP Kab Kuningan dan BPBD Kab. Kuningan, 2025

g. Sosial

Kemiskinan masih menjadi tantangan besar Pemerintah Kabupaten Kuningan saat ini, dan hal itu rentan memunculkan persoalan-persoalan sosial. Dinas Sosial mencatat beberapa persoalan sosial yang ada, antara lain tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.52 Kondisi Indikator Sosial di Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	Sarana Sosial seperti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Panti	35	2	92	8
2	Persentase Penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	80,02	13,39	24,09	63,93
3	PMKS yang memperoleh bantuan social	Persen	70,8	10,29	86,82	93,91
4	Jumlah PMKS yang ditangani	PMKS	53.423	10.223	126.779	190.747

Sumber: Dinas Sosial Kab. Kuningan, 2025

Data kesejahteraan sosial di Kabupaten Kuningan dalam kurun waktu 2020 hingga 2023 menunjukkan dinamika , baik dari sisi penyediaan sarana sosial maupun penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi mengalami fluktuasi tajam, dari 35 panti pada tahun 2020 turun drastis menjadi hanya 2 panti pada 2021, kemudian melonjak menjadi 92 pada 2022, namun kembali menurun menjadi 8 panti pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan adanya perubahan kebijakan atau pembaruan data yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Persentase penyandang disabilitas, lansia tidak potensial, dan kelompok rentan lainnya yang telah menerima jaminan sosial juga menunjukkan ketidakkonsistenan dari tahun ke tahun. Pada 2020, cakupan penerima mencapai 80,02%, namun turun drastis menjadi 13,39% di tahun 2021. Angka ini kembali meningkat menjadi 63,93% pada tahun 2023, menandakan perbaikan dalam pelaksanaan program jaminan sosial. Hal serupa juga terlihat pada indikator PMKS yang memperoleh bantuan sosial, yang meningkat pesat dari hanya 10,29% pada 2021 menjadi 93,91% pada 2023.

Jumlah PMKS yang ditangani meningkat signifikan dari 53.423 orang pada tahun 2020 menjadi 190.747 orang pada tahun 2023. Lonjakan ini dapat diartikan sebagai hasil dari peningkatan jangkauan program sosial serta pendataan yang lebih menyeluruh terhadap kelompok rentan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi yang cukup besar pada beberapa indikator, tren data menunjukkan adanya peningkatan kepedulian dan penanganan terhadap kelompok rentan dan PMKS di Kabupaten Kuningan.

h. Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan persentase

angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio ini menggambarkan partisipasi angkatan kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin.

Tabel 2.53 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	81,59	38,63	67	33	81,59	38,63	39,62	19,03	40.94	20,38
(persen) TPAK (L+P) (persen)	60,01		60,23		57,69		58,65		61,31	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kuningan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kuningan mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, TPAK total (Laki-laki dan Perempuan) tercatat sebesar 81,59%, dengan partisipasi laki-laki sebesar 38,63% dan perempuan sebesar 33%. Angka ini mengalami penurunan di tahun 2021, dengan total TPAK mencapai 67%, namun dengan kontribusi laki-laki yang tetap tinggi di angka 39,62% dan perempuan yang berpartisipasi lebih sedikit, yakni 19,03%. Pada tahun 2022, TPAK kembali mengalami fluktuasi dengan total 81,59%, dengan kontribusi laki-laki 38,63% dan perempuan sedikit meningkat menjadi 40,94%. Namun, di tahun 2023, TPAK total mengalami sedikit penurunan lagi dengan kontribusi laki-laki sebesar 39,62% dan perempuan 20,38%.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi variasi pada partisipasi masing-masing gender, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Kuningan menunjukkan adanya perubahan yang perlu diperhatikan untuk menciptakan kesetaraan peluang kerja antara laki-laki dan perempuan. Untuk TPAK total, angka ini tercatat stabil di sekitar angka 60%, dengan sedikit peningkatan dari 60,01% pada tahun 2020 menjadi 61,31% pada tahun 2024, mencerminkan usaha untuk meningkatkan angka partisipasi angkatan kerja secara keseluruhan.

i. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mainstreaming keadilan gender sudah mulai kuat menjadi perspektif dalam kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah. Prinsip inklusi sosial yang menjadi perspektif dalam penyusunan RPJMD ini salah satunya turut

memperhatikan ruang-ruang yang memungkinkan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di daerah, baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Kuningan menunjukkan peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, IPG tercatat sebesar 86,81, dan mengalami sedikit kenaikan menjadi 86,97 pada tahun 2021. Tren positif ini berlanjut, dengan IPG mencapai 87,17 pada tahun 2022 dan 2023, serta diperkirakan meningkat menjadi 88,00 pada tahun 2024. Peningkatan IPG ini mencerminkan kemajuan dalam kesetaraan gender di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih optimal di semua aspek kehidupan.

Tabel 2.54 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kuningan 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
IPG	86,81	86,97	87,17	87,17	88,00

Sumber: Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025

j. Pangan

Pangan adalah kebutuhan utama bagi manusia untuk bertahan hidup, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban memastikan kecukupan pangan bagi penduduk. Ketersediaan pangan utama adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.

Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Kuningan menunjukkan tren yang bervariasi selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, ketersediaan pangan utama tercatat sebesar 261,17 kg per kapita per tahun, kemudian meningkat menjadi 274,21 kg pada tahun 2021 dan mencapai 293,61 kg pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, angka ini sedikit menurun menjadi 266,9 kg per kapita per tahun, meskipun tetap berada dalam rentang yang cukup baik untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat.

Tingkat konsumsi pangan lokal juga mengalami peningkatan . Pada tahun 2020, persentase konsumsi pangan lokal tercatat sebesar 37%, dan terus meningkat menjadi 40% pada tahun 2021, 45% pada tahun 2022, dan akhirnya mencapai 50% pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam program-program yang mendorong masyarakat untuk lebih mengkonsumsi produk pangan lokal, yang dapat mendukung ketahanan pangan daerah.

Selain itu, jumlah lumbung pangan di Kabupaten Kuningan menunjukkan perkembangan positif, dengan peningkatan jumlah lumbung pangan yang tercatat dari 0 pada tahun 2020 menjadi 5 pada tahun 2023. Hal ini menandakan adanya upaya yang lebih terorganisir untuk menyimpan dan mengelola cadangan pangan lokal guna memastikan ketersediaan pangan yang stabil.

Skor pola pangan harapan (PPH) di Kabupaten Kuningan juga mengalami hasil yang stabil dan baik. Skor PPH tercatat 82,4% pada tahun 2020 dan 2021, kemudian meningkat signifikan menjadi 93,2% pada tahun 2022 dan 2023, yang menunjukkan peningkatan dalam kualitas pola konsumsi pangan yang lebih bergizi dan seimbang di masyarakat.

Secara keseluruhan, Kabupaten Kuningan menunjukkan kemajuan yang baik dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan, konsumsi pangan lokal, dan pengelolaan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas pola konsumsi pangan di masyarakat. Data tahun 2024 belum tersedia untuk dianalisis lebih lanjut.

Tabel 2.55 Kondisi Indikator Pangan
di Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/kap./th	261,17	274,21	293,61	266,9
2	Tingkat Konsumsi Pangan Lokal	Persen	37	40	45	50
3	Lumbung Pangan	Buah	0	1	3	5
4	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	82,4	82,4	93,2	93,2

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kuningan menlansir data tentang desa-desa yang mengalami rawan pangan tahun 2024, sebagai berikut.

Tabel 2.56 Desa Rawan Pangan
Di Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Kecamatan	Desa
Karangkancana	Jabranti
Ciwaru	Sagaranten, Citikur
Cibingbin	Sukaharja
Cibeureum	Tarikolot
Cimahi	Sukajaya, Cimulya
Subang	Situgede, Jatisari
Selajambe	Padahurip, Selajambe, Ciberung, Kutawaringin, Jamberama
Cilebak	Legokherang, Bungurberes, Mandapajaya
Cidahu	Cihideunggirang, Kertawinangun, Bunder, Cibulan, Nanggela, Jatimulya
Kalimanggis	Kalimanggis Wetan, Kalimanggis Kulon
Hantara	Pakapasan Girang, Cikondang, Tundagan, Bunigeulis, Hantara
Kramatmulya	Karangmangu
Luragung	Benda
Pancalang	Patalagan, Sumbakeling, Tenjolayar
Japara	Wano
Maleber	Garahaji, Padamulya
Darma	Cimenga, Sukarasa, Tugumulya
Cipicung	Pamulihan, Suganangan, Muncangela
Ciawigebang	Lebaksiuh, Sukaraja
Pasawahan	Pasawahan
Nusaherang	Kertayuga, Windusari, Jambar
Kadugede	Sindangjawa, Cisukadana, Margabakti
Garawangi	Citiusari, Tembong, Sukaimut, Garawangi, Karamatwangi
Ciniru	Pinara, Cipedes, Rambatan, Longkewang, Mungkaldatar
JUMLAH	

Sumber: diolah dari data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kuningan, 2025

Berdasarkan data desa rawan pangan yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Kuningan, tercatat sebanyak 24 kecamatan yang memiliki desa dengan kondisi rawan pangan. Total terdapat 63 desa yang termasuk dalam kategori rawan pangan berdasarkan informasi yang dihimpun. Jumlah desa rawan pangan di setiap kecamatan bervariasi, yang mencerminkan tingkat kerentanan pangan yang berbeda-beda antar wilayah. Kecamatan yang tidak terdapat Desa Rawan Pangan sebanyak 8 kecamatan,

yaitu Cigandamekar, Cilimus, Kuningan, Lebakwangi, Cigugur, Jalaksana, Mandirancan dan Sindangagung.

Kecamatan yang memiliki jumlah desa rawan pangan terbanyak adalah Cidahu, dengan total 6 desa, yaitu Cihideunggirang, Kertawinangun, Bunder, Cibulan, Nanggela, dan Jatimulya. Menyusul di bawahnya adalah Selajambe, Hantara, Garawangi, dan Ciniru, yang masing-masing memiliki 5 desa rawan pangan. Tingginya jumlah desa rawan pangan di kecamatan-kecamatan ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam hal akses, ketersediaan, dan stabilitas pangan yang mungkin disebabkan oleh faktor geografis, ekonomi, atau infrastruktur yang belum merata.

k. Konsumsi Beras Perkapita

Data ketersediaan beras menunjukkan penurunan setiap tahunnya sebagaimana tergambar pada tabel di atas, akan tetapi sebaliknya, data konsumsi beras terus meningkat dari tahun ke tahun, yang menandakan ada ketergantungan masyarakat Kuningan terhadap beras, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.57 Konsumsi Beras perkapita (kg/kapita/tahun) di Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Beras perkapita (kg/kapita/tahun)	76,02	77,90	73,57	75,39	74,83

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kuningan, 2025

Konsumsi beras per kapita di Kabupaten Kuningan mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, konsumsi beras per kapita tercatat sebesar 76,02 kg per kapita per tahun. Angka ini sedikit meningkat menjadi 77,90 kg pada tahun 2021, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 73,57 kg. Pada tahun 2023, konsumsi beras kembali meningkat menjadi 75,39 kg, meskipun sedikit menurun lagi pada tahun 2024 menjadi 74,83 kg per kapita per tahun.

l. Pertanahan

Pengadaan tanah oleh pemerintah daerah merupakan salah satu prasyarat penting untuk terlaksananya pembangunan fisik. Sebelum proses pengadaan tanah seyogyanya dilakukan kajian atau studi kelayakan dengan mempertimbangkan aspek teknis, geografis, sosial budaya dan lingkungan.

Persentase bidang tanah yang bersertifikat milik Pemerintah Daerah (Pemda) di Kabupaten Kuningan menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, hanya 60% dari bidang tanah milik Pemda yang telah memiliki sertifikat. Angka ini turun menjadi 46% pada tahun 2021, namun kemudian meningkat tajam menjadi 73,89% pada tahun 2022, dan mencapai 81,97% pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang lebih intensif dalam menyelesaikan proses sertifikasi tanah yang dimiliki oleh Pemda.

Tabel 2.58 Persentase Bidang Tanah yang bersertifikat milik Pemda Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	Persentase Bidang Tanah yang bersertifikat milik Pemda	Persen	60	46	73,89	81,97

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Kuningan

m. Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup yang berkembang di Kabupaten Kuningan diantaranya berupa pencemaran air, persampahan, banjir dan longsor, perubahan fungsi lahan serta kebakaran hutan, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Meskipun dampak tersebut diatas belum meluas, namun perlu diupayakan penanganan secara serius yang melibatkan para pihak dan multi sektor, sejak perencanaan sampai pengawasan. Tidak kalah penting penyusunan database tentang kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Kuningan sangat dipelukan sebagai basis perencanaan pembangunan ke depan. Salah satu isu lingkungan yang terdokumentasikan saat ini adalah data tentang layanan persampahan disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.59 Kondisi Pengelolaan Sampah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pelayanan pengelolaan sampah	Ton	105.613,68	115.554,64	118.641,00	122.773
		Persen	72,49	77,11	83,09	89,36
	- Penanganan Sampah	Ton	95637	103.888	107.441	111.055
		Persen	55,94	60,11	61,09	61,75
	- Pengurangan Sampah	Ton	9.976,68	10.120,64	11.200	11.718,40
		Persen	16,55	18,1	22	27,61

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	67,04	68,91	66,93	71,11
	- Indeks Kualitas Air	Poin	48,89	50	51,11	53,83
	- Indeks Kualitas Udara	Poin	88,94	86,52	86,96	89,04
	- Indeks tutupan lahan	Poin	57,73	68,8	57,05	64,19

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan

Jumlah pelayanan pengelolaan sampah, yang tercatat sebanyak 105.613,68 ton pada tahun 2020, meningkat menjadi 122.773 ton pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan upaya yang lebih besar dalam mengelola sampah di wilayah ini. Persentase pelayanan pengelolaan sampah juga mengalami peningkatan yang konsisten, dari 72,49% pada tahun 2020 menjadi 89,36% pada tahun 2023.

Di sisi lain, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kuningan juga menunjukkan tren positif, dengan skor IKLH yang meningkat dari 67,04 pada tahun 2020 menjadi 71,11 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Air, yang tercatat 48,89 pada tahun 2020, terus meningkat menjadi 53,83 pada tahun 2023, sementara Indeks Kualitas Udara, yang relatif baik, tercatat 88,94 pada tahun 2020 dan mencapai 89,04 pada tahun 2023. Namun, Indeks Tutupan Lahan mengalami fluktuasi, dengan penurunan dari 68,8 pada tahun 2021 menjadi 57,05 pada tahun 2022, sebelum meningkat kembali menjadi 64,19 pada tahun 2023.

n. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Setiap warga negara berhak memiliki identitas diri, dan dalam rangka itu, Pemerintah Kabupaten menjalankan tugasnya dalam rangka memberikan pelayanan publik terkait administrasi kependudukan dengan memberikan kartu identitas diri kepada warganya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.60 Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Persen	89,14	94,6	100	99,94	98,34
2	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-eL.)	Persen	99,5	98,53	99,4	99,16	99,06

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	40,62	54,68	43,46	47,77	55,20
4	Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	82,97	84..21	85	85	85
5	Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 s.d 18 Tahun	Persen	91,86	92,67	94,21	96,07	96,36

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepemilikan dokumen identitas di Kabupaten Kuningan menunjukkan perkembangan selama periode 2020 hingga 2023, mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan administrasi kependudukan dan memberikan akses lebih luas kepada masyarakat terhadap dokumen penting.

Pada tahun 2020, persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK) tercatat sebesar 89,14%, dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 100% pada tahun 2022 dan sedikit turun menjadi 99,94% pada tahun 2023, menunjukkan hampir semua keluarga di Kabupaten Kuningan telah memiliki KK. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-eL) juga sangat tinggi, dengan angka 99,5% pada tahun 2020 dan tetap tinggi di atas 98% hingga 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 99,16% pada tahun 2023.

Untuk kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), yang dimulai dengan persentase 40,62% pada tahun 2020, angka ini meningkat signifikan menjadi 54,68% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, angka tersebut menurun menjadi 43,46% dan 47,77%, masing-masing, menunjukkan perlunya perhatian lebih untuk meningkatkan kesadaran dan akses terhadap pembuatan KIA.

Kepemilikan Akta Kelahiran juga mengalami peningkatan, dimulai dari 82,97% pada tahun 2020 dan mencapai 85% pada tahun 2023. Begitu pula dengan kepemilikan Akta Kelahiran untuk anak usia 0 hingga 18 tahun, yang meningkat secara stabil, dari 91,86% pada tahun 2020 menjadi 96,07% pada tahun 2023, mencerminkan semakin banyaknya anak yang terdaftar dengan akta kelahiran yang sah.

o. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kabupaten Kuningan menunjukkan kemajuan yang pesat selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, jumlah BUMDES tercatat sebanyak 185 unit, dan angka ini meningkat signifikan menjadi 349 unit pada tahun 2022 dan 2023. Peningkatan jumlah BUMDES ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam pemberdayaan ekonomi desa melalui pengelolaan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator pemberdayaan masyarakat desa disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.61 Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah BUMDES	Unit	185	229	349	349	
2	Status Desa :						
	- Tertinggal	DESA	4	0	0	0	0
	- Berkembang		220	165	116	48	0
	- Maju		115	160	183	218	215
	- Mandiri		22	36	62	95	134
3	PKK aktif	Persen	100	100	100	100	100
4	Posyandu Aktif	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: LKPJ AMJ Bupati

Terkait dengan status desa, pada tahun 2020, masih terdapat 4 desa yang tergolong desa tertinggal, namun pada tahun 2021 hingga 2023, status desa tertinggal berhasil dihapuskan, dengan semua desa mengalami peningkatan status. Desa yang berkembang menurun signifikan dari 220 desa pada tahun 2020 menjadi 0 desa pada tahun 2024, sementara desa yang maju mengalami peningkatan yang cukup pesat, dari 115 desa pada tahun 2020 menjadi 215 desa pada tahun 2024. Selain itu, jumlah desa mandiri juga meningkat, dari 22 desa pada tahun 2020 menjadi 134 desa pada tahun 2024, menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial desa.

Di sisi lain, kegiatan sosial yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat desa, seperti Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Posyandu, terus aktif dengan tingkat partisipasi yang sangat tinggi. PKK aktif di seluruh desa di Kabupaten Kuningan dengan persentase 100% pada setiap tahun, yang menunjukkan peran penting PKK dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga di desa. Demikian pula, Posyandu tetap beroperasi secara maksimal dengan 100% posyandu aktif pada setiap tahun, yang mendukung program kesehatan masyarakat dan tumbuh kembang anak.

p. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T; terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun). Selain itu, program KB juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Selain itu, KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan.

Tabel 2.62 Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	Prevelensi Pemakaian Kontrasepsi/ Contaceptive Prevalence Rate (CPR)	Persen	71,56	71,6	67,24	72,24
2	Persentase Angka Pasangan Usia Subur (PUS) Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	Persen	13,25	17,49	20,86	7,45
3	Rata-rata Usia Kawin Pertama (RKP) Wanita	Tahun	19	19	20	22.8

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan

Prevalensi pemakaian kontrasepsi atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR) di Kabupaten Kuningan mengalami sedikit fluktuasi dalam periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, persentase penggunaan kontrasepsi tercatat sebesar 71,56%, dan angka ini sedikit meningkat menjadi 71,6% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, prevalensi penggunaan kontrasepsi turun

menjadi 67,24%, sebelum kembali meningkat menjadi 72,24% pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan upaya yang konsisten untuk meningkatkan partisipasi keluarga dalam program keluarga berencana, meskipun terdapat penurunan pada tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Sementara itu, persentase pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi (unmet need) mengalami penurunan pada tahun 2023. Pada tahun 2020, unmet need tercatat sebesar 13,25%, yang meningkat menjadi 17,49% pada tahun 2021, dan terus meningkat menjadi 20,86% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, angka ini turun drastis menjadi 7,45%, menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan kontrasepsi bagi pasangan usia subur yang ingin ber-KB.

Adapun rata-rata usia kawin pertama (RKP) wanita di Kabupaten Kuningan mengalami peningkatan selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 hingga 2022, rata-rata usia kawin pertama wanita tercatat stabil di angka sekitar 19 tahun, namun pada tahun 2023, angka tersebut meningkat menjadi 22,8 tahun. Peningkatan ini dapat mencerminkan perubahan dalam pola pernikahan yang semakin mengarah pada pernikahan yang lebih matang, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga.

q. Perhubungan

Sarana prasarana dan fasilitas perhubungan di Kabupaten kuningan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.63 Ketersediaan Fasilitas Perhubungan Kabupaten KuninganTahun 2020-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persen	58	59	-	49

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Kuningan

Berkaitan dengan isu perhubungan yang dapat dianggap krusial di Kabupaten Kuningan saat ini adalah penataan lahan parkir, terutama pada kawasan wisata dan disekitar jalan protokol ketika banyak pengunjung.

r. Komunikasi dan Informatika

Jumlah Base Transceiver Station (BTS) di Kabupaten Kuningan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, mencerminkan usaha yang terus-menerus dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan telekomunikasi di wilayah ini. Pada tahun 2020, jumlah BTS tercatat sebanyak 283 unit, dan angka ini meningkat menjadi 319 unit pada tahun 2021. Peningkatan terus berlanjut, dengan jumlah BTS mencapai 325 unit pada tahun 2022, dan terus bertambah menjadi 346 unit pada tahun 2023.

Peningkatan jumlah BTS ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperluas cakupan layanan telekomunikasi, yang penting untuk mendukung konektivitas masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan. Pemasangan BTS yang terus meningkat ini juga mendukung perkembangan ekonomi, pendidikan, serta sektor-sektor lainnya yang bergantung pada akses internet dan komunikasi yang stabil.

Data untuk tahun 2024 belum tersedia, namun berdasarkan tren yang ada, diharapkan jumlah BTS akan terus bertambah untuk meningkatkan pelayanan telekomunikasi di Kabupaten Kuningan.

Tabel 2.64 Kondisi BTS Kabupaten Kuningan Tahun 2020 – 2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	Jumlah BTS	BTS	283	319	325	346

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kuningan

s. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Sektor KUKM merupakan sektor strategis yang dapat menumbuhkan insentif ekonomi dalam masyarakat sekaligus menyerap tenaga kerja. Serta mampu menggerakan perekonomian masyarakat. Pembinaan koperasi dan UKM diarahkan kepada aspek Sumber Daya Manusia (SDM), pemasaran, permodalan, kelembagaan, serta teknologi dan informasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Kuningan mengalami perkembangan dalam sektor wirausaha dan UMKM. Pada tahun 2020, jumlah wirausahawan tercatat sebanyak 100 orang, dan angka ini meningkat pesat

menjadi 262 orang pada tahun 2021, meskipun sedikit turun menjadi 220 orang pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, jumlah wirausahawan melonjak lagi mencapai 480 orang, sebelum mengalami penurunan menjadi 160 orang pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya dorongan terhadap kewirausahaan meskipun fluktuasi angka menunjukkan tantangan dalam mempertahankan jumlah wirausahawan.

Jumlah UMKM yang dibina juga mengalami kenaikan yang pesat, dari hanya 100 UMKM pada tahun 2020, meningkat tajam menjadi 1.317 UMKM pada tahun 2022, sebelum turun menjadi 400 pada tahun 2023 dan 252 pada tahun 2024. Meskipun terdapat penurunan dalam jumlah UMKM yang dibina pada tahun-tahun terakhir, ini dapat mencerminkan perubahan dalam prioritas program pembinaan dan evaluasi terhadap UMKM yang perlu mendapatkan pendampingan lebih lanjut. Di sisi lain, jumlah koperasi aktif terus meningkat setiap tahunnya, dari 460 koperasi pada tahun 2020 menjadi 573 koperasi pada tahun 2024, yang menunjukkan stabilitas dan keberlanjutan sektor koperasi di Kabupaten Kuningan.

Sementara itu, perkembangan legalitas produk UMKM juga menunjukkan kemajuan. Jumlah produk UMKM yang memiliki legalitas PIRT meningkat tajam dari 40 produk pada tahun 2020 menjadi 369 produk pada tahun 2024. Demikian pula, legalitas produk halal mengalami lonjakan yang luar biasa, dari 40 produk pada tahun 2020 menjadi lebih dari 1.000 produk pada tahun 2022, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan hanya satu produk yang tercatat. Selain itu, UMKM yang memiliki akses pasar di luar daerah juga menunjukkan peningkatan yang stabil, dari 400 UMKM pada tahun 2020 menjadi 523 UMKM pada tahun 2024, yang mencerminkan semakin luasnya jaringan pasar bagi produk-produk lokal. Perkembangan KUKM di Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada tabel yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.65 Indikator kinerja KUKM Kabupaten Kuningan
Tahun 2020 - 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Wirausahawan (org)	100	262	220	480	160
Jumlah UMKM yang dibina (buah)	100	464	1.317	400	252

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Koperasi Aktif (buah)	460	491	492	520	573
Jumlah Koperasi Sehat (buah)	60	75	75	50	85
Jumlah Koperasi yang dibina (buah)	490	515	100	100	799
Jumlah Koperasi yang memberikan pelayanan terhadap usaha UMKM (Buah)	456	465	10	30	30
Jumlah Produk UMKM yang memiliki legalitas produk PIRT (produk)	40	65	100	269	369
Jumlah Produk UMKM yang memiliki legalitas produk Halal (produk)	40	34	1.028	1.104	1
Jumlah UMKM yang memiliki akses pasar di luar daerah (buah)	400	500	500	500	523

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan

t. Penanaman Modal

Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan pengertian penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan penanaman modal dapat dicapai tujuan seperti mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan pengembangan daerah tertinggal.

Tabel 2.66 Jumlah Nilai Investasi dan Kerjasama Investasi Kabupaten Kuningan Tahun 2020 – 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah nilai investasi (Rp. 000)	383.012.406.831	1.800.363.869.952	7.004.865.478.704	8.884.931.828.574	16.426.903.363.817
Jumlah kerjasama investasi					

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan

Dalam periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Kuningan menunjukkan tren yang sangat positif dalam hal nilai investasi. Pada tahun 2020, jumlah nilai investasi tercatat sebesar Rp 383.012.406.831, yang mencerminkan kontribusi awal sektor investasi terhadap perekonomian daerah. Namun, angka tersebut mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2021, dengan jumlah nilai investasi mencapai Rp 1.800.363.869.952. Peningkatan tajam ini mencerminkan upaya pemerintah daerah yang semakin intens dalam menarik investor dan meningkatkan minat investasi di wilayah tersebut.

Pada tahun 2022, nilai investasi mengalami lonjakan lebih besar lagi, mencapai Rp 7.004.865.478.704, dan pada tahun 2023, nilainya semakin meningkat menjadi Rp 8.884.931.828.574. Peningkatan yang konsisten ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kuningan berhasil menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi para investor, yang juga berkontribusi pada pengembangan sektor-sektor industri dan infrastruktur di daerah ini. Pada tahun 2024, nilai investasi mencapai angka yang sangat tinggi, yakni Rp 16.426.903.363.817, yang menjadi bukti jelas dari semakin berkembangnya perekonomian dan potensi investasi di Kabupaten Kuningan.

u. Kebudayaan

Kabupaten Kuningan menunjukkan komitmennya dalam pelestarian seni, budaya, dan sejarah dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus pada pemeliharaan kekayaan budaya. Pada tahun 2020 hingga 2022, penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya berlangsung secara konsisten dengan 12 kegiatan yang diadakan setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2023, jumlah kegiatan festival berkurang menjadi hanya 4 kegiatan, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal atau kebijakan yang membatasi pelaksanaan acara seni dan budaya di daerah tersebut.

Selain itu, sarana untuk penyelenggaraan seni dan budaya tetap terjaga dengan stabil, di mana pada setiap tahun antara 2020 hingga 2023, jumlah sarana yang tersedia tetap tercatat sebanyak 2 unit. Keberadaan sarana ini mendukung keberlangsungan berbagai kegiatan budaya yang diadakan di Kabupaten Kuningan, meskipun pada tahun 2024 data untuk sarana belum tersedia.

Di sisi lain, Kabupaten Kuningan juga tetap berkomitmen penuh dalam melestarikan benda, situs, dan kawasan cagar budaya. Setiap tahun, pelestarian ini tercatat dengan persentase 100%, menunjukkan upaya maksimal dari pemerintah dan masyarakat dalam menjaga warisan budaya yang ada. Data untuk tahun 2024 mengenai benda, situs, dan kawasan cagar budaya belum tersedia, tetapi angka stabil 100% dari tahun sebelumnya mencerminkan keseriusan dalam upaya pelestarian budaya.

Tabel 2.67 Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Tahun 2020 - 2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	12	12	12	4
2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Sarana	2	2	2	2
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan

v. Persandian

Persandian Kabupaten Kuningan menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika yang bersinergi dengan pemerintah Provinsi dan Pusat dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya urusan persandian lebih dititikberatkan kepada pengamanan dan pengelolaan informasi Pemerintahan Daerah.

Persentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian di Kabupaten Kuningan menunjukkan fluktuasi antara tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, angka ini tercatat sebesar 18%, kemudian meningkat menjadi 27,8% pada tahun 2021, menunjukkan peningkatan upaya dalam pengamanan informasi. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, angka tersebut menurun drastis menjadi 3,14%, yang mungkin dipengaruhi oleh perubahan kebijakan atau prioritas dalam pengelolaan informasi. Meskipun demikian, pengamanan informasi tetap menjadi aspek penting dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data pemerintah daerah. Data untuk tahun 2024 belum tersedia, namun diharapkan langkah-langkah pengamanan informasi tetap diperkuat.

Tabel 2.68 Kondisi Persandian Kabupaten Kuningan Tahun 2020 – 2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	Persentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian	Persen	18	27,8	3,14	3,14

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kuningan

w. Perpustakaan

Koleksi buku di perpustakaan daerah terus mengalami peningkatan jumlah, pada tahun 2018 jumlah buku bertambah cukup banyak, begitu juga terjadi peningkatan jumlah pengunjung secara signifikan di tahun yang sama. sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.69 Data Perpustakaan di Kabupaten Kuningan 2020-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	3032	4290	13719	10.446
2	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan	Eksemplar	22802	24742	24742	29.005

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Kuningan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, tercatat 3.032 pengunjung, yang kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 4.290 pengunjung. Lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2022, dengan jumlah pengunjung mencapai 13.719 orang. Namun, pada tahun 2023, jumlah pengunjung mengalami penurunan menjadi 10.446 orang, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sosial atau kondisi eksternal lainnya.

Sementara itu, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan juga mengalami peningkatan yang stabil. Pada tahun 2020, jumlah eksemplar buku tercatat sebanyak 22.802, yang meningkat menjadi 24.742 pada tahun 2021. Jumlah ini tetap stabil hingga tahun 2022, namun pada tahun 2023, koleksi buku bertambah menjadi 29.005 eksemplar. Peningkatan ini menunjukkan komitmen perpustakaan untuk terus memperkaya koleksi buku, sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi dan referensi bagi masyarakat Kabupaten Kuningan.

x. Kearsipan

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kabupaten Kuningan mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, persentase ini tercatat sebesar 75%, dan terus meningkat menjadi 80% pada tahun 2021, 85% pada tahun 2022, dan

mencapai 90% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan komitmen yang terus berkembang dalam pengelolaan arsip secara profesional dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Tabel 2.70 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Di Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	75	80	85	90
2	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	1	1	5	2

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan

2.3.2. Layanan Urusan Pilihan

A. Layanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah di Provinsi Jawa Barat. Urusan pilihan meliputi pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan.

1. Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Kuningan adalah jenis perikanan darat atau air tawar. Meski sektor perikanan bukan menjadi unggulan daerah, akan tetapi sektor ini menjadi penyangga pangan daerah. Capaian produksi perikanan menunjukkan *trend* yang positif setiap tahunnya sehingga dapat menjadi usaha ekonomi produktif tradisional masyarakat di perairan lahan milik maupun diperairan umum.

Pengembangan sektor perikanan dilaksanakan melalui pembinaan, penyediaan bibit unggul, *re-stocking* benih ikan di perairan umum dan pelarangan eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya ikan di perairan umum.

Sarana dan prasarana perikanan di Kabupaten Kuningan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, tercatat 37 unit sarana dan prasarana perikanan, yang kemudian meningkat menjadi 40 unit pada tahun 2021. Peningkatan lebih lanjut terjadi pada tahun

2022, dengan jumlah mencapai 55 unit, dan pada tahun 2023, jumlahnya melonjak menjadi 100 unit. Namun, pada tahun 2024, jumlah sarana dan prasarana perikanan mengalami penurunan menjadi 21 unit, yang mungkin dipengaruhi oleh perubahan kebijakan atau kondisi lain yang memengaruhi sektor ini.

Di sisi lain, produksi ikan di Kabupaten Kuningan terus menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Pada tahun 2020, total produksi ikan tercatat sebanyak 21.627 ton, yang meningkat menjadi 22.981 ton pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dan 2023, produksi ikan terus mengalami peningkatan masing-masing menjadi 24.567 ton dan 26.957 ton. Pada tahun 2024, diperkirakan produksi ikan akan mencapai 27.523 ton, menunjukkan sektor perikanan yang terus berkembang meskipun ada penurunan jumlah sarana prasarana.

Tabel 2.71 Sarana Prasarana Perikanan di Kabupaten Kuningan Tahun 2020 - 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Sarana prasarana Perikanan (Unit)	37	40	55	100	21
Produksi ikan (Ton)	21.627	22.981	24.567	26.957	27.523

Sumber : Dinas Perikanan dan Perternakan Tahun 2025

2. Pariwisata

Pariwisata adalah salah satu sektor yang sangat srategis di Kabupaten Kuningan, mengingat ada banyak sumber daya alam yang sudah terkelola dengan baik dan mendatangkan banyak wisatawan. Selain wisata alam, ada juga wisata budaya, sejarah dan wisata buatan lainnya, yang secara perlahan sudah mulai bergerak maju.

Perkembangan sarana pariwisata di Kabupaten Kuningan menunjukkan peningkatan yang signifikan pada sektor perhotelan dari tahun 2020 hingga 2023. Jumlah hotel berbintang tercatat terus meningkat, dengan hotel berbintang 4 mengalami penambahan satu unit pada tahun 2023, mencapai total satu hotel. Hotel berbintang 3 tetap stabil dengan jumlah 3 unit dari tahun 2020 hingga 2023, sementara hotel berbintang 2 dan 1 juga tetap konstan, masing-masing sebanyak dua dan satu unit. Pada tahun 2024,

jumlah hotel berbintang diperkirakan akan mencapai delapan unit, dengan penambahan hotel berbintang 3 dan 4.

Sementara itu, jumlah hotel non-bintang juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil, dengan peningkatan dari 126 unit pada tahun 2020 menjadi 155 unit pada tahun 2023, meskipun sedikit mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 153 unit. Restoran dan rumah makan juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari 63 unit pada tahun 2020 menjadi 89 unit pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan perkembangan sektor pariwisata yang semakin berkembang di Kabupaten Kuningan, diiringi dengan peningkatan fasilitas yang mendukung kebutuhan wisatawan.

Kekayaan potensi wisata di Kabupaten Kuningan menarik banyak wisatawan masuk ke Kabupaten Kuningan, dan berdampak pada semakin maraknya berdiri sarana dan prasaran pendukung, seperti: hotel, penginapan, homestay, restoran dan lain-lain, yang jumlahnya bertambah dari tahun ke tahun, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.72 Potensi Sarana Prasarana Pariwisata di Kabupaten Kuningan Tahun 2020 - 2024

No	Sarana	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Hotel Berbintang	6	6	6	7	8
	a. 4					1
	b. 3	3	3	3	4	4
	c. 2	2	2	2	2	2
	d. 1	1	1	1	1	1
2	Hotel Non Bintang	126	131	154	155	153
3	Restoran/Rumah Makan	63	70	71	85	89

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 2025

Jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Kuningan menunjukkan tren positif dengan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, kunjungan tercatat sebanyak 2.480.718 orang dan meningkat menjadi 2.668.442 orang pada tahun 2021. Puncaknya terjadi pada tahun 2022, dengan 3.448.917 orang, mencerminkan pemulihan sektor pariwisata setelah pandemi. Meskipun pada tahun 2023 jumlah kunjungan sedikit menurun menjadi 2.785.126 orang, namun pada tahun 2024, jumlah kunjungan kembali melonjak mencapai 3.824.520 orang, menandakan keberhasilan dalam pemulihan dan peningkatan daya tarik destinasi wisata di Kabupaten Kuningan.

Tabel 2.73 Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Kuningan Tahun 2020 - 2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kunjungan Wisata	2.480.718	2.668.442	3.448.917	2.785.126	3.824.520

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 2025

3. Pertanian

Menurut data BPS Kabupaten Kuningan, produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya di Kabupaten Kuningan tetap stabil sepanjang periode 2020 hingga 2024, dengan rata-rata 6,19 ton per hektar setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, khususnya produksi padi, memiliki konsistensi yang baik dalam menghasilkan bahan pangan utama, meskipun terdapat tantangan yang dihadapi oleh para petani.

Namun, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) mengalami sedikit penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, kontribusinya tercatat sebesar 24,6%, dan terus menurun menjadi 23,9% pada tahun 2021, 23,8% pada tahun 2022, 23,7% pada tahun 2023, hingga mencapai 23,2% pada tahun 2024. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh diversifikasi sektor ekonomi Kabupaten Kuningan yang semakin berkembang, dengan sektor lain yang turut berkontribusi lebih besar terhadap PDRB.

Tabel 2.74 Produktivitas dan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kuningan Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton)	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19
2	Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB (%)	24,6%	23,9%	23,8%	23,7%	23,2%

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan

4. Kehutanan

Kabupaten Kuningan memiliki sumberdaya hutan yang melimpah, yang penyebaran sumberdaya tersebut hampir di seluruh kecamatan. Potensi

kehutanan yang dimiliki oleh Kabupaten Kuningan diantaranya, yaitu hutan negara seluas 33.479,92 ha terdiri atas :

a. Taman Nasional Gunung Ciremai 8.837 Ha

b. Hutan produksi 24.634 Ha

c. Taman Wisata Alam Linggarjati 8,92 Ha

Selain hutan Negara terdapat juga hutan rakyat yang tersebar di seluruh kecamatan dengan luas 8.021 Ha.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Kuningan memiliki beberapa potensi sumber daya energi dan mineral, diantaranya:

a. Sumberdaya mineral yang meliputi pasir, andesit, bentonit, onyx dan marmer, sirtu, kaolin, diatomit, tras, kalsit, batu gamping dan emas yang hampir semuanya telah diusahakan/ditambang, sehingga kegiatan pertambangan berpotensi untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Kuningan.

b. Potensi energi baru terbarukan yang sedang menjadi sorotan adalah potensi Panas Bumi/Geothermal yang berada di Desa Sangkanurip Kecamatan Cigandamekar, Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya, Desa Ciniru Kecamatan Jalaksana, dan yang terletak di Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.

Pemanfatan bahan galian yang sudah intensif dilakukan terutama adalah bahan galian golongan C, yang lokasinya tergambar sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.75 Potensi Bahan Galian C di Kabupaten Kuningan

No	Jenis	Kecamatan	Desa	Kriteria Cadangan	Ket.
1	Batu Gamplin	Luragung	Gunungkarung	Sumberdaya	
			Cirahayu		
			Luragung		
2	Bentonit	Luragung	Cikaduwetan	Tereka 490 m3	
		Cimahi	Karangkancana		
		Ciawigebang	Bendungan	Sumberdaya	

No	Jenis	Kecamatan	Desa	Kriteria Cadangan	Ket.
3	Kalsit	Ciniru	Rambatan	Sumberdaya	
4	Lempung	Ciniru	Bunigeulis, Tundagan	Sumberdaya	
5	Andesit	Jalaksana	Sidamulya	Cadangan Hipotenik	Tambang Rakyat
		Cigugur	Cisantana	251.583.445 m3	
6	Diatomit	Darma	Wadukdarma,	Hipotenik	
			Kawahmanuk	25,000 Tons	
7	Kaolin	Luragung	Margamukti	Hipotenik	
				25,000 Tons	
8	Onyx	Ciniru	Ciniru, Rambatan,	Sumberdaya	
			Cipedak		
9	Pasir	Cigugur	Cisantana	Cadangan Hipotenik	Tambang Rakyat
	Gunung Api	Cilimus	Linggasana, Linggajati	Cadangan Hipotenik	
		Mandirancan	Mandirancan,	50.606.950 Ton	
			Kertawinangun		
		Pasawahan	Cibuntu, Singkup		
10	Pasir	Cidahu	S. Ciparay, S. Ciberes, S. Cisanggarung, S. Cihirup		
		Ciawigebang		Sumberdaya telah diusahakan	
		Lebakwangi			
		Luragung			
11	Sirtu	Garawangi	S. Cisanggarung	Cadangan Hipotenik	
		Ciniru	S. Cipedak	650.000 m3	
12	Tras	Jalaksana	Nanggerang	Sumberdaya	
13	Emas	Ciniru	Citapen	Sumberdaya	
		Hantara	Gunungmanik	Sumberdaya	KP
		Lebakwangi	Cipakem		Penelitian
14	Panas bumi/ Geothermal	Cigandamekar	Sangkanurip	Sumberdaya	Dalam proses oleh Dep. ESDM
		Kramatmulya	Pajambon	Sumberdaya	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, 2018

6. Perdagangan

Berdasarkan data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar tradisional di Kabupaten Kuningan, tercatat bahwa pada tahun 2020 pendapatan mencapai 502.993 ribu rupiah. Nilai ini mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 466.562 ribu rupiah dan kembali sedikit menurun pada tahun 2022 sebesar 462.173 ribu rupiah. Namun, pada tahun 2023

terdapat kenaikan kembali menjadi 468.051 ribu rupiah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.76 Target dan Realisasi PAD dari Pasar Kabupaten Kuningan

Pasar	2020 (ribu rupiah)	2021 (ribu rupiah)	2022 (ribu rupiah)	2023 (ribu rupiah)
Pasar Kepuh	296.648	275.450	276.277,5	276.487
Pasar Baru	170.045	162.120	170.617,5	170.617,5
Pasar Cilimus				
Pasar Ciputat	31.500	13.125		
Pasar Kadugede	4.800	4.800	4.800	16.146
Pasar Langlangbuana		11.067	10.478	4.800

Sumber: Bappenda Kab. Kuningan

7. Perindustrian

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Kuningan relatif stabil dengan sedikit fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, kontribusi sektor industri tercatat sebesar 2,2%, kemudian meningkat sedikit menjadi 2,3% pada tahun 2021 dan kembali menjadi 2,2% pada tahun 2022, sebelum mencapai 2,3% lagi pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri terus memberikan sumbangan penting terhadap ekonomi daerah, meskipun kontribusinya tetap berada dalam kisaran yang stabil.

Tabel 2.77 Data Sektor Industri Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	2,2%	2,3%	2,2%	2,2%	2,3%
2	Pertumbuhan Industri	9,2	12,2	13	8,3	2
3	Industri besar	2	2	4	3	3
4	Industri menengah	1	1	0	0	1
5	Industri kecil dan mikro	420	420	3.961	6.466	8.592

Sumber : Kuningan Satu Data, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, PDRB, dan SUSEDA

8. Transmigrasi

Kabupaten Kuningan adalah kabupaten yang dikenal dengan jumlah migrasi yang tinggi, namun mayoritas adalah transmigrasi yang sifatnya tidak resmi dan tidak tercatat oleh Pemerintah Kabupaten. Sedangkan transmigran

yang resmi dan tercatat jumlahnya sangat sedikit, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.78 Jumlah Transmigran
Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024

No	Transmigran	Tahun				
		2020	2021	2022	**2023**	**2024**
		Orang				
1	Jumlah Transmigran yang Dibina	40	40	100	42 (Provinsi)	-
2	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan secara resmi oleh Pemkab	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kertja dan Transmigrasi 2025

2.3.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan

Pelaksanaan fungsi perencanaan secara umum dilaksanakan oleh seluruh SKPD yang di koordinasikan melalui musyawarah pembangunan di semua tingkatan dari mulai desa, kecamatan dan kabupaten. Dalam perencanaan pembangunan daerah dititikberatkan kepada penyusunan program dan kegiatan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penyediaan data dan informasi serta kajian permasalahan pembangunan yang terdiri dari bidang ekonomi, infrastruktur lingkungan hidup dan lingkungan, sosial budaya dan pemerintahan.

Dokumen perencanaan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan landasan strategis dalam pembangunan di tingkat daerah. Dokumen ini mencakup berbagai rencana jangka panjang, menengah, maupun pendek yang disesuaikan dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Beberapa dokumen utama yang disusun Bappeda antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Melalui dokumen-dokumen tersebut, Bappeda mengintegrasikan aspirasi masyarakat, data sektoral, serta arah pembangunan berkelanjutan guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan berjalan secara sistematis,

terukur, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan dokumen ini juga melibatkan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan, sehingga menghasilkan perencanaan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

Tabel 2.79 Kinerja Perencanaan per Program
Kabupaten Kuningan 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan	Persen	>90	>90	>90	>90	>90

Sumber: Bappeda Kab. Kuningan

2. Keuangan

Tujuan fungsi keuangan yaitu melaksanakan pengelolaan keuangan agar dapat berjalan efisien, efektif tepat sasaran dan tercapainya target yang direncanakan. Hal ini sebagai upaya memberikan dukungan terhadap kegiatan pembangunan yang diprogramkan. Selama lima tahun berturut-turut, dari tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Kuningan berhasil mempertahankan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerahnya. Opini WTP ini mencerminkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Konsistensi pencapaian ini menjadi indikator positif atas tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Indikator kinerja keuangan diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.80 Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Inspektorat Kab. Kuningan

3. Pengawasan

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya dalam upaya mencegah agar tidak terjadi

penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Pelaksanaan fungsi pengawasan terus ditingkatkan, baik pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) maupun pengawasan langsung oleh masing-masing pimpinan perangkat daerah di semua tingkatan, dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.

Beberapa indikator kinerja pengawasan diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.81 Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3
2	Persentase rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti	Persen	84,17	85	82,31	72,47
3	Prosentase Pelanggaran Pegawai	Persen		0,09	0,05	0,12
4	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Inspektorat Kabupaten	Persentase	63,37	68,4	72	67,88

Sumber: Inspektorat Kab. Kuningan

4. Sekretariat Daerah

a. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kuningan. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan SAKIP beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.82 Nilai SAKIP Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP	Level	B	B	B	B	B

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kuningan

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Kuningan secara konsisten berada pada level B. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja instansi pemerintah telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Pencapaian level B selama lima tahun berturut-turut mencerminkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta evaluasi kinerja yang terintegrasi dengan cukup baik, namun tetap memerlukan penguatan untuk mencapai level yang lebih tinggi seperti BB atau A.

b. Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Laporan Penyelengaraaan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP Nomor 6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Hasil EKPPD terhadap LPPD selama beberapa tahun terakhir yang berisi peringkat, skor, dan status kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.83 Peringkat, Skor dan Status Kinerja LPPD Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Skor LPPD	Poin	0	2,81	3,1486	n/a	n/a

Sumber: website www.kemendagri.go.id

5. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP di Kabupaten Kuningan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa pendaftraan, pendataan dan verifikasi organisasi masyarakat, organisasi sosial dan LSM sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2012. Selain itu, ada pula kegiatan rutin yang menjadi tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan setiap tahun yaitu forum komunikasi Ormas, Orsos, dan LSM.

b. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan pembinaan politik daerah di Kabupaten Kuningan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan politik daerah antara lain berupa penyusunan data base partai politik, verifikasi bantuan partai politik, sosialisasi undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu bagi pemilih pemula, Forum komunikasi generasi muda partai politik, pendampingan pengurus partai politik, serta sosialisasi pemilih pemula.

Tabel 2.84 Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kegiatan	1	1	1	**1**
2	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	1	1	1	10

Sumber : Bakesbangkpol Kabupaten Kuningan

BAB III

EVALUASI CAPAIAN KINERJA RPD 2024-2026 DAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN KUNINGAN

Sistem pertanggungjawaban berbentuk pengukuran kinerja merupakan salah satu sisi penting dari pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebijakan, program, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Evaluasi RPD dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kinerja daerah dalam dokumen RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Ringkasan Kinerja

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, dalam kerangka RPD Tahun 2024-2026 Pemerintah Kabupaten Kuningan memuat 5 (lima) tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran. Pencapaian tujuan dan sasaran ini perlu untuk selalu dievaluasi sebagai masukan bagi perbaikan pelaksanaan pembangunan. Evaluasi pembangunan dilakukan melalui evaluasi terhadap berbagai indikator RPD Tahun 2024-2026, evaluasi terhadap pelaksanaan program APBD Tahun 2024 dan evaluasi terhadap capaian indikator. Berdasarkan pada hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka pencapaian misi pembangunan Kabupaten Kuningan dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1.2 Rincian Kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah RPD Kab. Kuningan 2024-2026

Secara lengkap capaian indikator kinerja utama dalam RPD Kabupaten Kuningan 2024-2026 sampai dengan tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target				Kondisi Akhir RPD
					2024	Capaian	2025	2026	
T1	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Daerah		Indeks Gini	Poin	0,336	0,379	0,332	0,328	0,328
		Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan	Indeks Desa Membangun	Poin	0,764	0,7936	0,783	0,793	0,793
		Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (%)	Persen	11,12-12,72	11,88	10,82-12,86	10,68-12,98	10,68-12,98
			Pengeluaran per kapita	Ribu	9.933	10.418	10.071	10.210	10.210
		Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Persen	97,54	96,42	97,54	97,94	97,94
T2	Membangun SDM Unggul dan Kompetitif		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,28	71,56	71,79	72,31	72,31
		Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,68	7,90	12,79	12,89	12,89

			Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8	12,27	8,09	8,18	8,18
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,6	75,22	74,84	75,08	75,08
			Prevalensi Stunting	Persen	16		15	14	14
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Gender	Poin	87,49	88,00	87,75	88,01	88,01
		Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,28	1,04	1,26	1,24	1,24
T3	Mewujudkan Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Poin	3,46	3,82	3,51	3,56	3,56
			Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Poin	130		129	128	128

		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	65,98	72,05	66,28	66,58	66,58
		Meningkatnya Pembangunan Rendah Karbon dan Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	129	141,55	128	128	128
		Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dan Pelayanan Infrastruktur	Tingkat Konektivitas Tingkat kemantapan jalan	Persen	86	82,352	86.8	87,79	87,79
T4	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,16-5,66	5,61	5,18-5,71	5,66-5,76	5,66-5,76
		Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Usaha yang Disertai dengan Meningkatnya Daya Saing dan Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,51-9,21	7,78	8,32-9,05	8,13-8,89	8,13-8,89

		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum PDRB /Pariwisata	Persen	1,75-1,92	1,95	1,75-1,94	1,75-1,96	1,75-1,96
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Laju pertumbuhan Sektor Industri	Persen	2,31	5,83	2,32	2,34	2,34
			Laju Pertumbuhan sektor perdagangan	persen	4,83	0,32	4,84	4,85	4,85
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	104,91	113,86	105,22	105,52	105,52
			Kontribusi Sektor Pertanian	Persen	7,93		8,21	8,36	8,36
			Skor Pola Pangan Harapan	Poin	87,01	93,8	88,04	89,03	89,03
T5	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	CC		B	B	B

			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	85,7		86,4	87,1	87,1
		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	CC		B	B	B
		Meningkatnya Penerapan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	Poin	45,03	29,82	53,76	62,49	62,49

Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	5,53	-1,11 – 6,04	5,61	-1,50 – 5,66	-1,88 – 5,27	-1,88 – 5,27	BPS
2	PDRB Perkapita (ADHK)	Rp. (juta)	18.450.340	18,615,813 – 20.580.520	16,89	19.115.365 - 21490552	19.619.790 – 22.395.712	19.619.790 – 22.395.712	BPS
3	Indeks Gini	Poin	0,345	0,336		0,332	0,328	0,328	BPS
4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	12,76	11,12-12,72	11,88	10,82-12,86	10,68-12,98	10,68-12,98	BPS
6	Garis Kemiskinan	Rp	371.665	374.473 – 414.273	420.867	382.600 – 429.041	391.138 – 443.398	391.138 – 443.398	BPS
8	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional (PPMI)/Miskin Ekstrim	persen	10,83	9,02	8.80	8.92	8.12	8.12	Dinsos
9	Indeks Kedalaman Kemiskinan	persen	2,14	1,09 – 2,52	2,02	1,06 – 2,51	1,04 – 2,49	1,04 – 2,49	BPS
10	IPM :	Poin	70,16	70,86-71,40	71,56	71,31-71,85	71,76-72,52	70,86-71,40	BPS
	- Indeks Pendidikan	Poin	60,27	61,68-61,96	61,89	61,89-62,66	62,64-63,28	62,64-63,28	BPS
	- Indeks Kesehatan	Persen	83,12	83,78-84,24		84,14-84,70	84,62-84,83	84,62-84,83	BPS
	- Indeks Pengeluaran	Poin	68,95	69,72-70,24	71,39	70,18-70,68	70,62-70,98	70,62-70,98	BPS

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
11	Angka Harapan Lama sekolah / EYS	Tahun	12,24	12,68	12,27	12,79	12,89	12,89	Disdikbud
12	Indeks Harapan Lama sekolah	Poin	68	70,47	70,47	71,05	71,64	71,64	Disdikbud
13	Angka Rata-rata Lama Sekolah / MYS	Tahun	7,88	8	7,9	8,09	8,18	8,18	Disdikbud
14	Indeks Rata-rata Lama Sekolah	Poin	52,53	53,32	53,32	53,94	54,57	54,57	Disdikbud
15	Umur harapan hidup (UHH)	Tahun	74,03	74,6	75,22	74,84	75,08	75,08	BPS
16	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	55	65	79,83	70	75	75	Dinkes
17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	61,8	62,57-65,03	65,84	63,54-66,02	64,51-67,01	64,51-67,01	BPS / Bappeda
18	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,81	9,04-11,21	7,78	9,26-11,49	9,47-11,77	9,47-11,77	BPS / Bappeda
19	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	12,93	15,49	10,91	15,94	16,31	16,31	Bappenda
20	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	1,89	1,75 – 1,92	1,95	1,75 – 1,94	1,75 – 1,96	1.75 – 1.96	BPS/Bappeda
21	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,32**	1,28	1,04	1,26	1,24	1,24	BPS / Bappeda
22	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,53	0,19-7,20	5,61	-7,06	-7,12	-7,12	BPS / Bappeda
23	Pendapatan Perkapita (ADHB)	Juta (Rp)	24,68	25,22		25,76	26,3	26,3	BPS / Bappeda
24	Rata-rata Pengeluaran Perkapita	Ribu (Rp)	9.620	9.933	10.418	10.071	10.210	10.210	BPS / Bappeda
25	Rasio Penduduk yang Bekerja / Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persen	86,07	86,5	92,22	86,75	87	87	Disnakertrans

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
26	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	542.782	552.782	618.129	562.782	572.782	572.782	Disnakertrans
27	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	6	10	14,97	15	20	20	Diskatan
28	Angka Kematian Bayi (/1000)	Poin/ 1000 Kelahiran	7,1	6,32	8,46	6,31	6,3	6,3	Dinkes
28	Angka Kematian Ibu (/100.000)	Kasus	24	23	13	22	22	22	Dinkes
29	Persentase Stunting pada balita	Persen	19.4	16	7,9	15	14	14	Dinkes
30	Persentase Penduduk yang mempunyai BPJS/ KIS	Persen	93,33	93,5	98,41	94	95	95	Dinkes
31	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	87,17	87.02	88	87,04	87,06	87,06	BPS
32	Presentase desa/kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan/ODF	Persen	66,49	80	100	83	85	85	Dinkes
	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	1.211.684*	1.195.965-1.580.871		1.260.149-1.655.840	1.324.436-1.730.706	1.324.436-1.730.706	BPS/Bappeda
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	104,29	104,91	113,86	105,22	105,52	105,52	DKPP
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (cek data)	Persen	44,79*	28,40-62,57		26,22-64,67	24,25-66,56	24,25-66,56	BPS/Bappeda
8	Indeks Desa Membangun (IDM)	Poin	0,7446	0,764	0,7936	0,783	0,793	0,793	DPMD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
9	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Poin	131,13*	130	141,55	129	128	128	BPBD
10	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,68	0,7	0,68	0,71	0,72	0,72	BPBD
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	85	85,7		86,4	87,1	87,1	Bappeda
12	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Kuningan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa dalam merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan untuk menggunakan produk usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil Produk Dalam Negeri (PDN).	Persen	40	50		55	60	60	DKUKMPERINDAG
13	Nilai SAKIP	level / skor	B	B		B	BB	BB	Bag. Org / Inspektorat
14	Indeks Reformasi Birokrasi	level / skor	CC	CC		CC	B	B	Bag. Org / BKPSDM
15	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	74,75	74	76,5	75	76	76	Satpol PP, BPBD
16	Opini BPK	Kategori / Opini	WTP	WTP		WTP	WTP	WTP	BPKAD
17	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Skor	3,02	1,30 – 1,44	3,82	1,45 – 1,60	1,61 – 1,95	1,61 – 1,95	Bappeda

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Layanan Urusan Wajib Dasar								
	PENDIDIKAN :								Disdikbud
1	APK PAUD usia 5-6 tahun	Persen	93,58	93,98	98,05	94,25	94,6	94,6	
2	Jumlah lembaga PAUD	Lembaga	910	920	933	925	930	930	
3	Jumlah PAUD Holistik integratif	Lembaga	100	150	200	200	300	300	
4	APK SD/Paket A	Persen	100,01	100,02	100	100,02	100,03	100,03	
5	APM SD/Paket A	Persen	99,9	99,91	99,91	99,92	99,92	99,92	
6	APK SMP/Paket B	Persen	99,35	99,52	100	99,65	99,8	99,8	
7	APM SMP/Paket B	Persen	93,25	93,65	97,5	93,95	94,05	94,05	
8	Jumlah program kursus dan pelatihan yang telah menerapan KKNI	Lembaga	50	55	85	57	60	60	
9	Angka Partisipasi usia 7-18 tahun pendidikan kesetaraan	Persen	95,15	95,4	96,1	95,55	95,7	95,7	
10	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Persen	1,81	1,9	89,09	1,9	1,9	1,9	
11	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Persen	1,7	1,8	85,31	1,8	1,8	1,8	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
12	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	1,84	1,9	79,68	1,9	1,9	1,9	
13	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	1,73	1,8	75,64	1,8	1,8	1,8	
14	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi Minimal B	Persen	36,06	36,7	40,7	37,05	37,65	37,65	
15	Persentase SD berakreditasi minimal B	Persen	97,56	97,6	97,8	97,65	97,98	97,98	
16	Persentase SMP berakreditasi minimal B	Persen	84,82	85,1	92,5	85,55	85,8	85,8	
17	Guru PAUD professional	Persen	23,37	23,5	67,85	23,87	24,17	24,17	
18	Guru Profesional SD	Persen	59,08	59,3	71,77	59,65	59,9	59,9	
19	Guru Profesional SMP	Persen	58,98	59,25	68,3	59,85	60,05	60,05	
20	Presentase kepala sekolah profesional di SD dan SMP	Persen	100	100	100	100	100	100	
21	Presentase pengawas profesional di SD dan SMP	Persen	100	100	100	100	100	100	
22	Persentase Guru Layak PAUD	Persen	74,08	74,28	76,94	74,75	74,94	74,94	
23	Persentase Guru Layak SD	Persen	95,56	95,76	97,74	95,9	96,1	96,1	
24	Persentase Guru Layak SMP	Persen	98,92	98,96	98,98	98,98	98,99	98,99	
25	Rasio Kelas Layak PAUD	Persen	73,69	73,94	87,08	74,19	74,5	74,5	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
26	Rasio Kelas Layak SD	Persen	85,66	86,26	90,27	86,86	87,3	87,3	
27	Rasio Kelas Layak SMP	Persen	97,95	97,99	98,08	98,08	98,2	98,2	
	KESEHATAN :								
1	Prevalensi Wasting pada Balita	Persen	6,5	6	4,54	5,5	4	4	Dinkes
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Poin/ 1000 Kelahiran	7,1	6,32	8,46	6,31	6,3	6,3	
3	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Kasus	24	23	13	22	22	22	
4	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	56	56	54	57	58	58	
5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100	100	127	100	100	100	
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	98,16	98	72,4	98	98	98	
7	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	94,59	95	54,3	96	97	97	
8	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Poin/ 100.000 Penduduk	4,5	4,5	7	4,5	4,5	4,5	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC semua kasus	Persen	88	95	72	95	97	97	
10	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	54	40	7	35	35	35	
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	
12	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
13	Cakupan kunjungan bayi	Persen	100	100	83,81	100	100	100	
14	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	90	95	70	95	96	96	
15	Cakupan pelayanan nifas	Persen	96,3	97	70	97	98	98	
16	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	53,4	100	58	100	100	100	
17	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	100	100	81,2	100	100	100	
18	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	99,41	100	99,67	100	100	100	
19	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
20	Persentase Penduduk yang mempunyai BPJS/ KIS	Persen	93,33	93,5	98,41	94	95	95	
21	Jumlah PBI BPJS/KIS	Orang	619.894	1.114.110	761.161	1.215.392	1.316.675	1.316.675	
22	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100	100	100	100	100	100	
23	Persentase Puskesmas yang melaksanakan PISPK dengan Intervensi keluarga	Persen	99,12	100	100	100	100	100	
24	Persentase puskesmas yang melakukan tata kelola masyarakat dengan indikator kinerja baik	Persen	13,51	25	40,54	35	45	45	
25	Persentase puskesmas yang melaksanakan program kesehatan tradisional	Persen	100	100	100	100	100	100	
26	Persentase puskesmas yang melaksanakan asuhan keperawatan baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	
27	Persentase puskesmas yang melaksanakan layad rawat tidak terencana	Persen	0	40	40	60	70	70	
28	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	Persen	8,16	9,96	9,62	10,86	11,76	11,76	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
29	Proporsi kusta baru tanpa cacat	Persen	67,3	70	50	80	90	90	
30	*Release From Treatment* (RFT) rate kusta PB dan MB	Persen	91	92	84,5	93	95	95	
31	Persentase ODHA yang menjalani terapi ARV	Persen	95	95	70	95	95	95	
32	Insidensi HIV	Per 1.000 Penduduk yang tidak terinfeksi HIV	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
33	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolosis	Persen	92	92	83,2	92	92	92	
34	Prevalensi Malaria (Annual Parasite Incidience/API)	API per 1000 penduduk	0,0000009	<1	0	<1	<1	<1	
1	Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu / Bed Occupation Rate (BOR)	Persen	49%	60%	53%	65%	70%	70%	RSUD 45
2	Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit / Length of stay (LOS)	hari	4 hari	6 hari	3 hari	6 hari	6 hari	6 hari	RSUD 45
3	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya / Turn Over Interval (TOI)	hari	4 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	RSUD 45

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
4	Angka Kematian umum di Rumah Sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar / Gross Death Rate (GDR) ideal tidak lebih dari 45	per 1000	54 per 1000	40 per 1000	51 per 1000	38 per 1000	38 per 1000	38 per 1000	RSUD 45
5	Angka Kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar / Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25	per 1000	29 per 1000	24 per 1000	23 per 1000	23 per 1000	23 per 1000	23 per 1000	RSUD 45
6	Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu / Bed Turn Over (BTO)	kali	52 kali	50 kali	67kali	50 kali	50 kali	50 kali	RSUD 45
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Rumah Sakit	Persen	76.95	78	80,49	79	80	80	RSUD 45
8	Nilai Akreditasi Rumah Sakit diatas 80	standar akreditasi	paripurna	-	paripurna	-	paripurna	paripurna	RSUD 45
1	Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu / Bed Occupation Rate (BOR)	Persen	67,67	68,77	51,71	69,37	70	70	RSUD Linggarjati
2	Rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di rumah sakit / Length of stay (LOS)	hari	3,67	4	2,69	5	6	6	RSUD Linggarjati

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
3	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya / Turn Over Interval (TOI)	hari	2,29	2,59	4,1	2,89	3	3	RSUD Linggarjati
4	Angka Kematian umum di Rumah Sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar / Gross Death Rate (GDR) ideal tidak lebih dari 45	persen	32,53	32	19,33	31,5	30	30	RSUD Linggarjati
5	Angka Kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar / Net Death Rate (NDR) ideal kurang dari 25	persen	18,05	17,5	10,44	17	16,5	16,5	RSUD Linggarjati
6	Rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu / Bed Turn Over (BTO)	kali	51,45	51,3	47,04	51	50	50	RSUD Linggarjati
7	Nilai Akreditasi Rumah Sakit diatas 80	standar akreditasi	paripurna	-		-	paripurna	paripurna	RSUD Linggarjati
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Rumah Sakit	Persen	73,3	75	81,49	78	80	80	RSUD Linggarjati
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG :								DPUTR

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
1	Persentase kondisi jaringan irigasi yang baik	Persen	63,23	64	66,97	65	66	66	
2	Akses Pelayanan Air minum	Persen	91,1	94,19	91,75	95,74	97,29	97,29	
3	Akses Sanitasi Layak	Persen	93,65	96,33	96,68	97,68	99,02	99,02	
4	Persentase Kemantapan jalan	Persen	80,69	86	82,352	86,8	87,9	87,9	
5	Persentase keselamatan konstruksi	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	Persen	30	60	-	75	100	100	
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN :								DPKPP
1	Persentase Rumah Terdampak Bencana yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Luasan kawasan kumuh yang tertangani (SK Bupati)	Ha	54,35	2	9,6	2	2	60,35	
3	Persentase rumah layak huni	Persen	97,21	97,55	96,42	97,75	97,94	97,94	
4	Panjang jalan lingkungan untuk menunjang fungsi hunian yang tertangani	Km	149,96	50	95,82	50	50	299,96	
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT :								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	Persen	N/A	90	90	91	92	92	Satpol PP
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persen	84	85	86	86	87	87	
3	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Persen	93	95	96	96	97	97	
4	Persentase Tingkat Kapasitas Aparatur Satpol PP dan Damkar	Persen	95	95	96	96	97	97	
5	Cakupan Pelayanan bencana Kebakaran Kab./Kota	Persen	80	88	89	89	90	90	
6	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah Layanan WMK	Persen	100	100	100	100	100	100	
1	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	90.98	100	100	100	100	100	BPBD
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	92.02	100	100	100	100	100	
3	Jumlah Desa Tangguh yang terbentuk	Desa	30	10	18	10	10	30	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	92	100	100	100	100	100	
5	Persentase penanganan pasca bencana	Persen	81	75	93,47	80	85	85	
	SOSIAL :								Dinsos
1	Persentase (%) penyandang disabillitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	24.09	30	4,31	40	45	45	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota	Persen	70.40	75	100	80	80	80	
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
	TENAGA KERJA :								
1	Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja bersertifikat	Orang	470	304	426	336	368	1008	Disnakertrans

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
2	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	persen	50	50	93	55	60	60	
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK :								DPPKBP3A
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100%	80%	11%	80%	80%	80%	
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100%	80%	76%	80%	80%	80%	
4	Rasio KDRT	Persen	0,0001	0,0001	0,000043	0,0001	0,0001	0,0001	
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per-100.000 penduduk perempuan)	per-100.000	8	8	6,9	7,8	7,6	7,6	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
6	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dari Belanja Langsung APBD	persen	55%	8%	32%	10%	12%	12%	
7	Persentase perempuan kepala keluarga berdaya ekonomi yang dibina	persen	0,626	0,645	0,645	0,657	0,669	0,669	
	PANGAN :								
1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	93,2	87,01	93,8	88,04	89,03	89,03	Diskatan
2	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Desa	68	2	4	2	2	74	Diskatan
	PERTANAHAN :								DPKPP
1	Jumlah bidang tanah yang tersertifikasi	Bidang	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	
	LINGKUNGAN HIDUP :								DLH
1	Penanganan Sampah	Ton	107.441	103,946	108189	104.439	105.929	105.929	
		Persen	61,09	58,2	59,76	57,8	57,4	57,4	
2	Pengurangan Sampah	Ton	11.200	10.716	15.728	11.022	11.333	11.333	
		Persen	22	6	8,73	6,1	6,2	6,2	
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	66,93	65,98	72,05	66,28	66,58	66,58	
	a. Indeks Kualitas Air	Poin	51,11	50,1	54,44	50,2	50,3	50,3	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	b. Indeks Kualitas Udara	Poin	86,96	84,5	92,84	84,6	84,7	84,7	
	c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	57,05	59	63,82	60	61	61	
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL :								Disdukcapil
1	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Persen	100	83	98,34	84	85	85	
2	Cakupan Kepemilikan KTP eL	Persen	99,4	98,5	99,06	98,75	99	99	
3	Cakupan Kepemilikan KIA	Persen	43,46	35	55,20	37,5	40	40	
4	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 s.d 18 Tahun	Persen	94,21	89	96,36	90	91	91	
5	Penanganan Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Penanganan Pelayanan Pembuatan Akta Perceraian	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persen	24	39	74,54	44	49	49	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
8	Persentase pemenuhan layanan pengolahan dan penyajian data kependudukan dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Persen	100	100	100	100	100	100	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA :								DPMD
	Indeks Desa Membangun (IDM)								
1	Desa Status : Mandiri	Desa	183	10	134	10	10	213	
2	Desa Status : Maju	Desa	62	15	215	15	15	107	
	- Persentase Posyandu Strata Mandiri	Persen	48	60	49,86	70	80	80	
	- Jumlah BUMDES yang berbadan hukum	Unit	53	7	132	8	8	23	
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA :								DPPKBP3A
1	MCPR (Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Peserta KB Modern : Suntik, Pil, Implant, IUD, MOP, MOW))	persen	67,24	67,24	66,4	67.34	68	68	
2	i-bangga (Indeks Pembangunan keluarga)	point	52,73	52,73	62,68	52.93	53,15	53,15	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
3	Unmet-need (Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi)	persen	20,86	20,76	10,3	20,56	20,46	20,46	
4	ASFR (Angka Kelahiran Remaja)	kelahiran	17,1	17	18,7	16,9	16,8	16,8	
5	MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan)	tahun	20	20	20,9	20,5	20,5	20,5	
6	TFR (Angka Kelahiran Total)	anak	2,3	2,3	2,03	2,25	2,2	2,2	
	PERHUBUNGAN :								
1	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persen	49	53		55	57	57	Dishub
2	Persentase orang yang menggunakan angkutan umum	Persen	27,12*	30		32	34	34	Dishub
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:								Diskominfo
1	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (LPPD)	Persen	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
2	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	KIM	1,162	8	8	8	8	8	Diskominfo
3	Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Diskominfo

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
4	Indeks SPBE	Point	2.88	3	3,57	3.1	3.2	3.2	Diskominfo
5	Pengentasan Desa Blank Spot	Desa	1	5	2	5	5	5	Diskominfo
6	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (LPPD)	Persen	80	82	84	85	89	89	Diskominfo
	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH:								
1	Jumlah koperasi aktif	Unit Usaha	492	20	537	25	30	567	Diskopdagperin
2	Jumlah koperasi sehat	Unit usaha	75	75	85	75	75	300	Diskopdagperin
3	Jumlah koperasi binaan	Orang	100	50	799	50	50	250	Diskopdagperin
4	Jumlah koperasi modern	Orang	N/A	50	70	50	50	150	Diskopdagperin
5	Jumlah UKM binaan	Unit Usaha	1317	100	254	100	100	1617	Diskopdagperin
6	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit Usaha	200	200	563	250	300	950	Diskopdagperin
	PENANAMAN MODAL:								DPMPTSP
1	Regulasi Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Regulasi	1	3	0	3	3	10	
2	Jumlah Data Potensi Investasi	Objek Potensi	3	2	2	2	2	9	
3	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian	Laporan	1	2	2	2	2	2	
4	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Jenis	2	4	4	4	4	4	
5	Media informasi perizinan dan nonperizinan	Media	2	2	2	2	2	2	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA :								Dispora
1	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	9,03	0,5	0,5	0,5	0,5	10.53	
2	Peningkatan Kapasitas SDM Kepeloporan	Orang	150	200	200	250	300	300	
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	19	6	58	8	10	43	
	STATISTIK :								
1	Jumlah Produsen Data	SKPD/NON SKPD	60	60	70	70	80	80	Diskominfo
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
4	Jumlah Metadata Statistik	OPD/NON OPD	26	40	60	50	60	60	Diskominfo

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	PERSANDIAN :								
1	Jumlah Sertifikat TTE yang diterbitkan	Sertifikat TTE	997	1200	1350	1400	1600	1600	Diskominfo
	KEBUDAYAAN :								Disdikbud
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	12	12	12	12	12	12	
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	143	143	143	143	143	143	
3	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah karya budaya	24	24	24	24	24	24	
5	Jumlah Pengunjung Museum	Orang	34.489	36.390		38.392	40.192	40.192	
	PERPUSTAKAAN :								Dinas Arsip Perpus
1	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan daerah	buku	26150	30150	16943	32150	34150	34150	
2	Jumlah Perpustakaan Binaan	perpustakaan	70	100	1180	125	150	150	
3	Jumlah SDM Perpustakaan Binaan	orang	70	100	207	125	150	150	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
4	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	orang	8750	10000	101052	11000	12000	12000	
5	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (LPPD)	Persen	0	32,5	79,85	34,5	36	36	
6	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (LPPD)	poin	0	68,5	70,85	69	70	70	
	KEARSIPAN :								Dinas Arsip Perpus
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	Persen	85	90	90	92	93	93	
2	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan yang dibina	Orang	62	124	80	186	186	186	
3	Tingkat Ketersediaan Arsip (LPPD)	Box	0	5	5	8	10	10	
	Layanan Urusan Pilihan								
	PARIWISATA :								Dispar
1	Kunjungan Wisata	Orang	3.448.917	3.793.809	3.824.520	4.173.190	4.590.509	4.590.509	
2	Jumlah Pengembangan Potensi Wisata Yang Berkelanjutan	Daya Tarik Wisata (DTW)	12	3	15	4	5	24	
3	Pembinaan Fasilitasi HAKI Ekonomi Kreatif	Orang	N/A	50	50	50	75	175	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
4	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat	Orang	25	50	75	50	75	200	
	PERTANIAN :								
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	N/A	7,93		8,21	8,36	8,36	Diskatan
	Meningkatnya Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil	Ekor		4678		4702	4725	4725	DISKANNAK
	Produksi Daging (Ton) :								DISKANNAK
1	1. Daging Sapi	Ton	2.352	2.259	2.866	2.282	2.305	2.305	DISKANNAK
2	2. Daging Domba/Kambing	Ton	1.430	1.348	1.488	1.361	1.375	1.375	DISKANNAK
3	3. Daging Ayam Buras	Ton	591	648	716	681	715	715	DISKANNAK
4	4. Daging Ayam Ras Petelur	Ton	1.777	1.479	2.179	1.509	1.539	1.539	DISKANNAK
5	5. Daging Ayam Ras Pedaging	Ton	30.006	31.679	33.415	32.63	33.609	33.609	DISKANNAK
	Produksi Telur (Ton) :								DISKANNAK
6	1. Telur Ayam Buras	Ton	1.361	1.493	1.496	1.568	1.646	1.646	DISKANNAK
7	2. Telur Ayam Ras Petelur	Ton	21.823	18.168	26.763	18.531	18.902	18.902	DISKANNAK
8	3. Telur Itik	Ton	469	484	559	499	514	514	DISKANNAK
9	Produksi Susu Sapi (Ton) :								DISKANNAK
10	Susu Sapi Perah	Ton	18.402	18.979	18.107	19.074	19.17	19.17	DISKANNAK
	Populasi Ternak (Ekor) :								DISKANNAK

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
11	1. Sapi Perah	Ekor	7.278	7.943	7.943	8.022	8.102	8.102	DISKANNAK
12	2. Sapi Potong	Ekor	30.631	30.559	30.559	31.17	31.794	31.794	DISKANNAK
13	3. Kerbau	Ekor	4.647	4.678	4.678	4.702	4.725	4.725	DISKANNAK
14	4. Domba	Ekor	136.620	133.79	133790	134.459	135.131	135.131	DISKANNAK
15	5. Kambing	Ekor	7.725	7.718	7.718	7.756	7.795	7.795	DISKANNAK
16	6. Ayam Buras	Ekor	634.796	696.545	696.545	731.373	767.941	767.941	DISKANNAK
17	7. Ayam Ras Petelur	Ekor	1.908.399	1.588.772	2.340.353	1.620.548	1.652.959	1.652.959	DISKANNAK
18	8. Ayam Ras Pedaging	Ekor	3.814.651	4.027.412	4.248.100	4.148.235	4.272.682	4.272.682	DISKANNAK
19	9. Itik	Ekor	74.710	75.836	89.072	76.595	77.361	77.361	DISKANNAK
20	Bahan Pangan Asal Hewan (Ton)	Ton	-	surplus	surplus	surplus	surplus	surplus	DISKANNAK
21	Penanggulangan Kemiskinan (RTP)	RTP	304	731		733	774	774	DISKANNAK
22	Terlaksananya kegiatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persen	-	7		8	10	10	
	PERDAGANGAN :								
1	Jumlah pasar yang direvitalisasi	Unit	4	1	-	1	1	7	Diskopdagperin
2	Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah dan bazar pasar murah	Laporan	8	5	5	5	5	23	Diskopdagperin

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
3	Nilai ekspor bersih perdagangan	USS	6.861.579	1.772.802	3.579.914	1.882.802	1.992.802	12.509.985	Diskopdagperin
4	Jumlah alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	Unit	6.392	5.000	5.528	5.000	5.000	21.392	Diskopdagperin
5	Jumlah produk unggulan daerah yang dipromosikan	produk	N/A	50	352	50	50	150	Diskopdagperin
	PERINDUSTRIAN :								
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Persen	2,27	2,31	1	2,32	2,34	2,34	Diskopdagperin
2	Pertumbuhan industri	Persen	13	2	2	2	2	2	Diskopdagperin
3	Jumlah pendataan SIINAS	Dokumen	40	50	77	50	50	190	Diskopdagperin
	TRANSMIGRASI :								Disnakertrans
1	Jumlah Translok yang diberdayakan	Orang	N/A	40		60	80	80	
	KELAUTAN DAN PERIKANAN :								
1	Meningkatnya Tingkat Produksi Perikanan Budiaya Ikan Kecil	Ton	24.567,65	28.500		30.500	32.500	32.500	Diskanak

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
2	Tingkat kesejahteraan pembudi daya ikan (NTP)	Persen	102,75	104,2		104,5	105	105	Diskanak
3	Tingkat produksi perikanan budidaya	Ton	24.567,65	28,5	27.000	30,5	32,5	32,5	
4	Cakupan kelompok pembudi daya ikan	Kelompok	700	1000	680	1100	1200	1200	
5	Jumlah Rumah Tangga perikanan	Orang	12.238	23		24	25	25	
6	Pembangunan kampung perikanan budidaya air tawar berbasis kearifan lokal	Unit	N/A	2		4	6	6	
7	Peningkatan Produksi Non Kosumsi	Persen	N/A	10.5		15	20	20	
8	Meningkatnya Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	Ton	350,95	420	440	450	475	475	
9	Tingkat kesejahteraan nelayan (NTN)	Persen	102,95	102,75		103	103,25	103,25	Diskanak
10	Tingkat produksi perikanan tangkap	Ton	350,95	420		450	475	475	
11	Cakupan Kelompok Usaha Bersama (KUB)	Kelompok	13	20	13	25	30	30	
12	Jumlah Rumah Tangga Nelayan	Orang	1,85	1.800	1.500	1.900	2.000	2.000	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
13	Meningkatnya Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ton	210,59	250		260	275	275	
14	Tingkat kesejahteraan pengolah dan pemasar hasil perikanan	Persen	102,1	101,5		102,25	103	103	Diskanak
15	Tingkat produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Ton	210,59	250		260	275	275	
16	Cakupan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Kelompok	37	40		50	60	60	
17	Jumlah Rumah Tangga pengolah dan pemasar	Orang	1.750	3.000		3.500	4.000	4.000	
18	Tingkat konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	25	27		27	27	27	
19	Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Ha	200	200		200	200	200	
20	Rasio Kawasan Perairan terhadap total lindung luas nelayan	Ha	200	200		200	200	200	Diskanak
21	Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	14	8		5	2	2	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
22	cakupan kelompok masyarakat pengawas sumber daya perikanan	Kelompok	3	4		5	6	6	
	Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
	SEKRETARIAT DAERAH :								Setda
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	N/A	70-75	100	75-80	>80	>80	Barjas
2	Tingkat Ketepatan Waktu Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase	N/A	85	100	90	95	95	
3	Persentase Nilai Paket Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (RUP) yang diiput pada Aplikasi SIRUP LKPP	Persentase	N/A	90	100	95	100	100	
4	Persentase Perumusan Kebijakan umum serta koordinasi, fasilitasi, pengendalian dalam aspek pembangunan	Persentase	N/A	80	100	80	80	80	Adpem
5	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase	N/A	80	100	80	80	80	
6	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari BUMD dan BLUD	Persentase	N/A	5	1,5	5	5	5	Ekonomi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
7	Persentase perumusan kebijakan umum serta koordinasi, fasilitasi, pengendalian perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase	N/A	85	100	85	85	85	
8	Nilai LPPD Kabupaten di Tingkat Provinsi/Nasional	Level & Score	N/A	3,1	belum tersedia	3,2	3,3	3,3	Tapem
9	Persentase Kepatuhan Terhadap Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	N/A	84	100	85	86	86	
10	Persentase Penyelesaian Perkara Hukum	Persentase	N/A	100	100	100	100	100	Hukum
11	Persentase Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan : Jumlah Bahan Kebijakan Daerah yang diusulkan sebagai Produk Hukum	Persentase	N/A	>80	100	>90	>90	>90	
12	Pengelolaan Sistem Informasi Hukum terintegrasi	Persentase	N/A	100	100	100	100	100	
13	Persentase Lembaga/ Organisasi Sosial/ Kemasyarakatan/ Individu yang dibina dan difasilitasi	Persentase	20	20	100	20	20	20	Kesra

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
14	Persentase Bahan Kebijakan Umum LIngkup Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persentase	N/A	80	100	80	80	80	
15	Persentase bahan kebijakan umum pembinaan, pemahaman, pengamalan keagamaan	Persentase	N/A	80	66,69	80	80	80	
16	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal SETDA	Persentase	N/A	80	100	80	80	80	Umum
17	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Program, Penaggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase	N/A	80	100	80	80	80	Perencanaan & Keuangan
18	Persentase Ketepatan waktu pelaksanaan dan penatausahaan keuangan di lingkungan bagian pada Sekretariat Daerah	Persentase	N/A	80	100	80	80	80	
19	Persentase Kepatuhan Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Berbasis SPBE	Persentase	N/A	80	100	80	80	80	
20	Tingkat Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan keprotokolan	Persentase	N/A	80	100	80	80	80	Prokompim

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
21	Persentase Kegiatan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	Persentase	N/A	80	100	80	80	80	
22	Jumlah viewer hasil publikasi dan Dokumentasi	Orang	N/A	750	750	1000	1080	1080	
23	Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja yang Efektif dan Efisien	Persentase	N/A	80	100	80	85	85	Organisasi
	Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN :								Bappeda
1	Persentase keterwakilan masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase kesesuaian Program/kegiatan di RKPD dan APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Perencanaan Sektoral dan Kewilayahan	Dokumen	4	4	4	4	4	12	
4	Dokumen Perencanaan (RPJP; RPD dan RKPD)	Dokumen	2	4	4	4	2	10	
	KEUANGAN :								
1	Penetapan APBD tepat waktu	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
2	Persentase Laporan Aset Daerah	Persen	100	100		100	100	100	
1	Persentase Peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	0.5	1	0,42	1.5	1.5	1.5	Bappenda
2	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Pajak Daerah	Persen	68	70	80	75	80	80	
3	Jumlah Layanan Pajak Daerah	WP	3630	800	5335	900	1000	1000	
4	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	Persen	89,98	95	94,99	96	97	97	
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN :								BKPSDM
1	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	57	57	78,23	60	63	63	
2	Indeks Sistem Merit	Point	282	290	289	290	325	325	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN :								Bappeda
1	Kajian Isu Pembangunan	Dokumen	5	2	2	2	2	6	
2	Inovasi Daerah	Buah	1	1	1	1	1	3	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
	SEKERTARIAT DPRD :								Sekretariat DPRD
1	Pelayanan Administrator Pemerintahan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan								
	PENGAWASAN :								Inspektorat
1	Persentase tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Kabupaten Kuningan	Persen	71,65	70	76	71	72	72	
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Provinsi Jawa Barat	Persen	76,7	74	75	74	75	75	
3	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK	Persen	82,31	82	69	83	83	83	
4	Jumlah SKPD yang memiliki nilai SAKIP minimal BB	OPD	26	10	29	12	15	15	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
5	Level SPIP	Level	3	2	3	2	3	3	
6	Capaian Nilai MCP	Nilai	91	70	88	73	75	75	
7	Level Kapabilitas APIP	Level	2	3	3	3	3	3	
	Layanan Unsur Pemerintahan Umum								
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK :								Kesbangpol
1	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	74,11* (2019)	75	76,44	-	-	75	
2	Pembinaan Kesadaran Politik Masyarakat	Orang	340	300	450	300	300	300	
3	Pembinaan Ideologi Negara dan Karakter Kebangsaan	Orang	400	300	558	300	300	300	
4	Indeks Toleransi Beragama	Poin	72,39	70	76,49	70	70	70	
	Layanan Unsur Kewilayahan								
	KECAMATAN :								32 Kecamatan
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	63	64	65	65	66	66	Karangkancana
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan Karangkancana	Persen	63	65	66	-	-	65	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	190	195	196	200	210	210	
5	Jumlah KK Miskin	KK	300	309	310	290	261	261	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan Karangkancana	Keluarga	70	60	61	40	25	25	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	71	75	76	83	95	95	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	76	77	78	78	79	79	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	83	84	85	85	86	86	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	251	252	253	253	254	254	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	80	100	100	100	Ciniru
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	90	80.30%	-	-	90	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	75	78	75%	80	85	85	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	815	820	810	850	870	870	
5	Jumlah KK Miskin	KK	409	390	380	350	330	330	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	380	350	345	300	280	280	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100%	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	97	97	315	97	99	99	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	89	92	90%	95	96	96	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	85	90	87	95	96	96	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	324	325	324	330	335	335	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	40	60	60	70	80	80	Jalaksana
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	90	70	72	-	-	70	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	302	302	302	302	302	302	302	
5	Jumlah KK Miskin	KK	7768	7768	7768	7768	7768	7768	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	7768	7768	7768	7768	7768	7768	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	90	90	60	90	90	90	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	168	168	168	168	168	168	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	24	24	24	24	24	24	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	600	600	600	600	600	600	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	900	900	900	900	900	900	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	90	93	65	96	100	100	Lebakwangi
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	100	100	66	-	-	100	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	70	72	100	74	76	76	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	331	365	196	400	450	450	
5	Jumlah KK Miskin	KK	100	95	310	90	85	85	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	1705	1875	1896	2062	2268	2268	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	155	155	15	155	155	155	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	100	100	83	100	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1		1	1	1	
11	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	450	470	303	525	575	575	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	90	100	100	100	Darma
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	85	90	-	-	85	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	90	100	90	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	550	600	600	650	700	700	
5	Jumlah KK Miskin	KK	6.125	5.500	5,5	5.000	4.500	4.500	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	6.125	5.500	5,5	5.000	4.500	4.500	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	100	100	100	100	100	100	
9	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
10	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	1	1	90	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	150	200	90	250	300	300	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	150	181	90	217	230	230	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	80	85	85	90	95	95	Maleber

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	80	80	70	-	-	80	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	75	80	100	85	90	90	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	2148	2198	2158	2248	2298	2298	
5	Jumlah KK Miskin	KK	268	750	750	98	48	48	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	940	900	900	880	850	850	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	185	185	185	185	185	185	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	92	95	95	97	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	957	1000	960	1070	1100	1100	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	384	404	385	408	412	412	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100%	100	100	100	Ciwaru
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	80	90	58.53%	-	-	90	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	80	80	80%	80	85	85	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	745	715	603	625	550	550	
5	Jumlah KK Miskin	KK	4294	3894	1800 KK	2294	1294	1294	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	0	0	0	0	0	0	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100%	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	137	137	85%	137	137	137	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	80	100	90%	100	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11									
12	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	125	130		140	150	150	
13	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	298	300	196	310	320	320	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	62	63	70	64	66	66	Pancalang
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	62	65	65	-	-	65	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	95	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	128	140	140	154	169	169	
5	Jumlah KK Miskin	KK	342	308	308	278	251	251	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	66	50	50	35	22	22	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	70	77	65	84	92	92	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	75	76	76	78	79	79	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	84	85	80	86	87	87	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	250	251	240	252	253	253	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	75	80	75	85	90	90	Cimahi
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	87	67,87	-	-	87	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	78	80	85	85	90	90	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	1231	350	355	380	400	400	
5	Jumlah KK Miskin	KK	2415	1875	1880	1573	1180	1180	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	2415	1875	1880	1573	1180	1180	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	50	60	70	75	85	85	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	70	85	90	95	111	111	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	70	85	88	85	90	90	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	230	245	75	250	280	280	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	115	135	67,87	145	175	175	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	95	100	100	100	Kadugede

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	85	75.6	-	-	85	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	75	80	75	85	90	90	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	1500	1725	91	2000	2314	2314	
5	Jumlah KK Miskin	KK	3724	3500	2997	3000	2500	2500	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	3724	3500	2997	3000	2500	2500	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	85	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	100	120	133	120	120	120	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	70	85	80	95	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	90	95	95	100	130	130	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	80	85	75.6	120	150	150	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	79	81	80	83	87	87	Cibingbin
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	82	82	-	-	82	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	80	82	80	84	88	88	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	700	705	700	710	750	750	
5	Jumlah KK Miskin	KK	5854	5854	5850	5854	5854	5854	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	5854	5854	5850	5854	5854	5854	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	200	200	200	200	200	200	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	90	92	92	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	513	515	515	517	519	519	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	120	125	122	127	130	130	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	70	80	80	82	84	84	Cigandamekar
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	77	80	65.8	-	-	80	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	1.744	1.918	1,918	2.110	2.321	2.321	
5	Jumlah KK Miskin	KK	7.096	6.386	6,386	5.748	5.173	5.173	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	7.096	6.386	6,386	5.748	5.173	5.173	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	107	117	117	128	140	140	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	90	92	92	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	490	500	500	550	600	600	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	301	331	331	364	400	400	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Mandirancan
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	70	70	70	-	-	70	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	75	77	74	80	83	83	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	600	620	615	650	700	700	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1570	1410	1320	1294	1120	1120	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	700	750	750	950	1050	1050	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	130	130	140	130	130	130	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	90	92	80	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	70	75	75	80	85	85	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya(katagori Perizinan)	Dokumen	245	250	250	255	260	260	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	80	85	75	90	95	95	Japara
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (Berlaku hanya Pemilu)	Persen	60	65	65	-	-	65	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	75	77	80	80	85	85	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	1007	1015	1010	1025	1035	1035	
5	Jumlah KK Miskin	KK	3075	2767	2499	2490	2241	2241	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah Kecamatan	Keluarga	480	500	2958	525	550	550	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	108	108	108	108	108	108	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	85	90	90	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	350	355	98	360	365	365	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	110	115	724	120	125	125	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Garawangi
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	80	96	-	-	80	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	75	80	80	85	90	90	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	500	550	550	600	630	630	
5	Jumlah KK Miskin	KK	2415	1875	231	1573	1180	1180	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	2415	1875	231	1573	1180	1180	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	60	60	65	60	60	60	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	178	178	95	178	178	178	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	85	90	90	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	90	95	139	100	160	160	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	80	85	426	100	120	120	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	80	100	100	100	Cilebak
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	85	75	-	-	85	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Persen	75	80	80	80	85	85	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	237	262	250	300	300	300	
5	Jumlah KK Miskin	KK	415	400	300	385	360	360	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	109	109	260	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	85	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	79	80	80	80	80	80	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	100	100	85	100	100	100	
10	Jenis pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	60	70	60	70	70	70	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya (katagori perizinan).	Dokumen	250	255	245	255	260	260	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Subang

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	85	75	-	-	85	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	72	75	75	77	79	79	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	500	545	560	670	700	700	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1300	1150	1050	1000	875	875	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	565	650	630	825	900	900	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	105	105	112	105	105	105	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	83	90	85	95	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	125	170	145	200	235	235	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	150	181	183	217	230	230	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	70	73	71	75	78	78	Ciawigebang
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)	Persen	75	80	70.30%	-	-	80	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Persen	100	100	95%	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	4.520	4.957	9,253	5.000	5.500	5.500	
5	Jumlah KK Miskin	KK	10.113	9.102	10,343	8.192	7.373	7.373	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	4.181	4.520	4,528	4.957	5.000	5.000	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100%	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	300	312	315	320	325	325	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	75	90	75%	95	100	100	
10	Jenis pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	513	515	71	517	519	519	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya (katagori perizinan).	Dokumen	250	280	70.30%	285	290	290	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	99	100	100	100	100	100	Cibeureum
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	80	95	63	-	-	95	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	77	93	85	94	95	95	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	0	0	0	0	0	0	
5	Jumlah KK Miskin	KK	576	500	480	450	400	400	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	0	0	0	0	0	0	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	95	95	89	95	95	95	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	89	92	90	95	97	97	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	85	90	92	95	100	100	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	210	230	225	245	250	250	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	95	100	100	100	Nusaherang
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	85	72.36%	-	-	85	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	75	75	80%	77	79	79	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	550	600	550	650	700	700	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1300	1150	14,539	1000	875	875	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	565	650	120	825	900	900	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100%	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	90	90	100%	90	90	90	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	85	90	90%	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	100	125	1,425	140	200	200	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	150	181	220	217	230	230	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	80	80	80	82	84	84	Kramatmulya
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	77	80	80	-	-	80	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	297	471	471	663	874	874	
5	Jumlah KK Miskin	KK	3.065	2.355	2,355	1.717	1.142	1.142	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	3.065	2.355	2,355	1.717	1.142	1.142	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	100	100	100	100	112	112	
9	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
10	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	230	250	600	280	310	310	
11	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	250	280	80	313	349	349	
1	Persentase penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Cigugur
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	80	80	80	-	-	80	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	90	>90	>90	>90	>90	>90	
4	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan yang Berada di wilayah Kecamatan Cigugur	Lokasi	78	>78	8	>78	>78	>78	
5	Jumlah Kelompok Masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Kelompok	5	5	15	10	15	15	
6	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	550	600	500	620	640	640	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
7	Jumlah Keluarga Miskin Yang Diberdayakan di Wilayah Kecamatan	Keluarga	462	82	82	100	130	130	
8	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	100	90	70	100	120	120	
9	Tingkat Kepatuhan Aparatur Desa dan atau Kelurahan Dalam Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	90	100	100	100	100	100	
10	Jumlah Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Persentase Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	107	316	132	316	316	316	
13	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	2041	646	1840	650	650	650	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	90	100	100	100	Cidahu

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	72	82	65%	-	-	82	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	75	80	75	85	90	90	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	297	350	325	400	500	500	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1.349	1.200	1,1	1.000	900	900	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	1.290	1.000	700	900	800	800	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	90	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	144	150	150	150	150	150	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	90	92	90	95	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	477	490	305	510	530	530	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	250	300	175	320	350	350	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	75	100	100	100	Hantara
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	70	72	81%	-	-	72	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	70	72	75%	74	76	76	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	705	776	327	854	862	862	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1586	1427	379	1284	1156	1156	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	777	855	340	941	1035	1035	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100%	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	172	172	100%	172	172	172	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	75	80	90%	85	90	90	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	84	92	87	101	111	111	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen			324				
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Pasawahan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	76	76	-	-	76	
3	partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Persen	80	82	82	84	88	88	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	156	159	159	162	165	165	
5	Jumlah KK Miskin	KK	2051	1876	1876	1576	1500	1500	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	0	0	0	0	0	0	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	110	110	110	110	110	110	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	486	506	100	528	548	548	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya (Kategori Perizinan)	Dokumen	568	588	76	608	628	628	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	0	10	8%	10	10	10	Cipicung
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	80	85	78%	-	-	85	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	65	70	65%	74	77	77	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	500	885	850	950	1055	1055	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1476	1358	1458	1277	1179	1179	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	1476	1358	1358	1277	1179	1179	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	50	70	68	80	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	70	80	80	90	130	130	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	80	100	90	100	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	120	130	125	140	150	150	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	576	720	700	750	780	780	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	120	240	240	360	480	480	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Selajambe
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	85	80	-	-	85	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	72	75	73	77	79	79	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	500	545	560	670	700	700	
5	Jumlah KK Miskin	KK	1300	1150	1050	1000	875	875	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	565	650	635	825	900	900	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	105	105	105	105	105	105	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	83	90	90	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	125	170	182	200	235	235	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	86	100	100	100	Sindangagung
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	85	90	80	-	-	90	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	85	90	>90	95	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	3139	3139	3139	3139	3139	3139	
5	Jumlah KK Miskin	KK	3898	3508	3508	3157	2841	2841	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	842	757	757	682	613	613	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	137	137	137	137	137	137	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	92	94	94	96	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	300	350	1000	375	400	400	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	200	225	55	250	275	275	
1	Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Kuningan
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)	Persen	76	77	77	-	-	77	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Persen	90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
4	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan yang Berada di wilayah Kecamatan Kuningan	Lokasi	70	75	75	85	95	95	
5	Jumlah Kelompok Masyarakat Kelurahan yang diberdayakan	Kelompok	20	20	20	20	20	20	
6	Jumlah UMKM Yang Difasilitasi Untuk Diberdayakan	UMKM	32	32	20	32	32	32	
7	Jumlah KK Miskin	KK	8042	7882	7882	7725	7571	7571	
8	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	1203	1180	1180	1157	1134	1134	
9	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	80	90	90	100	120	120	
10	Tingkat Kepatuhan Aparatur Desa dan atau Kelurahan Dalam Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100	
11	Jumlah Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
12	Persentase Kegiatan Pemerintahan Yang Dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
13	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Dokumen	900	1000	1000	1000	1000	1000	
14	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya (katagori perizinan).	Pelayanan	540	600	600	660	726	726	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	90	92	92	95	98	98	Cilimus
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	80	80	80	-	-	80	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	75	80	80	85	90	90	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	1.600	1,65	1,6	1700	1750	1750	
5	Jumlah KK Miskin	KK	2.838	2,5	2500	2,3	2,1	2,1	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	2.520	2.600	2,6	2.710	0.282	0.282	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	507	507	507	507	507	507	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	90	92	92	95	100	100	
10	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	477	490	490	510	530	530	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	299	310	310	330	350	350	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	70	73	74	75	78	78	Luragung

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan (berlaku hanya Pemilu)	Persen	-	80	81	-	-	80	
3	Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan	UMKM	4.520	4.957	4,957	5.000	5.500	5.500	
5	Jumlah KK Miskin	KK	10.113	9.102	9,104	8.192	7.373	7.373	
6	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi/dikoordinasikan untuk diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	4.181	4.520	4,521	4.957	5.000	5.000	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	300	312	314	320	325	325	
9	Tingkat kepatuhan aparatur Desa dan atau Kelurahan dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Persen	75	90	91	95	100	100	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
10	Jenis pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	2	2	2	2	2	2	
11	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	84	92	93	101	111	111	
12	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya (katagori perizinan).	Dokumen	250	280	74	285	290	290	
1	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang diatasi	Persen	100	100	80	100	100	100	Kalimanggis
2	Tingkat partisipasi masyarakat (Pemilih) dalam demokrasi politik di Kecamatan	Persen	-	80	60	-	-	80	
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan	Persen	100	100	80	100	100	100	
4	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	150	324	300	516	727	727	
5	Jumlah KK Miskin	KK	3.065	2.355	2,086	1.717	1.142	1.142	
6	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di wilayah kecamatan	Keluarga	3.065	2.355	2,086	1.717	1.142	1.142	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Ket.
			2022/2021 *	Target	Capaian	Target	Target	2026	
7	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan	Persen	100	100	85	100	100	100	
8	Jumlah aparatur pemerintahan Desa yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	100	100	96	100	100	100	
9	Jumlah pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	1	1	1	1	1	1	
10	Jumlah Pelayanan Adminsitrasi Non Perizinan	Pelayanan	75	85	80	90	100	100	
11	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan setiap tahunnya	Dokumen	100	130	124	150	200	200	

Sumber: SKPD Kab. Kuningan, 2025

3.2. Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020-2024

Secara umum komponen APBD terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; dan (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah berikut menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan selama 5 tahun terakhir. Bagian pertama memberikan gambaran kinerja anggaran, yang direfleksikan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA merefleksikan bagaimana kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan setiap potensi penerimaan, terutama yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah. Selain sisi penerimaan, dari sisi pengeluaran akan diperoleh gambaran bagaimana kebijakan belanja Pemerintah Daerah juga kebijakan pembiayaan terkait dengan pemanfaatan surplus atau dalam upaya mengatasi defisit anggaran.

Secara umum kinerja APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2020 hingga Tahun 2024 menunjukkan realisasi pendapatan yang berfluktuatif. Realisasi pendapatan telah melebihi 95 persen. Realisasi komponen Belanja Daerah telah mencapai target tahunannya, namun dengan rata-rata penyerapan di angka 90 persen, kedepan diharapkan penyerapannya akan semakin membaik. Untuk realisasi komponen Penerimaan Pembiayaan juga menunjukkan realisasi yang berfluktuatif, namun 2 tahun terakhir Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan telah ada perbaikan. Sedangkan untuk target komponen Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020 hingga 2021 realisasinya masih belum sesuai harapan. Dalam perspektif perencanaan, kondisi tersebut menunjukkan penetapan target yang terlalu optimis, namun untuk target Tahun 2023 sudah tercapai sesuai harapan bahkan melampaui target. Lebih lanjut disajikan dalam tabel ringkasan Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah,

Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

TABEL 3.1
REALISASI DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH, PENERIMAAN PEMBIAYAAN, DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020-2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSEN	BERTAMBAH / BERKURANG
PENDAPATAN DAERAH				
2020	2.892.812.357.957	2.776.498.025.041	95,98%	-116.314.332.916
2021	2.824.451.702.434	2.778.572.170.843	98,38%	-45.879.531.591
2022	2.978.249.493.326	2.679.853.810.091	89,98%	-298.395.683.235
2023	2.894.894.844.147	2.842.014.508.932	98,17%	-52.880.335.215
2024	3.112.697.038.561	2.677.550.380.176	86,02%	-435.146.658.385
BELANJA DAERAH				
2020	2.948.015.557.461	2.795.800.003.283	94,84%	-152.215.554.178
2021	2.853.253.923.696	2.742.154.197.355	96,11%	-111.099.726.341
2022	2.853.253.923.696	2.708.515.650.596	94,93%	-144.738.273.100
2023	2.826.272.144.220	2.832.406.522.597	100,22%	6.134.378.377
2024	2.981.043.827.322	2.371.647.242.754	79,56%	-609.396.584.568
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
2020	55.143.199.504	54.604.199.504	99,02%	-539.000.000
2021	32.302.221.262	32.302.221.262	100,00%	0
2022	32.302.221.262	65.266.792.658	202,05%	32.964.571.396
2023	0	72.294.861.048		72.294.861.048
2024	38.500.000.000	95.167.422.138	247,19%	56.667.422.138

PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
2020	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00%	0
2021	3.500.000.000	3.500.000.000	100,00%	0
2022	3.500.000.000	20.499.999.390	585,71%	16.999.999.390
2023	26.500.000.000	66.569.789.700	251,21%	40.069.789.700
2024	4.000.000.000	58.726.906.173		54.726.906.173

Sumber: BPKAD Kabupaten Kuningan, 2020-2024

3.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengelola Belanja Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang komponennya dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1) Penerimaan pajak daerah;
2) Penerimaan retribusi daerah;
3) Penerimaan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan; dan
4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan dari Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer, terdiri dari:

1) Dana bagi hasil;
2) Dana alokasi umum; dan
3) Dana alokasi khusus.

Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, bersumber dari :

1) Bantuan /hibah
2) Dana darurat

3) Lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh Pemerintah

Analisis Pendapatan Daerah menggunakan angka rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang. Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan selama kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 2,83 persen. Pada Tahun 2020, pendapatan Kabupaten Kuningan tercatat sebesar Rp. 2,824 triliun mengalami penurunan pada Tahun 2021 sebesar minus 3,45% menjadi Rp. 2.978 triliun. Tahun - tahun selanjutnya, Pendapatan Daerah berangsur tumbuh namun tertekan dengan adanya pandemi Covid-19, pendapatan daerah naik tetapi tidak signifikan sehingga pada Tahun 2024 pendapatan daerah berangsur naik menjadi sebesar Rp. 3,112 triliun.

TABEL 3.2
RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020–2024 (JUTA RUPIAH)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
PENDAPATAN DAERAH	**2.934.051.323.031**	**2.652.148.692.376**	**2.679.853.810.091**	**2.842.014.508.932**	**2.677.550.380.176**	
Pendapatan Asli Daerah	**390.151.405.630**	**354.017.458.295**	**346.586.033.112**	**350.362.663.121**	**221.470.105.855**	
Pendapatan Pajak Daerah	120.045.749.600	126.230.000.000	107.678.513.745	122.612.598.317	68.143.356.255	8,11%
Hasil Retribusi Daerah	99.074.791.156	16.545.809.499	77.239.874.431	55.688.506.176	12.452.590.950	88,12%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.371.500.000	8.004.650.000	7.138.783.168	6.674.861.370	5.573.460.803	5,21%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	163.659.364.874	203.236.998.796	154.528.861.768	165.386.697.258	135.300.697.847	3,79%
Pendapatan Transfer	***2.498.743.438.517***	***2.290.131.234.081***	***2.323.512.627.999***	***2.486.364.724.961***	***2.433.251.146.353***	***2,03%***
Transfer Pemerintah Pusat	2.113.432.942.000	2.137.968.827.064	2.072.555.555.913	2.124.497.547.732	2.299.738.040.641	0,67%
Transfer Antar-Daerah	385.310.496.517	152.162.407.017	250.957.072.086	361.867.177.229	133.513.105.712	26,71%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	***45.156.478.884***	***8.000.000.000***	***9.755.148.980***	***5.287.120.850***	***22.829.127.968***	-43,02%
Hibah	6.000.000.000	8.000.000.000	9.755.148.980	5.287.120.850	-	-21,50%

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					22.829.127.968	

Jika dillihat dari tren presentase masing-masing komponen pendapatan Kabupaten Kuningan (Tabel 3.2) dapat diketahui bahwa sumber pendapatan dari Lain-lain Pendapatan transfer menjadi mayoritas pembentuk pendapatan daerah dan sumber dari pendapatan PAD mengalami tren flaktuatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Kuningan terus berupaya mengarah pada kemandirian pendapatan daerah.

GAMBAR 3.1
PROPORSI REALISASI KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020-2024

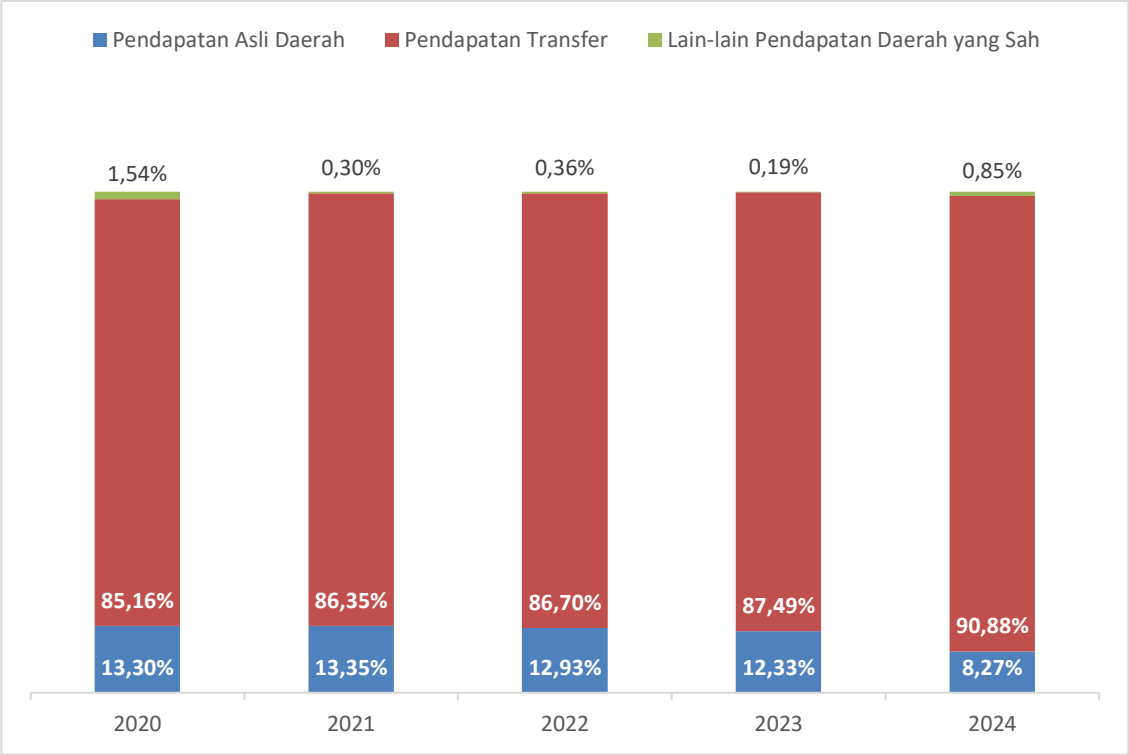

Sumber : BAPENDA Kabupaten Kuningan, 2025

Apabila dilihat dari proporsi komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah (Tabel 3.1) terlihat bahwa pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adapun Hasil Retribusi Daerah memberikan kontribusi paling rendah terhadap PAD Kabupaten Kuningan.

Walaupun demikian, persentase proporsi dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami fluktuasi tren proporsi.

GAMBAR 3.2
PROPORSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2020-2024

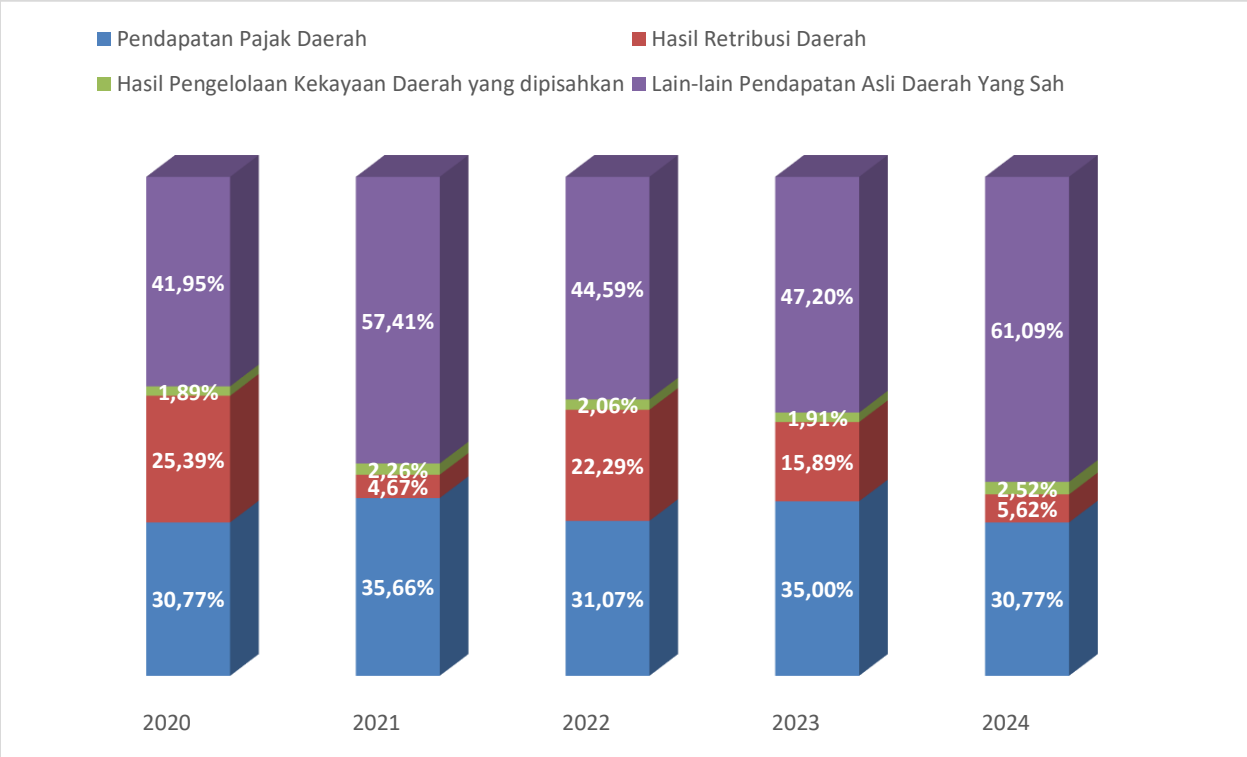

Sumber : BAPENDA Kabupaten Kuningan, 2025.

Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain. Derajat Kemandirian Daerah ditunjukkan oleh proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan, sedangkan Rasio Ketergantungan Daerah ditunjukkan dari proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Total Pendapatan. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, maka semakin besar

tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang rendah.

3.2.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa,dan Belanja modal.

Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2020-2024 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Perkembangan belanja daerah kabupaten kuningan selama 5 (lima) tahun menunjukkan realisasi fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang semula pada Tahun 2020 sebesar Rp 2,796 trilyun menjadi sebesar Rp 2,832 trilyun pada tahun 2023 dan menurun di Tahun 2024 menjadi 2.372 dengan Belanja Daerah tertinggi dicapai pada Tahun 2023 sebesar Rp 2,832 trilyun, terendah dialami pada Tahun 2024 sebesar Rp 2,372 trilyun degan rerata sebesar Rp 2,690 trilyun. (Tabel 3.4)

TABEL 3.3
RATA-RATA PERTUMBUHAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN PERIODE 2020-2024

KETERANGAN BELANJA	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***Rata-Rata Pertumbuhan***
BELANJA DAERAH	***2.795.800.003.283***	***2.742.154.197.355***	***2.708.515.650.596***	***2.832.406.522.597***	***2.371.647.242.754,20***	
Belanja Operasi	***1.909.824.149.985***	***1.951.840.892.690***	***2.010.061.509.032***	***2.071.607.933.939***	***1.886.225.546.569,20***	
Belanja Pegawai	*1.198.140.805.050*	*1.152.944.764.985*	*1.146.569.988.635*	*1.236.027.150.638*	*1.249.061.715.710*	*-0,34%*
Belanja Barang dan Jasa	*630.797.764.199*	*729.215.570.980*	*787.351.371.791*	*740.038.445.929*	*556.582.477.734,20*	*4,77%*
Belanja Bunga	*-*	*-*	*1.408.740.156*	*2.619.236.622*	*3.218.634.875*	*0,21482*
Belanja Subsidi	*-*	*-*	*-*		*-*	*0,00%*
Belanja Hibah	*50.895.164.000*	*59.840.624.500*	*66.576.805.450*	*83.430.575.750*	*72.457.138.250*	*15,75%*
Belanja Bantuan Sosial	*29.990.416.736*	*9.839.932.225*	*8.154.603.000*	*9.492.525.000*	*4.905.580.000*	*1,81%*
Belanja Modal	***378.703.766.805***	***320.727.654.179***	***229.856.933.449***	***254.910.604.687***	***326.882.705.076***	

KETERANGAN BELANJA	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***Rata-Rata Pertumbuhan***
Belanja Modal Tanah	*4.732.989.296*	*7.612.718.068*	*26.751.824.467*	*11.192.050.724*	*181.406.240*	*94,42%*
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	*179.573.821.550*	*104.329.063.606*	*49.977.556.706*	*67.447.867.808*	*171.187.413.767*	*24,83%*
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	*112.473.642.588*	*88.667.096.662*	*66.623.156.876*	*81.763.034.176*	*106.969.766.797*	*10,23%*
Belanja Modal Jalan, Jarigan dan Irigasi	*43.926.659.308*	*119.717.944.843*	*79.711.956.467*	*86.485.838.150*	*43.225.942.800*	*29,31%*
Belanja Aset Tetap lainnya	*37.996.654.063*	*400.831.000*	*6.792.438.933*	*7.989.804.829*	*5.025.215.472*	*372,82%*
Belanja Aset lainnya				*32.009.000*	*292.960.000*	*0,00%*
Belanja Tidak Terduga	***52.902.857.991***	***25.272.600.802***	***11.870.504.527***	***9.491.497.400***	***9.226.991.000***	
Belanja Tidak Terduga	*52.902.857.991*	*25.272.600.802*	*11.870.504.527*	*9.491.497.400*	*9.226.991.000*	***645%***
Belanja Transfer	***454.369.228.502***	***444.313.049.684***	***456.726.703.588***	***496.396.486.571***	***149.312.000.109***	

KETERANGAN BELANJA	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***Rata-Rata Pertumbuhan***
Belanja Bagi Hasil (10% Paret)	*14.370.649.039*	*13.580.038.690*	*15.921.642.838*	*18.185.397.238*	*17.543.860.517*	*9%*
Belanja Bantuan Keuangan (DD, ADD)	*439.998.579.463*	*430.733.010.994*	*440.805.060.750*	*478.211.089.333*	*131.768.139.592*	***2%***
Jumlah Belanja	***2.795.800.003.283***	***2.742.154.197.355***	***2.708.515.650.596***	***2.832.406.522.597***	***2.371.647.242.754***	
Total Surplus/ (Defisit)	***(2.795.800.003.283)***	***(2.742.154.197.355)***	***(2.708.515.650.596)***	***(2.832.406.522.597)***	***(2.371.647.242.754)***	

Sumber : BPKAD Kabupaten Kuningan, 2025

Sepanjang Tahun 2020-2024, penggunaan Belanja Daerah untuk Belanja Operasi berfluktuatif, pada Tahun 2020 tercatat 68,31 persen, meningkat menjadi 74,21 persen pada Tahun 2022, mengalami penurunan menjadi sebesar 73,14 persen pada Tahun 2023 dan mengalami kenaikan kembali pada Tahun 2024 menajadi 79,53 persen (gambar 3.4).

GAMBAR 3.3
PROPORSI BELANJA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020-2024

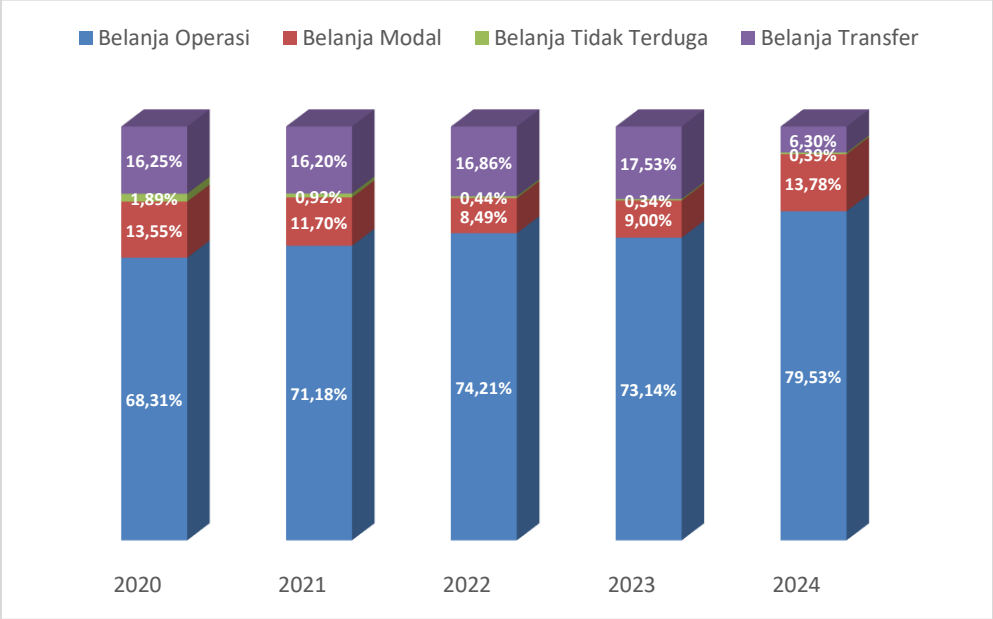

Sumber : BPKAD Kabupaten Kuningan, 2025

3.2.3 PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan,

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman daerah.

Adapun pembiayaan daerah Kabupaten Kuningan tahun 2017-2021 disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 3.4
RATA-RATA PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN KABUPATEN KUNINGAN
PERIODE 2020-2024

KETERANGAN PEMBIAYAAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata pertumbuhan
PEMBIAYAAN DAERAH	**51.604.199.504**	**28.802.221.262**	**44.766.793.268**	**5.725.071.348**	**36.440.515.965,13**	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	***54.604.199.504***	***32.302.221.262***	***65.266.792.658***	***72.294.861.048***	***95.167.422.138***	
SILPA Sebelumnya	54.604.199.504	32.302.221.262	65.266.792.658	15.908.071.348	15.340.516.965,13	60,38%
Pencairan Dana Cadangan				17.400.000.000	21.100.000.000	-0,25
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				-	-	0
Penerimaan Pinjaman Daerah				38.986.789.700	58.726.905.173	-0,25
Pinjaman Dalam Negeri					-	0,00%
Penerimaan Piutang Daerah					-	0,00%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**54.604.199.504**	**32.302.221.262**	**65.266.792.658**	**72.294.861.048**	**95.167.422.138**	
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	***3.000.000.000***	***3.500.000.000***	***20.499.999.390***	***66.569.789.700***	***58.726.906.173***	
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yg Jatuh Tempo				38.986.789.700	58.726.906.173	-25,00%
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	3.500.000.000	5.499.999.390	4.083.000.000	-	12,01%
Pembentukan Dana Cadangan			15.000.000.000	23.500.000.000	-	14,17%
Pemberian Pinjaman Daerah				-	-	0

KETERANGAN PEMBIAYAAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata pertumbuhan
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**3.000.000.000**	**3.500.000.000**	**20.499.999.390**	**72.294.861.048**	**58.726.906.173**	
Pembiayaan Netto	**51.604.199.504**	**28.802.221.262**	**44.766.793.268**	**-**	**36.440.515.965**	
DEFISIT	**51.604.199.504**	**28.802.221.262**	**44.766.793.268**	**-**	**36.440.515.965,13**	

Sumber : BPKAD Kabupaten Kuningan, 2025

Dari data tersebut terlihat bahwa penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kuningan setiap tahunnya, dimana SILPA memberikan kontribusi terbesar penerimaan Pembiayaan Daerah. Sedangkan dari sisi pengeluaran Pembiayaan Daerah, terlihat peningkatan pengeluaran yang semula Rp 3 milyar pada Tahun 2020 menjadi sebesar Rp 58,73 milyar pada tahun 2024. Pengeluaran terbesar Pembiayaan Daerah disebabkan oleh Pembayaran Pokok Utang serta Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Perusahaan daerah (BUMD) kabupaten kuningan.

3.2.4 NERACA DAERAH

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintahan Daerah, pihak Legislatif Daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Aset memberikan informasi tentang sumberdaya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

TABEL 3.5
RATA-RATA PERTUMBUHAN NERACA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
ASET	2.649.173.155.270,54	2.800.682.920.021,14	2.927.970.125.369,59	3.069.309.385.426,31	3.304.708.928.764,87
A. Aset Lancar	106.317.329.605,23	118.980.815.484,17	72.115.093.408,32	89.165.522.482,11	96.891.122.599,81
Kas dan Setara Kas	33.801.393.959,06	65.322.987.384,47	16.278.489.290,13	16.063.609.484,65	**24.134.094.230,00**
Piutang Pendapatan	66.903.141.150,09	37.026.542.237,09	37.442.840.272,74	54.814.187.788,65	54.469.303.161,00
Penyisihan Piutang	- 19.922.832.700,53	- 12.526.965.390,14	- 14.252.149.670,68	- 15.698.345.109,55	- 15.698.345.109,55
Beban dibayar dimuka	-	-	365.348.351,65	789.195.032,97	789.195.032,97
Persediaan	25.535.627.196,61	29.158.251.252,75	32.280.565.164,48	33.196.875.285,39	33.196.875.285,39
B. Investasi Jangka Panjang	94.805.940.742,34	100.695.095.907,38	95.915.104.233,68	94.694.267.200,75	94.694.267.200,75
C. Aset Tetap	2.418.465.562.827,94	2.540.241.244.997,11	2.702.590.287.638,32	2.800.387.375.830,83	3.048.590.305.893,04
D. Dana Cadangan	-	-	15.000.000.000,00	21.100.000.000,00	-
E. Aset Lainnya	29.584.322.095,03	40.765.763.632,48	42.349.640.089,27	41.131.810.099,22	41.702.823.257,87
F. Aset Properti Investasi	-	-	-	22.830.409.813,40	22.830.409.813,40
JUMLAH ASET	**2.649.173.155.270,54**	**2.800.682.920.021,14**	**2.927.970.125.369,59**	**3.069.309.385.426,31**	**3.304.708.928.764,87**
KEWAJIBAN	40.660.086.413,14	78.561.438.465,25	270.571.782.850,16	283.252.861.571,86	274.567.516.596,64
A. Kewajiban Jangka Pendek	40.660.086.413,14	78.561.438.465,25	270.571.782.850,16	283.252.861.571,86	274.567.516.596,64
B. Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	**40.660.086.413,14**	**78.561.438.465,25**	**270.571.782.850,16**	**283.252.861.571,86**	**274.567.516.596,64**
EKUITAS	**2.608.513.068.857,41**	**2.722.121.481.555,90**	**2.657.398.342.519,43**	**2.786.056.523.854,45**	**3.030.141.412.168,23**
Ekuitas	2.608.513.068.857,41	2.722.121.481.555,90	2.657.398.342.519,43	2.786.056.523.854,45	3.030.141.412.168,23
JUMLAH EKUITAS	**2.608.513.068.857,41**	**2.722.121.481.555,90**	**2.657.398.342.519,43**	**2.786.056.523.854,45**	**3.030.141.412.168,23**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**2.649.173.155.270,55**	**2.800.682.920.021,15**	**2.927.970.125.369,59**	**3.069.309.385.426,31**	**3.304.708.928.764,87**

Berdasarkan neraca daerah tersebut, dapat dianalisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio (Tabel III.6). Rasio keuangan yang dianalisis yaitu Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas (Leverage). Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini adalah:

1. *Current Ratio* (rasio lancar) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya. Dari tabel 3.6 dapat ketahui bahwa Rasio lancar Pemerintah kabupaten kuningan berada diatas angka 1, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya tergolong tinggi.
2. *Quick Ratio* (rasio cair) yaitu ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang lebih likuid, dimana persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid, sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Dengan melihat tabel 3.9, Rasio Cair Pemerintah Kabupaten Kuningan capaiannya lebih dari 1, artinya Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Hal tersebut menunjukkan kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek.

3.3.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Terkait Terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan kurun waktu tahun 2020 hingga Tahun 2024, akan diuraikan ke dalam substansi Proporsi Penggunaan Anggaran untuk melihat proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur; serta Analisis Pembiayaan, yang diuraikan ke dalam analisis Sumber Penutup Defisit Riil, analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

BAB IV
P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 maka ada beberapa pokok kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara garis besar capaian masing-masing indikator kinerja daerah pada masing-masing bidang terdapat beberapa capaian indikator yang tercapai di tahun 2024, sedangkan periode RPD masih dua tahun lagi untuk mencapai target-target capaian. Adapaun beberapa indikator kinerja daerah yang belum tercapai, mampu mengakselerasi kinerja program untuk mencapai target di perode RPD.
2. Perlu penekanan, fokus dan akselerasi kepada Perangkat Daerah pengampu indikator kinerja daerah yang belum tercapai realisasinya sampai tahun 2024 ini, mengingat masa RPD yang hanya 2 (dua) tahun lagi. Perlu dipertimbangkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran di masing-masing Perangkat Daerah dengan memilih program-program yang strategis.

4.2. SARAN

1. Keterbatasan pengalokasian anggaran di masing-masing Perangkat Daerah terlihat sangat berpengaruh dalam pencapaian masing-masing indikator program kegiatan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya alasan ketidaktercapaiannya dari suatu indikator. Disinilah peran serta kreatifitas pimpinan dalam meramu kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program kegiatan yang dituangkan dalam ketetapan kinerja setiap tahunnya. Perumusan penetapan kinerja merupakan turunan dari kesinambungan perencanaan 5 tahunan Perangkat Daerah yang bersangkutan, oleh sebab itu pimpinan Perangkat Daerah harus melaksanakan langkah-langkah strategis dengan melaksanakan pemilihan pioritas program setiap tahunnya dan prioritas program dalam kurun waktu 5 tahunan. Mana program kegiatan yang memiliki daya

ungkit yang sangat berpengaruh pada progres capaian indikator atau bersinergi dengan indikator lainnya baik lingkup dinas maupun bersinergi dengan Perangkat Daerah lainnya seperti **pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.**

2. Seperti kita ketahui bersama bahwa keterbatasan anggaran sudah menjadi alasan yang klise pada setiap organisasi pemerintahan daerah di negara ini. Hal ini harus dijadikan tantangan bagi Perangkat Daerah terkait khususnya penghasil, guna melakukan penggalian potensi serta terobosan baru dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dengan melihat potensi, kekuatan serta peluang yang dapat diambil oleh Perangkat Daerah penghasil.